

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

INDONESIA ECONOMIC QUARTERLY

September 2018

Urbanisasi untuk semua



**PERKEMBANGAN TRIWULANAN
PEREKONOMIAN INDONESIA**
Urbanisasi untuk semua

September 2018

Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly, IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo A. Chaves, *Country Director* untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim *Macroeconomics, Trade and Investment (MTI) Global Practice*, dibawah bimbingan Ndiame Diop (*Practice Manager*) dan Frederico Gil Sander (*Lead Economist*). Dipimpin oleh Derek H. C. Chen, *Senior Economist* dan *lead author*, tim inti terdiri dari Abigail, Arsianti, Dwi Endah Abriningrum, Francis Addeah Darko, Indira Maulani Hapsari, Jaffar Al-Rikabi, Maria Monica Wihardja, dan Pui Shen Yoong. Dukungan administrasi diberikan oleh Sylvia Njotomihardjo. Diseminasi dilakukan oleh Nugroho Sunjoyo, Jerry Kurniawan, dan GB Surya Ningnagara atas bimbingan Lestari Boediono Qureshi.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Indira Maulani Hapsari (Bagian A.1, Kotak A.1 dan A.5), Jaffar Al-Rikabi (Kotak A.2 dan Bagian A.4), Adelia Surya Pratiwi (Kotak A.3), Pui Shen Yoong (Bagian A.3), Dwi Endah Abriningrum dan Pui Shen Yoong (Bagian A.6), Maria Monica Wihardja dibantu oleh Hamidah Alatas (Bagian A.7), Francis Addeah Darko (Bagian A.8), Derek H.C. Chen (Bagian A.9), Sailesh Tiwari (Penulis Utama), Frederico Gil Sander, Mark Roberts, Pui Shen Yoong dan Jane Park, dengan masukan dari Abhas Jha, Judy Baker, Marcus Lee, Rizal Shidiq, Nancy Lozano-Garcia, Imam Setiawan, Ratih Dwi Rahmadanti dan Lourentius Dimas (Bagian B), dan Abigail (Lampiran). Laporan ini juga mendapat masukan dari diskusi mendalam dengan dan masukan dari Ekaterina T. Vashakmadze (*Senior Economist*, DECPG, Bank Dunia), Ergys Islamaj (*Senior Economist*, EAPCE, Bank Dunia) dan Francesca de Nicola (*Economist*, EAPCE, Bank Dunia).

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction and Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau *Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT*) melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA). Kerja Bank Dunia pada urbanisasi di bagian B dari edisi ini mendapatkan dukungan finansial dari *The Swiss State Secretariat for Economic Affairs* (SECO) melalui *the Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund* (IDSUN MDTF), dan dari pemerintah Australia.

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Photo sampul depan: Westend61 GmbH/Alamy Stock Photo.

Sisa Photo merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id

Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi snjotomihardjo@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi dchen2@worldbank.org.

Singkatan

AFC	Asian Financial Crisis
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
BI	Bank Indonesia
BIS	Bank for International Settlement
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLU	Off Budget Fund
BOP	Balance of Payments
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPNT	Non-cash food assistance
BPS	Badan Pusat Statistik
BRT	Bus Rapid Transport
CAD	Current Account Deficit
CEIC	Census Economic Information Center
CPB	Central Planning Bureau
CPI	Consumer Price Indeks
CPO	Crude Palm Oil
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DECPG	Development Economics Prospects Group
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DMO	Domestic Market Obligation
DRC	Development Research Center
EAP	East Asia Pacific
EAPCE	EAP Chief Economist
EE	Employment Elasciticity
EMBI	Emerging Market Bond Indeks
EMBIG	EMBI global
EMCI	Emerging Market Currency Indeks
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral (Energy and Mineral ReSumbers)
FAME	Methyl Fatty Acid Ester
FAO	for agricultural output
FDI	Foreign Direct Investment
FLPP	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
FLFPR	Female Labor Force Participation Rate
G20	Group of 20
GDP	Gross Domestic Product
GE	Generalised Entropy
GFCF	Gross Fixed Capital Formation
GNFS	Goods and Non-Factor Services
GoI	Government of Indonesia
HOFINET	Housing Finance Information Network
IDR	Indonesia Rupiah
IDSUN	Indonesia Sustainable Urbanization
IEQ	Indonesia Economic Quarterly
IHS	Institute Human Studies
IIF	Institute for Internatioal Finance
ILO	International Labor Organization

IMF	International Monetary Fund
IPI	Industrial Production Indeks
ISEAS	Institute of Southeast Asian Studies
JKM	Jaminan Kematian
Kepmenkes	Keputusan Menteri Kesehatan (Health Ministerial Decree)
KOTAKU	National Slum Upgrading Program
LFPR	Labor Force Participation Rate
LGST	Luxury Goods Sales Tax
LHS	Left Hand Side
LNG	Liquefied Natural Gas
LPG	Liquid Petroleum Gas
MDTF	Multi-Donor Trust Fund
MGI	McKinsey Global Institute
MoF	Ministry of Finance
MPWH	Ministry of Public Works and Housing
MT	Metric Ton
MTI	Macroeconomics, Trade and Investment
NAHP	National Affordable Housing Program
NCEP	National Community Empowerment Program
NIK	Nomor Induk Kependudukan (Population Registration Number)
N-O&G	Non-Oil & Gas
non-O&G	Non-Oil & Gas
NPL	Non-Performing Loans
NTI	Net Trade Indeks
NUDP	National Urban Development Project
NUWAS	National Urban Water Supply Program
O&G	Oil and Gas
OCBC	Overseas-Chinese Banking Corporation
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OJK	Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority
OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries
PBI-JKN	Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional
PCBT	Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi
Perpres	Peraturan Presiden (Presidential Decree)
PISA	Programme for International Student Assessment
PKH	Program Keluarga Harapan (Family Hope Program)
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMI	Purchasing Managers' Indeks
PNBP	Other Non-Tax Revenues
PODES	Potensi Desa (Village Potential)
PPI	Producer Price Indeks
PPP	Purchasing Power Parity
PT	Perseroan Terbatas
PU-net	Pekerjaan Umum Internet
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
qoq	quarter-on-quarter
RHS	Right Hand Side
RIDF	Regional Infrastructure Development Fund
RON	Research Octane Number
sa	Seasonally adjusted
Sakernas	National Labor Force Survey
S&P	Standard & Poors
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SBN	Surat Berharga Negara
SD	standard deviation

SECO	Swiss State Secretariat for Economic Affairs
SEMEFPA	Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis
SITC	Standard international Trade Classification
SMI	selected macroeconomic indicators
SUN	Surat Utang Negara
SURR	Social, Urban, Rural and Resilience
Susenas	National Socio-Economic Survey
TA	Tax Amnesty
THR	Tunjangan Hari Raya (allowances for the festive season)
ToT	Terms-of-trade
USTR	United States Trade Representative
VAT	Value Added Tax
WDI	World Development Indicators
yoy	year-on-year

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	I
SINGKATAN	II
DAFTAR ISI	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
A. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN FISKAL TERKINI	5
1. Pertumbuhan meningkat didukung oleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi, mengimbangi investasi yang lebih lemah dan ekspor neto yang lebih rendah	5
2. Ekspor komoditas utama Indonesia mencatat gambaran beragam karena harga berfluktuasi di Triwulan ke-2... ..	10
3. Defisit neraca transaksi berjalan membesar seiring dengan makin tingginya harga minyak mentah dan meningkatnya impor barang modal	14
4. Inflasi IHK (<i>headline inflation</i>) tetap tidak berubah di Triwulan ke-2	19
5. Kondisi makro-keuangan Indonesia secara umum menegang	20
6. Peningkatan penerimaan yang tinggi mendukung belanja yang lebih tinggi, kebanyakan pada bantuan sosial dan subsidi	23
7. Kondisi pasar tenaga kerja tetap menggembirakan dengan tingkat tenaga kerja yang bekerja mencapai tingkat yang tertinggi selama dua dekade	27
8. Tingkat kemiskinan Indonesia menurun menjadi satu digit untuk pertama kalinya	31
9. Pandangan (<i>outlook</i>) dan risiko pertumbuhan ekonomi.....	33
B. MENGUPAYAKAN AGAR URBANISASI DAPAT BERMANFAAT BAGI SEMUA MASYARAKAT INDONESIA	40
1. Urbanisasi terkait dengan semakin besarnya kemakmuran dan lebih rendahnya kemiskinan, tetapi kepadatan penduduk yang berlebihan dapat merusak manfaat ini	40
2. Indonesia sedang mengalami urbanisasi dengan laju yang 'normal', sebagian besar melalui transformasi dari daerah-daerah yang semula adalah daerah pedesaan.....	43
3. Peluang ekonomi yang lebih baik di daerah metropolitan telah membantu banyak orang Indonesia keluar dari kemiskinan dan bergabung dengan kelas menengah	48
4. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan tetap ada, tetapi ketimpangan yang terbesar di Indonesia berada di antara kedua daerah tersebut	51
5. Keterbatasan dalam hal transportasi dan perumahan memperparah ketimpangan	56
6. Indonesia bisa membuat urbanisasi bermanfaat bagi semua masyarakat Indonesia melalui tiga 'M'.....	60
REFERENSI	67
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA	71

GAMBAR

Gambar ES.1: Konsumsi yang lebih tinggi mengimbangi pertumbuhan investasi yang lebih lemah dan ekspor bersih yang lebih rendah.....	3
Gambar ES.2: Selisih antara imbal hasil obligasi Indonesia dengan imbal hasil obligasi AS telah melebar secara signifikan.....	3
Gambar ES.3: Inflasi IHK tetap rendah di Triwulan ke-2.....	4
Gambar ES.4: Total penerimaan tumbuh dengan laju yang tercepat dalam sepuluh tahun, didorong oleh pajak penghasilan dan PPN non-Migas	4
Gambar ES.5: Tingkat kemiskinan bulan Maret 2018 mengalami penurunan yoy yang terbesar sejak bulan Maret 2011	4
Gambar ES.6: Surplus perdagangan barang menurun, menyebabkan memburuknya neraca transaksi berjalan.....	4
Gambar A.1: Tingkat konsumsi yang lebih kuat mengimbangi pertumbuhan investasi yang lebih lemah dan ekspor neto yang lebih rendah	5
Gambar A.2: Sektor-sektor yang terkait dengan komoditas dan ritel bertumbuh lebih cepat	6
Gambar A.3: Pertumbuhan investasi di sektor gedung dan bangunan melemah, tetapi pertumbuhan investasi permesinan dan peralatan sangat tinggi	7
Gambar A.4: Produksi industri global sedikit melambat dari Triwulan ke-1.....	8
Gambar A.5: Indeks Manajer Pembelian Komposit Global menurun secara signifikan	8
Gambar A.6: Gejolak pasar keuangan global berlanjut ke Triwulan ke-2.....	9
Gambar A.7: Sektor-sektor yang terkait dengan komoditas dan perdagangan ritel bertumbuh lebih cepat.....	10
Gambar A.8: Pertumbuhan produksi sektor industri menurun dan indeks PMI manufaktur bertahan di wilayah ekspansi selama 6 bulan berturut-turut.....	10
Gambar A.9: Triwulan ke-2 mencatat berlanjutnya pertumbuhan volume ekspor gas, pemulihan volume ekspor karet, serta penurunan volume ekspor batubara, minyak dan logam dasar	11
Gambar A.10: Harga untuk komoditas utama Indonesia mengalami kondisi yang berbeda-beda di Triwulan ke-2, dengan minyak mentah yang naik, minyak kelapa sawit yang turun	12
Gambar A.11: Di Semester ke-2, pasar berjangka (<i>future markets</i>) memperkirakan harga minyak mentah menjadi stabil, dan batubara menurun tajam	12
Gambar A.12: Ekspor batubara sebagai bagian dari total produksi telah menurun pada tahun 2018.....	13
Gambar A.13: ... karena adanya kebijakan baru yang mengharuskan penjualan ke pasar dalam negeri dengan harga yang lebih rendah.....	13
Gambar A.14: Surplus perdagangan barang menurun, menyebabkan memburuknya neraca transaksi berjalan	14
Gambar A.15: Pertumbuhan ekspor berbasis luas, tetapi harga minyak yang lebih tinggi mendorong ekspor minyak dan gas.....	15
Gambar A.16: ...serta impor bahan bakar dan pelumas, yang berkontribusi terhadap percepatan impor.....	15
Gambar A.17: Investor asing menjual surat utang dan ekuitas Indonesia di Paruh Pertama tahun 2018... ..	16
Gambar A.18: ... tetapi neraca keuangan tetap surplus karena masuknya portofolio dan investasi lain di Triwulan ke-2	16
Gambar A.19: Penanaman modal asing langsung bersih (FDI) meningkat, sebagian besar di sektor manufaktur... ..	17
Gambar A.20: ...tetapi penanaman modal asing langsung bersih belum menutupi defisit transaksi berjalan di beberapa triwulan terakhir.....	17
Gambar A.21: Inflasi IHK tetap rendah di Triwulan ke-2.....	19
Gambar A.22: Meskipun harga minyak dunia meningkat, terdapat peningkatan harga bahan bakar eceran yang lebih kecil di Triwulan ke-2, dengan BBM bersubsidi yang harganya tidak berubah	20
Gambar A.23: Harga eceran ayam dan telur terus meningkat di Triwulan ke-2	20
Gambar A.24: Mata uang Rupiah dan mata uang negara-negara pasar berkembang terdepresiasi lebih lanjut terhadap Dolar AS di Triwulan ke-2.....	21
Gambar A.25: Meskipun menguat di Triwulan ke-2, Rupiah secara umum terdepresiasi di tahun 2018 secara efektif riil.....	21
Gambar A.26: Selisih antara imbal hasil obligasi Indonesia dan negara-negara pasar berkembang dengan imbal hasil obligasi AS telah melebar secara signifikan	22
Gambar A.27: Selisih (<i>spread</i>) yang lebih lebar ini terutama disebabkan oleh meningkatnya risiko mata uang daripada risiko kredit.....	22
Gambar A.28: Pertumbuhan kredit meningkat sejalan dengan suku bunga pinjaman yang lebih rendah	23
Gambar A.29: Indikator perbankan menunjukkan bank dengan kapitalisasi yang baik dengan Kredit Mcet (NPL) yang rendah.....	23
Gambar A.30: Total penerimaan meningkat dengan laju tercepat dalam sepuluh tahun terakhir, didorong oleh pajak penghasilan dan PPN Non-Migas	24
Gambar A.31: Belanja sosial dan subsidi bahan bakar terus mendorong peningkatan belanja yang lebih tinggi	26
Gambar A.32: Pencairan subsidi belanja sosial, belanja pegawai, dan subsidi listrik lebih tinggi	26

Gambar A.33: Tingkat lapangan kerja (tingkat pengangguran) mencapai rekor tertinggi (terendah) dalam dua dekade terakhir di bulan Februari 2018.....	28
Gambar A.34: Terjadi peningkatan yang signifikan dan berlanjut dalam persentase setengah pengangguran secara sukarela dibandingkan dengan setengah pengangguran secara terpaksa.....	28
Gambar A.35: Terdapat tanda “penuaan” di antara angkatan kerja	29
Gambar A.36: Tahun ini, tingkat pendidikan para pekerja baru di pasar tenaga kerja membalikkan tren selama lima tahun ini ke tenaga kerja yang lebih berpendidikan.....	29
Gambar A.37: Transformasi struktural seperti tiga tahun terakhir ini belum pernah terjadi sebelumnya	30
Gambar A.38: Kenaikan upah minimum menghambat penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur	30
Gambar A.39: Tingkat kemiskinan Maret 2018 mengalami penurunan <i>yoy</i> terbesar sejak Maret 2011	31
Gambar A.40: Meskipun kemiskinan menurun secara nasional, penurunannya tidak merata di semua provinsi	32
Gambar A.41: Ketimpangan terus menurun.....	33
Gambar A.42: Perkiraan pertumbuhan dalam <i>IEQ</i> untuk tahun 2018 tetap sejalan dengan perkiraan dari <i>Consensus Economics</i>	34
Gambar A.43: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih – historis dan perkiraan hingga tahun 2019	35
Gambar A.44: Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan membesar pada tahun 2018 dan 2019 karena investasi yang sarat barang impor tetap tinggi dan nilai tukar perdagangan yang melemah.....	36
Gambar A.45: Inflasi diperkirakan meningkat di Semester Ke-2, sebesar rata-rata 3,4 persen untuk tahun 2018.....	36
Gambar B.1: Negara-negara dengan pangsa jumlah penduduk perkotaan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi.....	41
Gambar B.2: ...dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah	41
Gambar B.3: Indonesia belum mendapat manfaat ekonomi dari tingkat urbanisasi yang ada sebesar yang didapat oleh Tiongkok dan Vietnam... ..	43
Gambar B.4: ...maupun penurunan tingkat kemiskinan sebesar yang didapat di negara-negara tersebut, mengingat tingkat urbanisasi yang ada di Indonesia	43
Gambar B.5: Tolok ukur (benchmarking) laju urbanisasi Indonesia terhadap pengalaman global, 1950-2015	44
Gambar B.6: Migrasi kurang berperan dalam mendorong urbanisasi di Indonesia, dibandingkan dengan Tiongkok dan India	45
Gambar B.7: Urbanisasi di Indonesia berada pada tahap peralihan.....	45
Gambar B.8: Sementara urbanisasi secara keseluruhan di Indonesia dan di Jawa-Bali berada pada tahap peralihan, untuk bagian lain negara ini masih berada pada tahap awal	45
Gambar B.9: Tingkat kemiskinan dan kerentanan menurun paling cepat di pinggiran kawasan metro	48
Gambar B.10: ... sementara pangsa pangsa penduduk kelas menengah yang terbesar berada di kawasan metropolitan.....	48
Gambar B.11: Daerah perkotaan cenderung menawarkan lebih banyak kesempatan untuk pekerjaan formal.....	49
Gambar B.12: ... dan sebagian besar penduduk Indonesia di daerah perkotaan bekerja di luar sektor primer	49
Gambar B.13: Premi pendapatan di kawasan metro relatif tinggi dibandingkan dengan kawasan non-metro	50
Gambar B.14: Kesenjangan konsumsi antara DKI Jakarta dan pinggiran kota menurun	51
Gambar B.15: Meskipun terjadi konvergensi, kesenjangan yang signifikan tetap ada antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam akses terhadap layanan dasar	52
Gambar B.16: Pangsa ketimpangan lebih tinggi di dalam wilayah dan di dalam distrik dibandingkan dengan di antara berbagai tempat dan distrik – dan pangsa tersebut meningkat dari waktu ke waktu, 2001 dan 2017.....	53
Gambar B.17: Ketimpangan meningkat di mana-mana, tetapi koefisien Gini naik paling tinggi di kota-kota pinggiran	54
Gambar B.18: Metro multi-distrik adalah daerah dengan ketimpangan paling tinggi.....	54
Gambar B.19: Rata-rata tahun bersekolah dan jumlah penduduk juga berkorelasi positif di seluruh Indonesia	55
Gambar B.20: Perbedaan dalam pencapaian pendidikan adalah pendorong ketimpangan terkuat di berbagai wilayah.....	55
Gambar B.21: Kesenjangan dalam skor matematika antara bagian atas dan bawah 20 persen semakin melebar di kota-kota.....	55
Gambar B.22: Rasio harga (rumah) terhadap pendapatan di Jakarta adalah tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang lebih maju... ..	57
Gambar B.23: ... berkontribusi pada kepadatan yang berlebihan di daerah metro inti dan metro distrik tunggal	57
Gambar B.24: Seperlima penduduk kota tinggal di permukiman kumuh... ..	58
Gambar B.25: ... sebagian besar di pinggiran kota dan daerah perkotaan non-metropolitan	58
Gambar B.26: Biaya perumahan yang tinggi di daerah metro multi-distrik dan daerah pemekaran kota berkontribusi pada perjalanan yang lama dan panjang di wilayah metro Jakarta dan daerah-daerah metro distrik tunggal.....	58
Gambar B.27: Kota-kota di Indonesia adalah yang paling macet di kawasan.....	59

Gambar B.28: Dibutuhkan lebih banyak waktu untuk menempuh jarak yang sama di Indonesia daripada di negara-negara Asia Timur lainnya..... 59

LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil	71
Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB konsumsi	71
Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi.....	71
Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor	71
Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen.....	71
Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI.....	71
Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran	72
Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan	72
Lampiran Gambar 9: Ekspor barang	72
Lampiran Gambar 10: Impor barang	72
Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus modal.....	72
Lampiran Gambar 12: Inflasi	72
Lampiran Gambar 13: Rincian IHK bulanan	73
Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara	73
Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional.....	73
Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran	73
Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional	73
Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS.....	73
Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal	74
Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS terhadap kelompok negara-negara EMBI Global.....	74
Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito.....	74
Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan	74
Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah	74
Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri	74

TABEL

Table ES.1: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2018 dengan permintaan dalam negeri yang lebih tinggi	2
Tabel A.1: Neraca Pembayaran Indonesia	14
Tabel A.2: Turunnya ketimpangan di tingkat nasional didorong oleh peningkatan dalam pangsa konsumsi di 40 persen bagian bawah dan 40 persen bagian tengah	33
Tabel A.3: Indikator perekonomian utama	34
Tabel A.4: Bank Dunia memproyeksikan pendapatan dan belanja yang lebih rendah daripada dalam APBN tahun 2018	37
Tabel A.5: Perbandingan indikator makroekonomi terpilih, Indonesia di masa lalu dan saat ini.....	39

LAMPIRAN TABEL

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah	75
Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran.....	75
Lampiran Tabel 3: Indikator ekonomi makro Indonesia	76
Lampiran Tabel 4: Indikator pembangunan Indonesia	77

KOTAK

Kotak A.1: Kondisi ekonomi global yang kondusif: apakah sudah menghilang?	8
Kotak A.2: Harga Komoditas di Tingkat Global untuk Komoditas Ekspor Utama Indonesia Bergerak ke Arah Berbeda	11
Kotak A.3: Ekspor batubara pada tahun 2018 belum meningkat seiring dengan peningkatan produksi	12
Kotak A.4: Bagaimana dampak perang dagang terhadap Indonesia?	18
Kotak A.5: Percepatan transformasi struktural dan kebangkitan lapangan kerja manufaktur?	30
Kotak B.1: Portofolio daerah-daerah perkotaan di Indonesia, 2016.....	47
Kotak B.2: Pendekatan pragmatik yang luas untuk urbanisasi di Indonesia	64

Ringkasan Eksekutif

PDB riil bertumbuh sebesar 5,3 persen pada triwulan kedua tahun 2018 dari tahun sebelumnya, karena permintaan dalam negeri menguat. Konsumsi swasta dan pemerintah tumbuh lebih cepat berkat adanya subsidi dan belanja pegawai yang lebih tinggi, peningkatan dalam pertumbuhan kredit, pendapatan di sektor pertanian yang lebih tinggi, dan inflasi yang stabil. Pasar tenaga kerja yang kuat juga membantu: tingkat tenaga kerja mencapai titik tertinggi selama dua dekade, sebesar 65,7 persen pada Februari, dengan tingkat pengangguran menurun ke 5,1 persen. Pertumbuhan investasi mesin dan peralatan tetap tinggi, tetapi secara keseluruhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) melambat karena investasi di sektor gedung dan bangunan (tiga perempat dari PMTB) melambat, sebagian disebabkan oleh karena hari kerja yang lebih sedikit. Meskipun tingkat proteksionisme pada perdagangan global meningkat, baik ekspor maupun impor bertumbuh selama triwulan tersebut. Karena volume impor bertumbuh hampir dua kali lebih cepat dibandingkan dengan ekspor, ekspor neto mengalami kontraksi, yang secara keseluruhan membebani pertumbuhan ekonomi.

Tingkat kemiskinan resmi, berdasarkan garis kemiskinan nasional, mencapai 9,8 persen pada bulan Maret 2018, turun dari 10,6 persen pada bulan Maret 2017. Penurunan itu sebagian karena adanya perluasan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang membantu menurunkan kemiskinan kronis dan menurunkan kerentanan, dan sebagian karena kondisi pasar tenaga kerja yang melambung.

Naiknya harga minyak mentah dan berlanjutnya pertumbuhan investasi peralatan menyebabkan nilai nominal impor tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan ekspor, dan mengurangi surplus perdagangan barang. Hal ini berkontribusi pada pelebaran defisit transaksi berjalan menjadi 2,3 persen dari PDB di empat triwulan sampai Triwulan ke-2 - pelebaran sebesar 1 poin persentase per PDB selama setahun terakhir ini. Investasi langsung bersih (investasi langsung di Indonesia dikurangi investasi Indonesia di luar negeri) berkurang menjadi 1,7 persen dari PDB di empat triwulan sampai Triwulan ke-2, dan belum cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan sejak Triwulan ke-1 tahun 2018.

Ketidakpastian global yang meningkat karena ‘perang dagang’ dan ketakutan terhadap dampak gejolak di negara-negara pasar berkembang lainnya di tengah normalisasi kondisi moneter AS yang sedang berlangsung, telah menyebabkan arus keluar portofolio dari negara-negara pasar berkembang, termasuk Indonesia. Bersama dengan defisit transaksi berjalan, arus keluar portofolio memberi tekanan terhadap harga aset Indonesia, dan imbal hasil obligasi 10 tahun Indonesia naik sebesar 121 basis poin di Triwulan ke-2, mencapai 8,2 persen. Rupiah terdepresiasi sebesar 4,8 persen terhadap Dolar AS di Triwulan ke-2 dengan tambahan sebesar 2,7 persen di bulan Juli dan Agustus. Depresiasi Rupiah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan lira Turki atau peso Argentina, dan depresiasi terhadap beberapa keranjang nilai tukar (*basket of currencies*) dari para mitra dagangnya juga lebih kecil dari depresiasi terhadap dolar AS, yang mencerminkan kekuatan dolar yang lebih luas.

Untuk merespon peningkatan gejolak pasar keuangan global, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga kebijakannya secara kumulatif sebesar 125 basis poin sejak bulan Mei untuk memberikan sinyal komitmennya terhadap stabilitas, meskipun inflasi di Triwulan ke-2 sebesar 3,3 persen, yang berada di bawah target BI.

Kebijakan fiskal telah memperkuat kebijakan moneter dalam mengisyaratkan komitmen Pemerintah terhadap stabilitas ekonomi. Meskipun tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun pemilihan umum, defisit fiskal diproyeksikan menurun di kedua tahun tersebut, yang mengurangi pasokan aset berdenominasi Rupiah. Pada tahun 2018, sebagian disebabkan oleh pertumbuhan penerimaan yang tinggi, terutama dalam 10 tahun ini, karena harga komoditas yang lebih tinggi dan dampak dari reformasi, karena peningkatan penerimaan cukai tembakau serta peningkatan kepatuhan, telah berkontribusi bagi penerimaan non-sumber daya alam yang lebih tinggi. Pertumbuhan penerimaan yang tinggi ini mengimbangi pengeluaran yang lebih tinggi, terutama pada subsidi, termasuk tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. APBN tahun 2019 mengantisipasi konsolidasi lebih lanjut berdasarkan target pendapatan dan pengeluaran yang realistis secara luas.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 5,2 persen tahun ini dan di tahun 2019 (Tabel ES.1), dan

secara bertahap meningkat hingga 5,3 persen pada tahun 2020. Permintaan dalam negeri diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek. Percepatan yang tidak terlalu besar dalam konsumsi swasta diperkirakan akan berlanjut karena inflasi yang stabil, pasar tenaga kerja yang tinggi, dan menurunnya suku bunga pinjaman. Konsumsi pemerintah juga diproyeksikan akan meningkat karena pertumbuhan penerimaan menciptakan ruang bagi konsolidasi fiskal dan pengeluaran tambahan. Pertumbuhan investasi diperkirakan akan tetap tinggi, yang pada awalnya oleh karena momentum investasi publik dan pertambangan terus berlanjut, dan kemudian dengan berkurangnya ketidakpastian politik pasca pemilihan umum.

Table ES.1: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2018 dengan permintaan dalam negeri yang lebih tinggi

		2017	2018P	2019P
PDB riil	(Persen perubahan tahunan)	5,1	5,2	5,2
Indeks Harga Konsumen	(Persen perubahan tahunan)	3,8	3,4	3,7
Neraca transaksi berjalan	(Persen PDB)	-1,7	-2,4	-2,3
Neraca anggaran Pemerintah	(Persen PDB)	-2,5	-2,1	-1,8

Sumber: BI; Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: 2017 adalah hasil aktual; p adalah perkiraan Bank Dunia

Meskipun langkah kebijakan yang menentukan dan terkoordinasi yang diambil telah secara signifikan meningkatkan ketahanan terhadap gejolak pasar keuangan, sektor keuangan Indonesia yang dangkal serta tingkat ekspor dan investasi langsung asing yang relatif rendah menyiratkan bahwa tekanan dari arus keluar modal kemungkinan akan terus berlanjut. Sementara itu, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan melebar menjadi 2,4 persen dari PDB pada tahun 2018 dan stabil pada 2,3 persen di tahun 2019, karena arus keluar pendapatan utama yang lebih rendah diimbangi oleh nilai tukar perdagangan (*terms-of-trade*, ToT) yang lebih lemah, permintaan investasi yang terus berlanjut untuk barang modal yang diimpor, dan menurunnya pertumbuhan para mitra dagang utama.

Langkah-langkah untuk memberlakukan pemotongan pajak atas impor dan menunda investasi publik tidak akan memiliki dampak yang besar pada transaksi berjalan dalam waktu dekat ini. Langkah-langkah tersebut sebenarnya mungkin memiliki akibat yang tidak diinginkan mengingat kebutuhan Indonesia untuk

memperluas ekspor, yang mensyaratkan pemberian fasilitas impor, dan kesenjangan infrastrukturnya yang besar.

Dengan komitmen yang ditunjukkan oleh otoritas fiskal dan moneter terhadap stabilitas ekonomi, tekanan berkelanjutan dari gejolak global kemungkinan akan menimbulkan pengetatan tambahan terhadap kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, risiko penurunan pertumbuhan ekonomi telah meningkat. Walaupun nilai mata uang yang lebih rendah akan membantu menahan defisit transaksi berjalan dan merangsang pertumbuhan ekspor, menurunnya nilai mata uang tersebut juga dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan inflasi, yang mengakibatkan pertumbuhan konsumsi yang lebih lambat. Imbal hasil obligasi yang lebih tinggi akan menyebabkan pembiayaan yang lebih mahal bagi korporasi, yang dapat mengurangi pemulihan kredit dan investasi swasta yang sedang merebak. Peningkatan proteksionisme juga menimbulkan risiko yang tinggi bagi Indonesia melalui pertumbuhan ekspor yang melambat atau melalui efek perluasan (*spillover*) yang negatif dari pertumbuhan regional yang lebih lambat – sebagian melalui harga komoditas yang lebih lemah.

Sementara risiko pertumbuhan ekonomi yang melambat tetap ada, risiko yang terkait dengan krisis keuangan bagi Indonesia tetap kecil karena adanya koordinasi kebijakan yang baik dan fundamental yang kuat. Setelah menurun dari rekor tertingginya di awal tahun, cadangan devisa tetap sehat, sebesar nilai impor selama 8 bulan. Meskipun ada intervensi untuk meminimalkan gejolak, Bank Indonesia telah menjaga cadangan devisa dengan membiarkan depresiasi berjalan sesuai dengan nilai di pasar dibandingkan dengan mempertahankan nilai tukar yang tetap. Kebijakan moneter juga telah diperketat untuk menjaga perbedaan suku bunga dengan Amerika Serikat. Demikian pula kebijakan fiskal telah secara konsisten dilakukan secara berhati-hati: defisit tetap rendah dan utang pemerintah kurang dari setengah ambang batas legal sebesar 60 persen dari PDB, di mana 58 persennya dalam mata uang lokal. Pada saat yang sama, sektor perbankan dan keuangan tetap sehat; pertumbuhan kredit meningkat tetapi tidak meningkat tanpa kendali, dan struktur permodalan bank yang sehat dengan tingkat kredit macet yang rendah. Yang paling penting adalah, otoritas fiskal dan moneter, serta eksekutif, telah memberikan sinyal yang konsisten dan kuat bahwa mereka memprioritaskan stabilitas dan akan terus bertindak sesuai dengan komitmen tersebut.

Edisi ini juga menyajikan tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan urbanisasi untuk menghasilkan kemakmuran dan inklusi (penyertaan) yang lebih besar di dalam negeri.

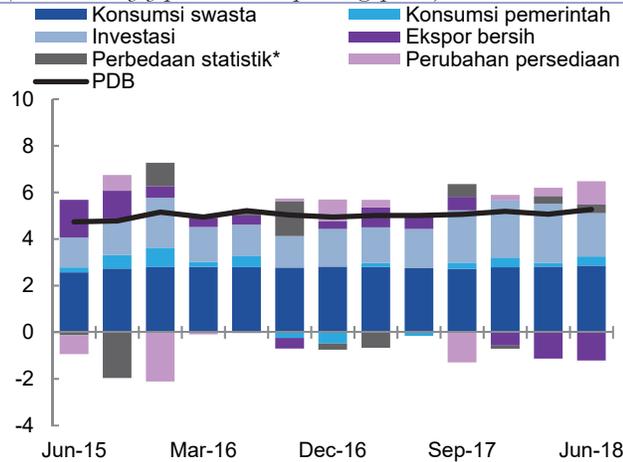
Urbanisasi dapat menjadi kekuatan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, biaya kemacetan yang terkait dapat merusak potensi manfaatnya dan mengakibatkan segregasi, isolasi dan ketimpangan yang lebih besar. Indonesia terus melakukan urbanisasi dengan kecepatan yang stabil, sebagian besar disebabkan oleh konversi daerah-daerah yang sebelumnya merupakan pedesaan menjadi permukiman perkotaan. Walaupun peluang ekonomi yang lebih baik di perkotaan telah membantu banyak masyarakat Indonesia untuk keluar dari kemiskinan dan bergabung dengan kelas menengah, urbanisasi di Indonesia pada umumnya tidak dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Timur. Ketimpangan di berbagai daerah telah meningkat, sebagian besar didorong oleh disparitas sumber daya manusia dan kurangnya integrasi spasial di

perkotaan. Daerah perkotaan menghadapi biaya kemacetan yang tinggi dan meningkat, sebagaimana dibuktikan oleh permintaan yang belum terpenuhi untuk perumahan yang terjangkau yang mengakibatkan bertumbuhnya daerah-daerah kumuh, dan tingginya tingkat kemacetan lalu lintas dan polusi.

Untuk memastikan agar urbanisasi dapat berfungsi dengan baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memberlakukan kebijakan yang mencapai tiga tujuan: (i) **penyatuan dan perluasan** realisasi pemberian layanan dasar untuk memastikan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati pendidikan berkualitas, kesehatan, layanan air bersih dan sanitasi, sehingga mengurangi kesenjangan kesempatan; (ii) **penghubungan dan pengintegrasian** di dalam dan di antara berbagai daerah; (iii) **penyesuaian dan penargetan** masyarakat dan daerah-daerah yang mungkin akan tertinggal, seperti mereka yang cacat atau kelompok lain yang cenderung dirugikan, serta di daerah tertinggal di negara ini.

Gambar ES.1: Konsumsi yang lebih tinggi mengimbangi pertumbuhan investasi yang lebih lemah dan ekspor bersih yang lebih rendah

(kontribusi to yoy pertumbuhan, persentase points)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar ES.2: Selisih antara imbal hasil obligasi Indonesia dengan imbal hasil obligasi AS telah melebar secara signifikan

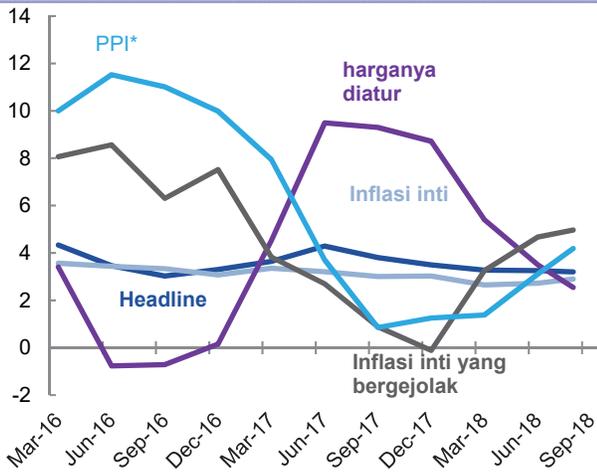
(persen)



Sumber: CEIC, perhitungan staf Bank Dunia

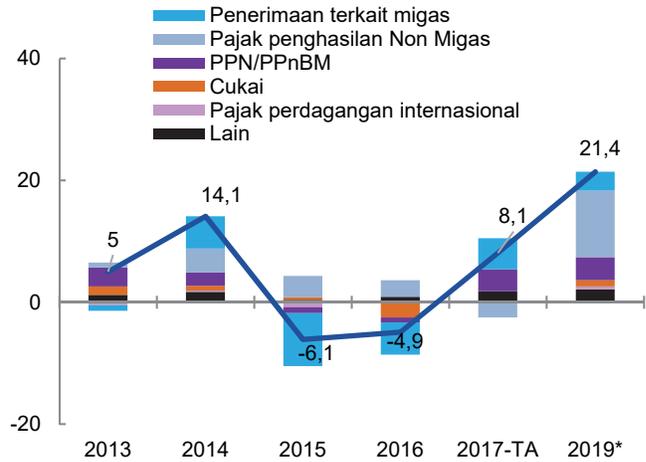
Catatan: EMBI+ adalah indeks Obligasi Negara Pasar Berkembang sampai dengan jatuh tempo dari JP Morgan

Gambar ES.3: Inflasi IHK tetap rendah di Triwulan ke-2
(perubahan yoy, persen)



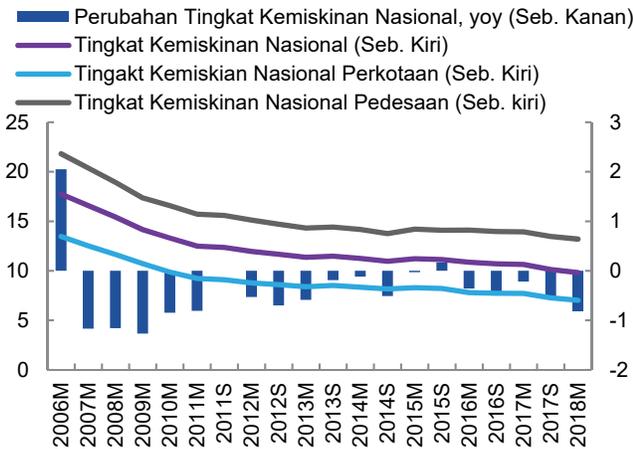
Sumber: BPS; perhitunga staf Bank Dunia
Catatan: Harga makanan adalah rata-rata tertimbang dari komponen harga bahan makanan dan makanan olahan dari IHK

Gambar ES.4: Total penerimaan tumbuh dengan laju yang tercepat dalam sepuluh tahun, didorong oleh pajak penghasilan dan PPN non-Migas
(kontribusi bagi pertumbuhan, Januari – Juni yoy, poin persentase)



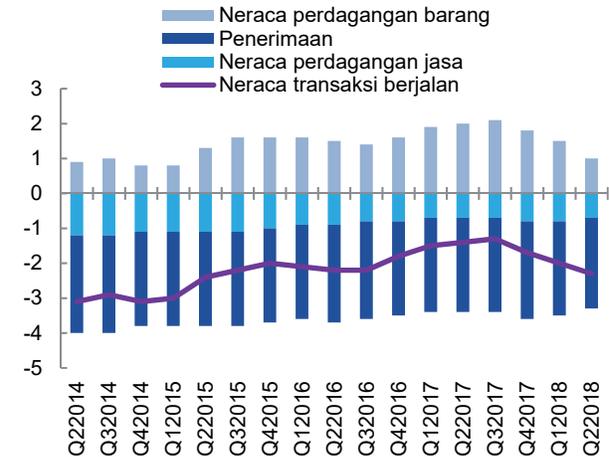
Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Lihat Gambar A.30

Gambar ES.5: Tingkat kemiskinan bulan Maret 2018 mengalami penurunan yoy yang terbesar sejak bulan Maret 2011
(tingkat kemiskinan, persen, Seb. Kiri; perubahan tingkat kemiskinan, poin persentase, Seb. Kanan)



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas. M dan S adalah putaran survey bulan Maret dan September

Gambar ES.6: Surplus perdagangan barang menurun, menyebabkan memburuknya neraca transaksi berjalan
(jumlah empat triwulan secara bergulir, persen dari PDB)



Sumber: BI, perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Poin data menunjukkan jumlah dari empat triwulan terakhir, dibagi dengan PDB untuk empat triwulan terakhir.

A. Perkembangan perekonomian dan fiskal terkini



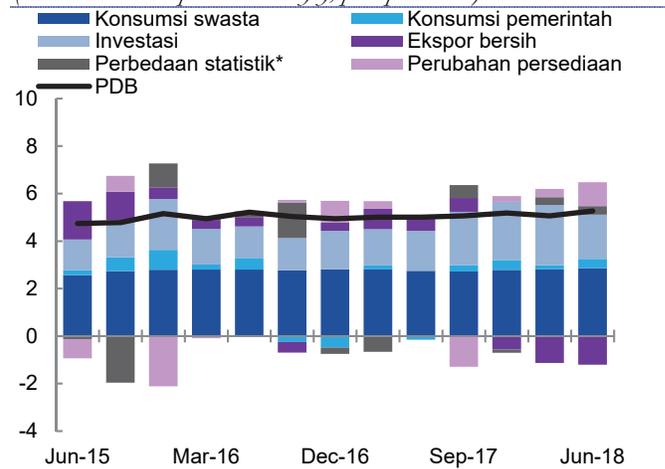
1. Pertumbuhan meningkat didukung oleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi, mengimbangi investasi yang lebih lemah dan ekspor neto yang lebih rendah

Pertumbuhan meningkat hingga 5,3 persen, laju pertumbuhan yang tercepat dalam lebih dari empat tahun ini

Meskipun ketidakpastian global meningkat, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,3 persen yoy di Triwulan ke-2, naik dari 5,1 persen di Triwulan ke-1 dan juga di atas proyeksi *consensus* (*consensus forecast*) sebesar 5,1 persen. Berdasarkan pertumbuhan tahunan yang disesuaikan secara musiman (*seasonally adjusted annual rate, saar*), pertumbuhan menguat menjadi 5,5 persen dari 5,1 persen pada triwulan sebelumnya¹. Peningkatan dalam pertumbuhan PDB didorong oleh pertumbuhan permintaan dalam negeri yang lebih tinggi, lebih tinggi dari tingkat penurunan ekspor neto. Pertumbuhan konsumsi swasta dan pemerintah meningkat, dan perubahan dalam

Gambar A.1: Tingkat konsumsi yang lebih kuat mengimbangi pertumbuhan investasi yang lebih lemah dan ekspor neto yang lebih rendah

(kontribusi untuk pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

¹ Tingkat pertumbuhan triwulan-ke-triwulan, disesuaikan secara musiman dan secara rata-rata tahunan. Perkiraan staf Bank Dunia dengan menggunakan penyesuaian musiman X12.

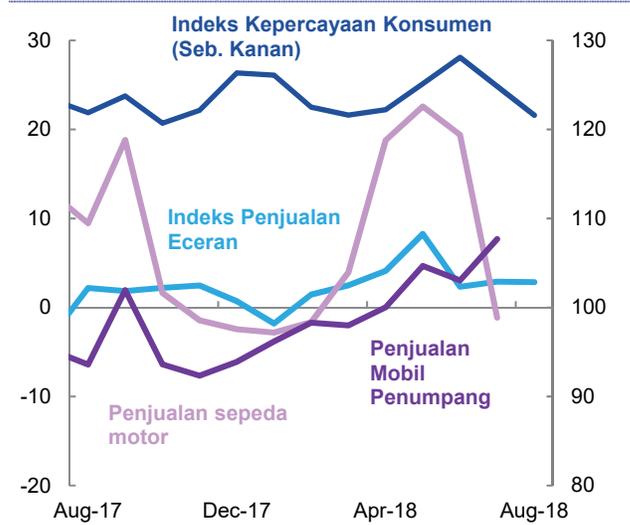
terhadap pertumbuhan PDB karena perusahaan terus melakukan penambahan persediaan (*restock*) (Gambar A.1)². Investasi di sektor konstruksi menurun yang menyebabkan perlambatan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor neto terus menjadi hambatan bagi pertumbuhan karena impor tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan ekspor. Di sisi penawaran, sektor yang terkait dengan komoditas (sektor pertanian serta pertambangan dan galian) serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi tambahan terbesar terhadap pertumbuhan, sementara pertumbuhan di sektor konstruksi melemah, sejalan dengan pertumbuhan investasi yang lebih lambat.

Pertumbuhan konsumsi swasta meningkat menjadi 5,2 persen

Didukung oleh tingkat inflasi yang relatif menurun, hari raya lebaran, tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah dan tingkat pendapatan di sektor pertanian yang lebih tinggi, pertumbuhan konsumsi swasta meningkat menjadi 5,2 persen yoy di Triwulan ke-2 dari 5,0 persen di Triwulan ke-1. Yang mendasari peningkatan konsumsi swasta ini, yang menyumbang lebih dari separuh PDB, adalah pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman, serta transportasi dan komunikasi³. Konsumsi restoran dan hotel terus bertumbuh, pertumbuhan yang tercepat sebesar 5,7 persen di Triwulan ke-2.

Sejalan dengan pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi, indikator yang memiliki frekuensi tinggi untuk konsumsi, seperti penjualan sepeda motor, penjualan mobil penumpang, penjualan ritel, dan pertumbuhan kredit konsumsi, semuanya menguat pada Triwulan ke-2 (Gambar A.2). Penjualan sepeda motor bertumbuh sebesar 19,9 persen yoy di Triwulan ke-2, melonjak dari pertumbuhan sebesar 4,2 persen di Triwulan ke-1, sebagian besar karena adanya efek dasar (*base effect*, pengaruh perubahan harga konsumen dari bulan yang sama tahun sebelumnya pada perubahan dalam inflasi tahunan pada bulan yang sama tahun ini – pent.) dari kontraksi pada saat yang sama di tahun lalu. Pertumbuhan penjualan ritel juga terus meningkat, mencapai 4,9 persen di Triwulan ke-2, dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 0,7 persen di Triwulan ke-1, mencerminkan adanya penguatan yang meluas, tetapi terjadi peningkatan yang sangat tinggi dalam penjualan makanan dan minuman, serta transportasi dan komunikasi. Indikator-indikator yang memiliki frekuensi tinggi ini sedikit menurun di bulan Juli dan Agustus, kecuali untuk pertumbuhan penjualan sepeda motor yang menurun tajam. Pendapatan di sektor pertanian yang lebih tinggi, Tunjangan Hari Raya bagi pegawai negeri, dan pembayaran bantuan sosial tunai juga berkontribusi pada peningkatan dalam pertumbuhan konsumsi.

Gambar A.2: Sektor-sektor yang terkait dengan komoditas dan ritel bertumbuh lebih cepat
(yoy, persen/ 3mma yoy, persen, Seb. Kiri; indeks kepercayaan konsumen; Seb. Kanan)



Sumber: BI, BPS; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Indeks penjualan ritel dalam persentase yoy; persen penjualan kendaraan dalam jangka waktu rata-rata pergerakan selama 3 bulan (month moving average, mma) yoy.

² Setelah terjadinya penurunan yang tinggi, sebesar 1,3 poin persentase dari pertumbuhan PDB pada Triwulan ke-3 2017, akumulasi persediaan telah meningkat sejak Triwulan ke-4 tahun 2017.

³ Konsumsi makanan dan minuman, serta transportasi dan komunikasi adalah kontributor terbesar untuk pertumbuhan konsumsi, masing-masing sebesar 1,9 pp dan 1,3 pp.

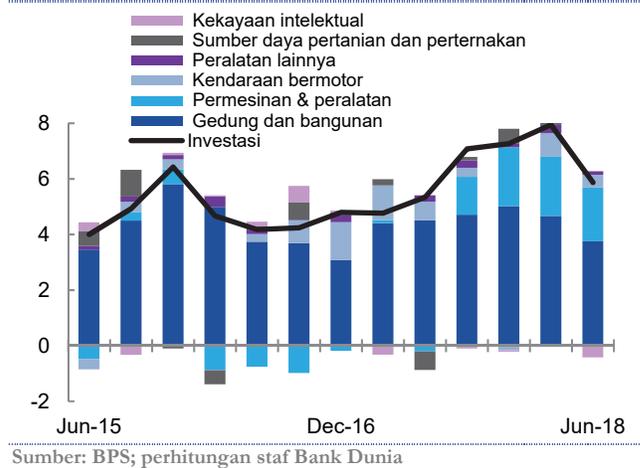
Pertumbuhan konsumsi pemerintah hampir dua kali lipat menjadi 5,3 persen dari 2,7 persen di Triwulan ke-1

Pertumbuhan konsumsi riil pemerintah melonjak menjadi 5,3 persen *yoy* dari 2,7 persen di Triwulan ke-1, sebagian karena rendahnya efek dasar di triwulan yang sama tahun lalu. Selain itu, konsumsi pemerintah meningkat karena adanya pertumbuhan yang kuat dalam nominal belanja pegawai nominal, yang pada gilirannya meningkat karena adanya pencairan tunjangan hari raya untuk pegawai negeri⁴.

Investasi di sektor bangunan dan gedung melemah, sementara investasi di sektor permesinan dan peralatan tetap tinggi

Secara keseluruhan, pertumbuhan investasi melambat menjadi 5,9 persen di Triwulan ke-2 dari 7,9 persen di Triwulan ke-1 (Gambar A.3). Hal ini sebagian disebabkan oleh perlambatan investasi publik, karena belanja modal nominal pemerintah berkontraksi sebesar 13,0 persen di Triwulan ke-2, sebagian karena adanya efek dasar dari pengeluaran infrastruktur besar di Triwulan ke-2 tahun lalu. Selain itu, periode perayaan Hari Raya sepenuhnya jatuh di Triwulan ke-2 tahun ini, mengakibatkan hari kerja yang lebih sedikit, mempengaruhi kegiatan investasi selama triwulan ini⁵.

Gambar A.3: Pertumbuhan investasi di sektor gedung dan bangunan melemah, tetapi pertumbuhan investasi permesinan dan peralatan sangat tinggi
(kontribusi terhadap pertumbuhan *yoy*, poin persentase)



Pertumbuhan investasi di sektor bangunan dan gedung, yang mewakili tiga perempat dari PMTB, melemah menjadi 5,0 persen dari 6,2 persen di Triwulan ke-1, dengan kontribusinya yang menyusut dari 4,7 pp di Triwulan ke-1 menjadi 3,8 pp di di Triwulan ke-2. Sementara itu, pertumbuhan investasi di sektor kendaraan bermotor melambat menjadi 8,0 persen, sejalan dengan pertumbuhan penjualan kendaraan niaga yang sedikit menurun. Namun demikian, pertumbuhan investasi di permesinan dan peralatan tetap kuat dengan pertumbuhan sebanyak dua digit sebesar 22,5 persen.

Ekspor bersih terus menjadi penghambat bagi pertumbuhan

Baik ekspor maupun impor tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan di Triwulan ke-1, meskipun terjadi peningkatan gejolak global (Kotak A.1). Impor masih meningkat lebih cepat dibandingkan dengan ekspor, yang menyebabkan hambatan terhadap pertumbuhan ekspor bersih. Pertumbuhan ekspor meningkat menjadi 7,7 persen di Triwulan ke-2, sementara pertumbuhan impor naik menjadi 15,2 persen. Sejalan dengan meningkatnya harga minyak dan gas, percepatan pertumbuhan ekspor sebagian disebabkan oleh pertumbuhan volume ekspor minyak dan gas yang lebih besar, yang pulih ke tingkat 5,9 persen setelah terjadinya kontraksi sebesar 6,9 persen di Triwulan ke-1. Pertumbuhan impor yang lebih tinggi ini juga didorong oleh peningkatan yang tinggi pada impor minyak dan gas sebesar 7,1 persen dari kontraksi sebesar 15,0 persen di Triwulan ke-1.

⁴ CNN (2018).

⁵ Meskipun jumlah hari libur resmi di Triwulan ke-2 tahun 2018 dan Triwulan ke-2 tahun 2017 kurang lebih sama, banyak pekerja mengambil cuti selama dua minggu setelah Lebaran. Di tahun 2017, setengah dari periode cuti ini terjadi di Triwulan ke-3, tetapi di tahun 2018 periode cuti ini terjadi sepenuhnya di Triwulan ke-2.

Kotak A.1: Kondisi ekonomi global yang kondusif: apakah sudah menghilang?

Peningkatan perekonomian global tampaknya terhenti di paruh pertama tahun 2018. Pertumbuhan di negara-negara maju utama melemah dan pertumbuhan perdagangan global sedikit melemah, sebagian karena meningkatnya proteksionisme. Sejalan dengan melemahnya perdagangan global, produksi global juga melambat, dan kepercayaan dunia usaha memburuk. Kondisi moneter global diperketat karena terjadinya normalisasi kebijakan moneter secara bertahap baik di negara-negara maju maupun negara-negara pasar berkembang. Harga komoditas global terus meningkat, yang menguntungkan negara-negara pengekspor komoditas. Namun, ada risiko yang dapat semakin mengurangi tingkat perdagangan global jika perang perdagangan meningkat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan global serta perkiraan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui sektor eksternal.

Pada Triwulan ke-2 tahun 2018, pertumbuhan di Kawasan Eropa (*Euro zone*) menurun menjadi 2,1 persen tahun-ke-tahun (*yoY*)¹ dari 2,5 persen pada Triwulan ke-1, tingkat yang terendah dalam dua tahun, sebagian karena adanya efek dasar dari pertumbuhan yang tinggi tahun lalu. Pertumbuhan Tiongkok menurun menjadi 6,7 persen dari 6,8 persen pada Triwulan ke-1, karena konsumsi dan investasi yang menurun menyusul pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan karena Pemerintah berusaha untuk membatasi hutangnya yang meningkat². Jepang mencatat pertumbuhan sebesar 1,1 persen pada Triwulan ke-2, tidak berubah dari Triwulan ke-1, tetapi secara signifikan lebih rendah dari 1,9 persen pada Triwulan ke-4 2017. Sebaliknya, perekonomian Amerika Serikat terus menguat, mencatat pertumbuhan tertinggi dalam empat tahun sebesar 2,8 persen pada Triwulan ke-2³, didukung oleh lonjakan konsumsi dan ekspor.

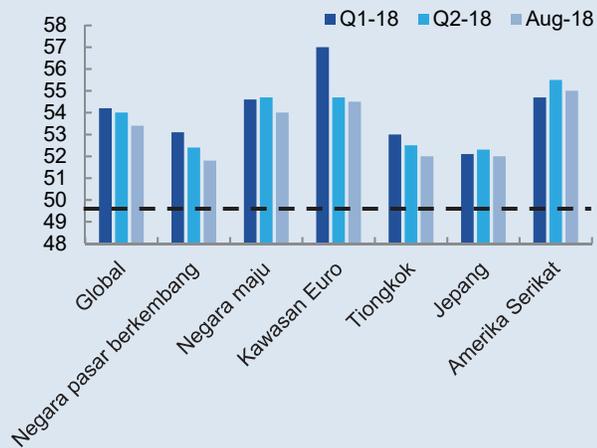
Indikator global yang memiliki frekuensi tinggi juga melemah. Momentum perdagangan global mulai menghilang dan pertumbuhan global melambat menjadi 4,1 persen *yoY* di Triwulan ke-2⁴, dari 4,4 persen pada Q1 (Gambar A.4), mengikuti kenaikan tarif Amerika Serikat sebesar sekitar 34 miliar dolar AS dari ekspor Tiongkok dan pada baja dan aluminium bagi Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko. Pertumbuhan produksi industri global juga sedikit melambat dari Triwulan ke-1⁵, sejalan dengan menurunnya indeks komposit global PMI menjadi 54,0 di Triwulan ke-2 dari 54,2 di Triwulan ke-1 (Gambar A.5). PMI melambat lebih lanjut menjadi 53,4 di bulan Agustus 2018, melambat terutama di Kawasan Euro dan Tiongkok, karena perlambatan ekspor mempengaruhi sektor-sektor lainnya, yang menyebabkan belanja konsumen yang lebih lemah dan pertumbuhan investasi bisnis yang lebih rendah⁶.

Gambar A.4: Produksi industri global sedikit melambat dari Triwulan ke-1
(*pertumbuhan yoY, persen*)



Sumber: CPB *World Trade Monitor*, Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.5: Indeks Manajer Pembelian Komposit Global menurun secara signifikan
(*indeks*)



Sumber: *Markit Economics, Haver Analytics*, Perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Pembacaan di atas 50 mewakili ekspansi dan pembacaan di bawah 50, kontraksi.

Normalisasi kebijakan moneter berlanjut di beberapa negara maju dan juga negara-negara pasar berkembang. Bank Sentral AS meningkatkan suku bunga kebijakan pada bulan Maret dan Juni, dengan dua kali kenaikan lagi yang diperkirakan terjadi pada bulan September dan Desember. Demikian pula, Bank Sentral Eropa menunda pelaksanaan kebijakan pelonggaran kuantitatifnya, sementara di kawasan Asia, India, Malaysia, dan Filipina menaikkan suku bunga mereka untuk mendukung melemahnya mata uang. Sejak terjadinya koreksi pasar saham AS pada bulan Februari, gejala di pasar keuangan global terus berlanjut sepanjang paruh pertama tahun 2018, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa lonjakan dalam indeks VIX dan MOVE⁷ (Gambar A.6) khususnya selama dilakukannya pengumuman kenaikan tarif.

Sementara itu, harga komoditas internasional terus meningkat dan mendukung pertumbuhan negara-negara pengekspor komoditas. Indeks harga energi dan non-energi Bank Dunia mencapai tingkat yang tertinggi dalam hampir empat tahun ini, melonjak 40,1 persen *yoy* dan 8,4 persen masing-masing di Triwulan ke-2, lebih tinggi dari 21,3 persen dan 3,4 persen di Triwulan ke-1. Kenaikan harga energi sebagian besar didorong oleh meningkatnya harga minyak mentah oleh karena adanya permintaan yang tinggi dan gangguan pasokan di beberapa negara penghasil minyak, serta dari harga batu bara yang meningkat karena terjadinya lonjakan permintaan, terutama di Tiongkok. Harga non-energi naik, terutama logam dasar, karena harga nikel melonjak disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari industri listrik dan sanksi perdagangan yang dikenakan oleh Amerika Serikat pada Rusia⁸.

¹ PDB triwulanan OECD (2018).

² Bloomberg (2018).

³ PDB triwulanan OECD (2018).

⁴ CPB (2018).

⁵ Mencatat pertumbuhan sebesar 3,6 persen *yoy* di Triwulan ke-2 dari 3,9 persen di Triwulan ke-1.

⁶ IHS Markit (2018).

⁷ Indeks VIX mengukur gejolak di pasar ekuitas, sementara indeks MOVE mengukur gejolak di pasar obligasi.

⁸ Reuters (2018).

**Gambar A.6: Gejolak pasar keuangan global
berlanjut ke Triwulan ke-2**

(pertumbuhan *yoy*, persen)



Sumber: Bloomberg; Perhitungan staf Bank Dunia

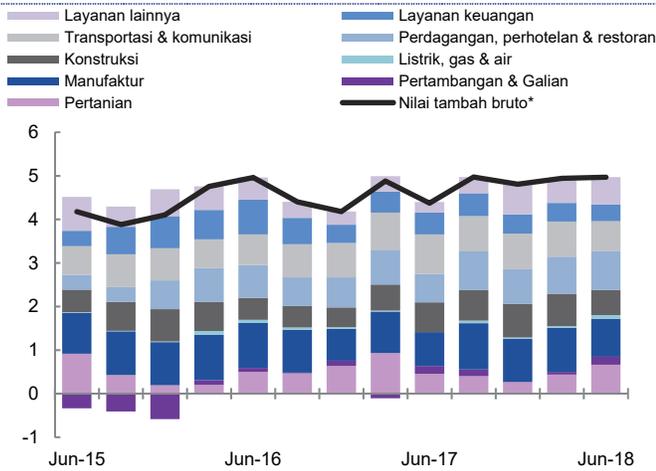
Di sisi penawaran, sektor-sektor yang terkait dengan komoditas dan sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran memberikan peningkatan terbesar dalam kontribusi terhadap pertumbuhan

Di sisi penawaran, sektor-sektor yang terkait dengan komoditas (sektor pertanian serta pertambangan dan galian) dan perdagangan, perhotelan dan restoran mencatat kenaikan terbesar dalam kontribusi mereka terhadap pertumbuhan di Triwulan ke-2. Sektor pertanian mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 4,8 persen *yoy*, sebagian disebabkan oleh periode panen yang lebih lama yang didukung oleh kondisi cuaca yang menguntungkan⁶. Sektor pertambangan dan galian juga terus meningkat, bertumbuh sebesar 2,2 persen di Triwulan ke-2 dari 0,7 persen di Triwulan ke-1, karena investasi baru-baru ini memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mengambil keuntungan dari harga global yang lebih tinggi. Sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran juga tumbuh lebih cepat, dengan pertumbuhan mencapai 5,3 persen, seiring dengan peningkatan konsumsi swasta. Sementara itu, pertumbuhan sektor konstruksi, terutama di bangunan dan gedung, melambat menjadi 5,7 persen di Triwulan ke-2 dari 7,4 persen di Triwulan ke-1, yang mencerminkan kegiatan investasi yang melemah.

Pertumbuhan di sektor manufaktur juga melemah di Triwulan ke-2 hingga 4,0 persen *yoy* dari 4,6 persen di Triwulan ke-1 (Gambar A.7). Sektor manufaktur menyumbang 0,8 poin persentase bagi pertumbuhan secara keseluruhan di Triwulan ke-2, lebih rendah dibandingkan dengan 1,0 poin persentase di Triwulan ke-1. Hal ini sejalan dengan melemahnya beberapa indikator produksi yang memiliki frekuensi tinggi, terutama yang mewakili sektor manufaktur (Gambar A.8). Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Nikkei / Markit (PMI) tetap berada di wilayah ekspansi sejak Februari 2018, dan mencapai rata-rata 51,2 di Triwulan ke-2, yang tertinggi sejak Triwulan ke-2 tahun 2014. Namun demikian, produksi kendaraan bermotor sedikit menurun menjadi rata-rata 3,2 persen *yoy* di Triwulan ke-2 dari 4,9 persen di Triwulan ke-1, yang konsisten dengan menurunnya pertumbuhan investasi di sektor kendaraan bermotor. Produksi industri juga mengalami peningkatan yang lebih kecil di Triwulan ke-2, dengan pertumbuhan yang melambat ke tingkat yang terendah selama sembilan triwulan sebesar 4,4 persen. Namun demikian, arah dari indikator ini berbalik pada bulan Juli dan Agustus, menandakan bahwa pertumbuhan di sektor manufaktur kemungkinan akan pulih kembali di triwulan berikutnya.

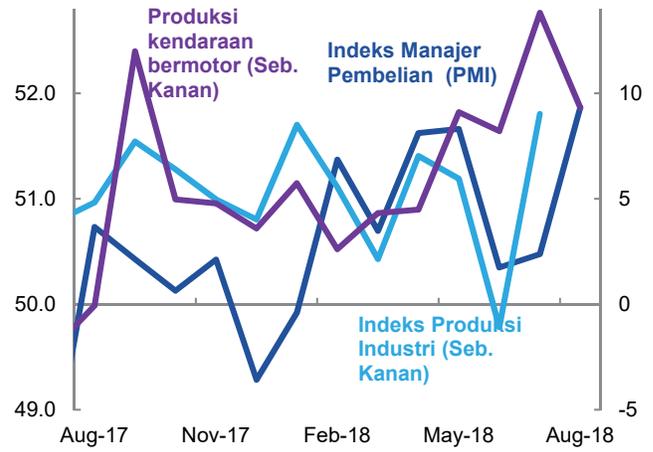
⁶ BPS (2018).

Gambar A.7: Sektor-sektor yang terkait dengan komoditas dan perdagangan ritel bertumbuh lebih cepat
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: * Nilai Tambah Bruto diperoleh sebagai penjumlahan dari nilai tambah di sektor pertanian, industri dan jasa. Jika nilai tambah dari sektor-sektor tersebut dihitung pada nilai pembeli, nilai tambah bruto pada biaya faktor diperoleh dengan mengurangkan pajak tidak langsung bersih dari PDB.

Gambar A.8: Pertumbuhan produksi sektor industri menurun dan indeks PMI manufaktur bertahan di wilayah ekspansi selama 6 bulan berturut-turut
(indeks, Seb kiri; pertumbuhan yoy/3mma yoy, persen, Seb kanan)



Sumber: BPS; Nikkei/Markit; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Pertumbuhan IPI dalam yoy; pertumbuhan produksi kendaraan bermotor dalam pergerakan selama 3 bulan (mma) yoy. Indeks PMI manufaktur di atas 50 poin menunjukkan wilayah ekspansi.

2. Ekspor komoditas utama Indonesia mencatat gambaran beragam karena harga berfluktuasi di Triwulan ke-2

Harga ekspor komoditas utama Indonesia menyajikan gambaran yang beragam...

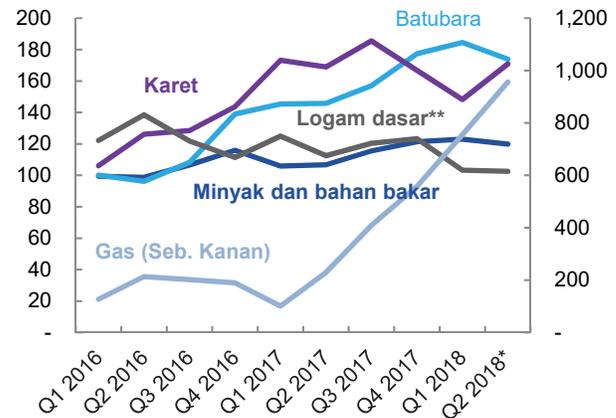
Harga di tingkat global untuk komoditas ekspor utama Indonesia bergerak ke arah yang berbeda di Triwulan ke-2. Harga untuk minyak mentah, LNG, dan logam dasar mengalami peningkatan yang tinggi, sementara harga untuk minyak kelapa sawit mentah dan karet terus menurun. Harga batu bara meningkat tetapi pada kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan di Triwulan ke-1. Kotak A.2 menjelaskan pendorong dari pergerakan tersebut.

...berkontribusi terhadap kinerja bauran volume ekspor Indonesia di Triwulan ke-2

Didorong oleh harga yang lebih tinggi dan permintaan yang tinggi, volume ekspor gas Indonesia meningkat pesat (Gambar A.9)⁷. Ekspor minyak meningkat, tetapi pada kecepatan yang lebih lambat, karena tantangan produksi minyak masih tetap ada⁸. Demikian pula, pertumbuhan ekspor batu bara berkurang, mencerminkan sebagian dari dampak kebijakan pemerintah yang baru (lihat Kotak A.3)⁹. Ekspor logam dasar bahkan lebih buruk, melanjutkan pola penurunan yang dimulai di Triwulan ke-1.

Gambar A.9: Triwulan ke-2 mencatat berlanjutnya pertumbuhan volume ekspor gas, pemulihan volume ekspor karet, serta penurunan volume ekspor batubara, minyak dan logam dasar

(indeks ekspor, triwulanan, Januari 2016=100)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Data di Triwulan ke-2 2018 hanya untuk bulan April-Mei. Kategori Logam Dasar tidak termasuk perak dan platina. Minyak dan Bahan Bakar Minyak tidak termasuk Minyak Kelapa Sawit Mentah dan hanya mengacu pada Produk Minyak Bumi dan Bahan Bakar yang Dimurnikan. Data SITC 2-digit dan 3-digit pada volume ekspor digunakan untuk mengelompokkan volume ekspor tertimbang. Indeks dibangun dengan volume ekspor Januari 2016 yang digunakan sebagai basis.

Kotak A.2: Harga Komoditas di Tingkat Global untuk Komoditas Ekspor Utama Indonesia Bergerak ke Arah Berbeda

Harga untuk komoditas ekspor utama Indonesia bergerak ke arah yang berbeda di Triwulan ke-2 (Gambar A.10), dan ditetapkan untuk mengambil lintasan bervariasi dalam Semester ke-2 (Gambar A.11). Harga minyak mentah terus melonjak, sebesar 44,6 persen *yoy* di Triwulan ke-2, peningkatan di triwulan ketujuh secara berturut-turut sejak Triwulan ke-3 tahun 2016. Peningkatan ini untuk mengantisipasi pasar yang lebih ketat menyusul keputusan AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap minyak Iran, dan didorong oleh permintaan yang lebih tinggi untuk energi di Eropa setelah terjadinya gelombang panas. Logam dasar mengalami kecenderungan yang sama, meningkat menjadi 20,4 persen *yoy* di Triwulan ke-2 dari 18,4 persen di Triwulan ke-1. Harga Gas Alam Cair (LNG) juga meningkat 11,6 persen karena adanya permintaan yang tinggi dari Asia, meskipun lebih rendah dari 20,6 persen yang terjadi di Triwulan ke-1. Harga batubara meningkat dengan kecepatan yang lebih lambat, meningkat di Triwulan ke-2 sebesar 9,1 persen, dibandingkan dengan peningkatan sebesar 25,4 persen di Triwulan ke-1. Sebaliknya, harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan karet keduanya menurun untuk triwulan yang kedua berturut-turut, masing-masing sebesar 7,7 persen dan 13,2 persen, dengan jatuhnya harga minyak kelapa sawit terkait dengan permintaan yang lebih rendah¹.

Ke depan, pasar mengharapkan harga minyak mentah untuk menjadi stabil atau sedikit menurun di Paruh ke-2², didukung oleh keputusan OPEC pada pertemuan tanggal 22 Juni untuk meningkatkan produksi setelah adanya pembatasan produksi yang sudah diberlakukan sejak tahun 2016³. Demikian pula, harga logam dasar diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan di Triwulan ke-2, sementara diperkirakan akan terjadi sedikit peningkatan pada harga karet. Sementara itu, diperkirakan harga LNG akan melanjutkan peningkatannya yang tinggi, karena meningkatnya impor dari Tiongkok, dan dampak positif dari beberapa pandangan negara bahwa LNG dapat berfungsi sebagai “bahan bakar antara” sebagai jembatan untuk menuju masa depan rendah karbon⁴. Sebaliknya, harga batubara diperkirakan akan mengalami penurunan tajam, oleh karena pasar mengantisipasi pasokan yang melimpah menyusul adanya pasokan yang tinggi dari Tiongkok dan India, berlanjutnya pelaksanaan kebijakan hijau Tiongkok, dan ketakutan bahwa perang dagang antara AS-Tiongkok dapat mengakibatkan perlambatan Pertumbuhan Tiongkok dan dengan demikian

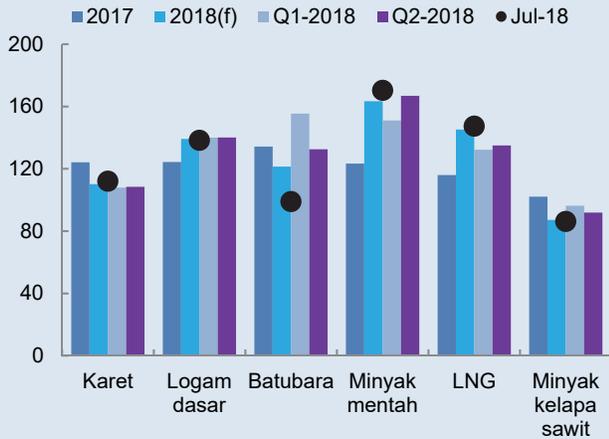
⁷ Permintaan untuk gas alam cair (LNG) tetap kuat dan meningkat, meskipun harga gas lebih tinggi. Lihat The Economic Times (05 Agustus 2018).

⁸ Produksi minyak Indonesia telah menghadapi tantangan terus-menerus selama beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan penurunan produksi, sebagian karena rendahnya investasi di ladang-ladang minyak yang baru dan investasi yang rendah dalam meningkatkan pengangkatan minyak dengan teknologi baru (enhanced oil recovery) yang terkait dengan ladang-ladang minyak yang ada. Lihat The Diplomat (1 Juni 2018).

⁹ Jatuhnya ekspor komoditas Tiongkok yang terkait dengan “perang terhadap polusi” sangatlah penting dampaknya terhadap permintaan global untuk batubara. Lihat Reuters (3 Juli 2018).

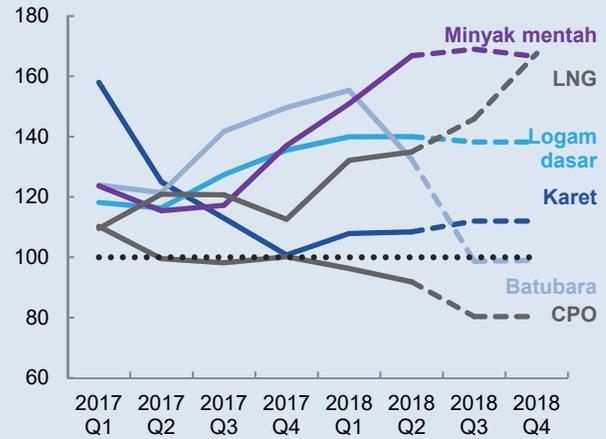
mengurangi konsumsi batu bara. Akhirnya, harga minyak kelapa sawit diperkirakan akan terus menurun, didorong oleh stok minyak kelapa sawit yang tinggi dan permintaan ekspor yang lemah untuk minyak kelapa sawit Malaysia dan Indonesia⁵.

Gambar A.10: Harga untuk komoditas utama Indonesia mengalami kondisi yang berbeda-beda di Triwulan ke-2, dengan minyak mentah yang naik, minyak kelapa sawit yang turun
(indeks 2016=100)



Sumber: Bank Dunia; investing.com; cmegroup.com; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: 2018 (p) singkatan dari perkiraan, yang dibangun dengan menggunakan data historis Januari – Mei, dan setelah itu menggunakan data pasar berjangka

Gambar A.11: Di Semester ke-2, pasar berjangka (future markets) memperkirakan harga minyak mentah menjadi stabil, dan batubara menurun tajam
(indeks 2016 = 100)



Sumber: Bank Dunia; investing.com; cmegroup.com; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: LNG singkatan dari Liquefied Natural Gas dan CPO adalah singkatan dari Crude Palm Oil

¹ Menurut *CIMB Equities Research*, permintaan minyak kelapa sawit mentah telah jatuh sebagian karena adanya kenaikan bea masuk di India pada produk tersebut. Lihat *The Star* (23 Juni 2018).

² Analisis ke depan mengacu pada harga pasar berjangka sebagai cerminan dari ekspektasi pasar.

³ Siaran pers OPEC mencatat bahwa “konformitas” dengan target November 2016 telah mencapai 152 persen pada bulan Mei 2018 dan menetapkan untuk memiliki konformitas “turun sampai 100” persen dari 1 Juli 2018 dan seterusnya. Lihat OPEC (22 Juni 2018). Para analis memperkirakan produksi akan meningkat sebesar 600.000–800.000 barel per hari. Lihat CNBC (22 Juni 2018).

⁴ Lihat *S&P Global* (4 Juni 2018). Pertemuan G20 di Argentina mencerminkan pandangan bahwa LNG dapat berfungsi sebagai “bahan bakar antara”, untuk membantu negara-negara beralih dari batubara. Lihat Shell (2018) dan Reuters (16 Juni 2018). Namun demikian, pandangan ini diperdebatkan oleh para ilmuwan iklim; lihat *Oil Change International* (Juni 2018).

⁵ Produksi Indonesia dan Malaysia mencakup lebih dari 80 persen ekspor minyak kelapa sawit dunia, dengan Indonesia sebagai pemimpin (lebih dari 55 persen pangsa). Lihat *World's Top Exports* (Mei 2011, 2018). Pada tren terkini, lihat *The Star* (23 Juni 2018 dan *The Star* (14 Juni 2018), dan Gan, B. (26 Juni 2018)).

Kotak A.3: Ekspor batubara pada tahun 2018 belum meningkat seiring dengan peningkatan produksi

Kenaikan harga batubara di Paruh Pertama tahun 2018 membantu meningkatkan produksi secara signifikan, tetapi untuk tujuan ekspor kurang meningkat. Sementara produksi batubara Indonesia mencapai 123 juta ton pada Januari-April 2018, meningkat sebesar 38,7 persen *yoj*, volume ekspor untuk periode yang sama hanya mencapai 79 juta ton, peningkatannya hanya sebesar 5,3 persen *yoj*. Akibatnya, pangsa total produksi batubara untuk tujuan ekspor pada tahun 2018 turun menjadi 65,8 persen, dibandingkan dengan pangsa rata-rata sebesar 78,8 persen pada 2013-17 (Gambar A.12).

Salah satu faktor utama di balik perubahan ini adalah kebijakan Kewajiban (untuk memenuhi permintaan) Pasar Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*, DMO) pemerintah untuk batu bara yang mulai berlaku pada awal 2018. Kebijakan DMO ini mengharuskan semua produsen batubara dalam negeri untuk menjual 25 persen dari total produksi mereka kepada pembeli dalam negeri (khususnya PT PLN dan perusahaan listrik swasta/IPP), atau sampai target dalam negeri sebesar 100 juta ton dipenuhi untuk seluruh industri¹. Harga batubara diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan diperbarui setiap bulan. Untuk pemasok tenaga listrik dalam negeri (PT PLN saja), harga ditetapkan maksimal sebesar 70 dolar AS per ton,² di bawah Harga Batubara Acuan (HBA) Pemerintah untuk harga dalam negeri (Gambar A.13). Akibatnya, produsen batubara menanggung biaya perbedaan antara harga pasar internasional dan harga yang diatur di dalam negeri. Di sisi lain, PT PLN memperoleh manfaat, karena batubara mencakup

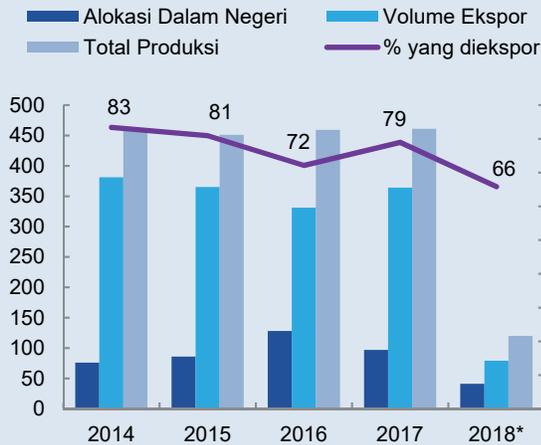
lebih dari 50 persen dari campuran input energi domestiknya. Sehingga, dari Januari hingga Juli, DMO telah membantu PT PLN untuk memangkas pengeluaran dengan rata-rata 30 dolar AS per MT.

Dalam jangka pendek, tingkat harga dan volume penjualan yang diatur tersebut menambah biaya ekspor batubara dan menghambat kemampuan produsen batubara Indonesia untuk mengambil keuntungan dari momentum peningkatan harga batubara internasional. Selama jangka menengah, DMO dapat mengurangi kapasitas reinvestasi produsen setelah dipaksa untuk menjual dengan harga yang lebih rendah. Tantangan lebih lanjut dengan DMO adalah dalam hal kepatuhan. Kementerian ESDM telah mencatat bahwa 22 dari 40 perusahaan batubara yang mengajukan kenaikan kuota produksi belum memenuhi persyaratan pangsa penjualan dalam negeri³.

Untuk mendorong ekspor sambil tetap menerapkan kebijakan DMO, Pemerintah baru-baru ini membelakukan dua langkah tindakan⁴. Pertama, pemerintah telah menaikkan batas produksi batubara sekitar 100 juta ton, peningkatan sebesar 23,5 persen pada 425 juta ton⁵ batas produksi yang semula. Kedua, untuk membuka potensi produksi dan pada akhirnya membuka ekspor, mulai September 2018, produsen batubara yang memiliki lebih dari 25 persen penjualan dalam negeri dari total produksi mereka dapat “mengalihkan” kelebihan penjualan mereka kepada pihak lain yang belum mencapai target.

Gambar A.12: Ekspor batubara sebagai bagian dari total produksi telah menurun pada tahun 2018...

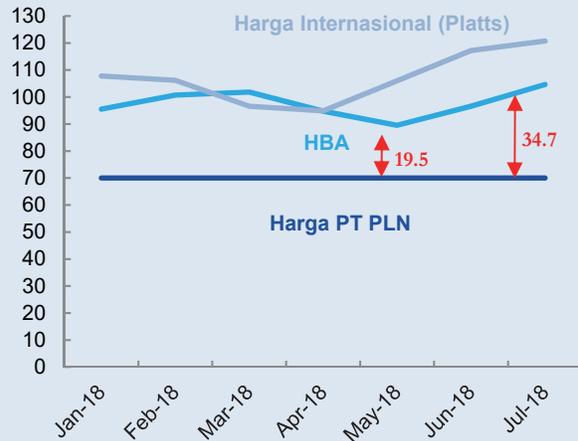
(Kiri: juta ton; Kanan: persen)



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: 2018* berlaku untuk Januari – April 2018; % yang diekspor mengacu pada bagian dari total produksi yang diekspor

Gambar A.13: ... karena adanya kebijakan baru yang mengharuskan penjualan ke pasar dalam negeri dengan harga yang lebih rendah

(dolar AS per metrik ton)



Sumber: Bank Dunia; investing.com; cmegroup.com; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: LNG singkatan dari Liquefied Natural Gas dan CPO adalah singkatan dari Crude Palm Oil

Perkiraan menunjukkan bahwa jika kebijakan DMO tersebut dibatalkan untuk sisa tahun ini dan 25 persen dari alokasi untuk penjualan dalam negeri dialihkan untuk tujuan ekspor, maka cadangan devisa akan meningkat sebesar 3,35 miliar dolar AS antara bulan September dan Desember 2018⁵. Namun demikian, pencabutan DMO akan berdampak negatif terhadap PT PLN, dengan implikasi potensial terhadap defisit anggaran Pemerintah⁷.

¹ Kebijakan ini berlaku setiap tahun hingga dan termasuk tahun 2019.

² Pemerintah telah menyatakan bahwa kebijakan ini selaras dengan sikap kebijakan energi yang tanpa adanya perubahan harga BBM.

³ 18 dari 22 perusahaan memiliki penjualan dalam negeri antara 12,5 hingga 25 persen dari total produksi, dan 4 perusahaan mencatat penjualan dalam negeri lebih rendah dari 12,5 persen dari total produksi

⁴ Langkah tindakan yang baru diberlakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi defisit transaksi berjalan yang sedang meningkat, mengingat depresiasi tajam Rupiah baru-baru ini.

⁵ Namun demikian, tidak semua produsen mampu meningkatkan produksi karena berbagai alasan, mulai dari kondisi cuaca buruk hingga kendala kapasitas internal. Kementerian ESDM telah menyatakan bahwa para penambang batubara kemungkinan hanya meningkatkan produksi sekitar 25 juta ton.

⁶ Berita Satu (15 Agustus, 2018).

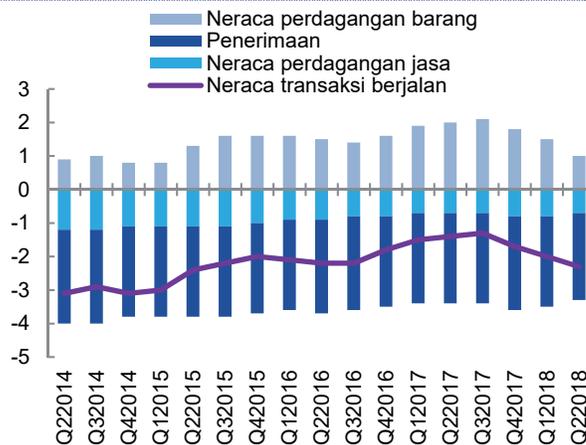
⁷ PT PLN telah mencatat bahwa jika kebijakan DMO tersebut dicabut dan peraturan mengenai harga bahan bakar tetap tidak berubah sampai tahun 2019, PT PLN akan menghadapi biaya keuangan tambahan lebih dari Rp 30 triliun per tahun. Mengingat PT PLN diharuskan oleh Pemerintah untuk menjaga harga listrik tetap konstan, sumber daya dari APBN digunakan untuk membiayai pembayaran tunggakan.

3. Defisit neraca transaksi berjalan membesar seiring dengan makin tingginya harga minyak mentah dan meningkatnya impor barang modal

Surplus perdagangan barang yang lebih kecil menyebabkan neraca transaksi berjalan memburuk

Di tengah naiknya harga minyak mentah dan berlanjutnya peningkatan investasi peralatan yang mendorong impor barang modal dan barang antara (*intermediate goods*), defisit transaksi berjalan Indonesia membesar menjadi 2,3 persen dari PDB¹⁰ di empat triwulan sampai dengan Triwulan ke-2 dari 1,7 persen di tahun 2017 dan 1,4 persen di periode yang sama tahun lalu (Tabel A.1). Memburuknya neraca transaksi berjalan ini terutama didorong oleh surplus perdagangan barang, yang turun menjadi 1,0 persen dari PDB¹¹ (Gambar A.14). Meskipun ekspor barang dipacu, ekspor tetap dilampaui oleh impor. Defisit penerimaan jasa dan penerimaan primer yang sedikit lebih besar yang terkait dengan faktor musiman¹² juga berkontribusi terhadap defisit transaksi berjalan yang lebih luas. Secara keseluruhan, neraca pembayaran mencatat defisit sebesar 0,2 persen dari PDB di Triwulan ke-2 tahun 2018, dibandingkan dengan surplus sebesar 1,1 persen di tahun 2017 dan 1,6 persen di Triwulan ke-2 tahun 2017¹³.

Gambar A.14: Surplus perdagangan barang menurun, menyebabkan memburuknya neraca transaksi berjalan (jumlah empat triwulan secara bergulir, persen dari PDB)



Sumber: BI, Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Poin data menunjukkan jumlah dari empat triwulan terakhir, dibagi dengan PDB untuk empat triwulan terakhir.

Tabel A.1: Neraca Pembayaran Indonesia

(persen PDB, penjumlahan empat triwulan secara bergulir, kecuali dinyatakan lain)

	Q22017	Q32017	Q42017	Q12018	Q22018
Neraca transaksi berjalan	-1,4	-1,3	-1,7	-2,0	-2,3
Barang	2,0	2,1	1,8	1,5	1,0
Jasa	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8	-0,7
Penerimaan primer	-3,1	-3,1	-3,2	-3,2	-3,1
Penerimaan sekunder	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
Neraca modal dan keuangan	3,1	3,0	2,9	2,4	2,3
Penanaman modal langsung	1,8	1,8	1,9	1,9	1,7
Penanaman modal portofolio	2,1	1,8	2,0	1,3	0,5
Penanaman modal lainnya	-0,8	-0,6	-1,1	-0,7	0,1
Kesalahan & kelalaian	-0,1	-0,2	0,0	-0,1	-0,1
Neraca keseluruhan	1,6	1,5	1,1	0,3	-0,2
<i>Neraca transaksi berjalan, dalam miliar dolar AS</i>	-4,7	-4,6	-5,8	-5,7	-8,0
<i>Neraca modal dan keuangan, dalam miliar dolar AS</i>	5,3	10,2	6,9	2,4	4,0
<i>Neraca keseluruhan, dalam miliar dolar AS</i>	0,7	5,4	1,0	-3,9	-4,3

Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

¹⁰ Membandingkan Triwulan ke-2 tahun 2017 dengan Triwulan ke-2 tahun 2018, defisit transaksi berjalan triwulanan melebar dari 1,9 menjadi 3,0 persen dari GDP secara triwulanan.

¹¹ Membandingkan Triwulan ke-2 tahun 2017 dengan Triwulan ke-2 tahun 2018, surplus perdagangan barang triwulanan menyusut dari 1,9 menjadi 0,1 persen dari PDB secara triwulanan.

¹² Pembayaran penerimaan primer cenderung meningkat pada Triwulan ke-2 karena pembayaran dividen kepada investor asing dan pembayaran bunga pinjaman biasanya dilakukan pada bulan Juni setiap tahun. Demikian pula, impor jasa yang terkait dengan perjalanan cenderung meningkat pada bulan Juni karena lebih banyak masyarakat melakukan perjalanan ke luar negeri selama periode Lebaran.

¹³ Keseimbangan umum (*overall balance*) mencatat surplus sebesar 0,3 persen dari PDB secara triwulanan di Triwulan ke-2 tahun 2017, dibandingkan dengan defisit sebesar 1,6 persen di Triwulan ke-2 tahun 2018.

Total impor tetap melebihi total ekspor

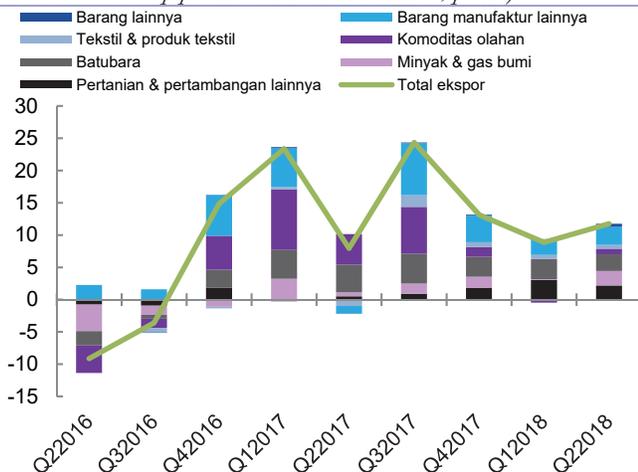
Peningkatan nominal total impor barang dan jasa terus melebihi total ekspornya untuk triwulan yang keempat secara berturut-turut. Total ekspor meningkat 12,4 persen *yoy* di Triwulan ke-2 dari 10,0 persen pada triwulan sebelumnya, terutama didorong oleh ekspor barang. Ekspor jasa sedikit menurun, tetapi tetap berada di wilayah dua digit. Sementara itu total impor meningkat menjadi 22,9 persen di Triwulan ke-2 dari 19,6 persen pada Triwulan ke-1, karena impor barang mengimbangi perlambatan impor jasa.

Harga minyak yang lebih tinggi menyebabkan lonjakan ekspor minyak dan gas...

Meskipun terjadi peningkatan ketegangan perdagangan global, ekspor barang meningkat menjadi 11,8 persen *yoy* di Triwulan ke-2 dari 8,9 persen di Triwulan ke-1. Hal ini terutama disebabkan oleh ekspor terkait komoditas, yang menyumbang dua pertiga dari peningkatan ekspor (Gambar A.15). Ekspor minyak dan gas melonjak sebesar 30,8 persen, dibantu oleh pulihnya volume dan harga rata-rata yang lebih tinggi selama Triwulan ke-2 dibandingkan dengan di Triwulan ke-1. Ekspor batubara tetap tinggi, tetapi berkontribusi lebih sedikit terhadap pertumbuhan dibandingkan di Triwulan ke-1. Di sisi manufaktur, ekspor tekstil dan barang-barang manufaktur lainnya (terutama makanan olahan, kendaraan bermotor, dan suku cadang kendaraan bermotor) meningkat. Ekspor makanan olahan sebagian terkait dengan peningkatan penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*, FDI) yang terjadi baru-baru ini ke sektor ini.

Gambar A.15: Pertumbuhan ekspor dikontribusikan oleh banyak sumber, tetapi harga minyak yang lebih tinggi mendorong ekspor minyak dan gas...

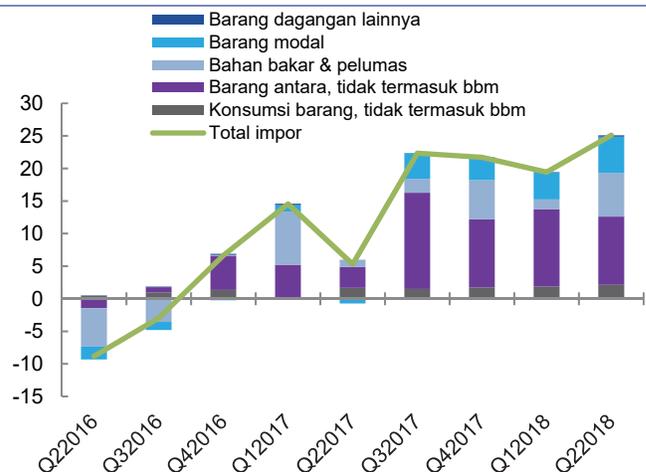
(kontribusi terhadap pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: BI, Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: "Barang manufaktur lain" termasuk kertas, perabotan, plastik, makanan olahan, dan bahan kimia

Gambar A.16: Impor bahan bakar dan pelumas berkontribusi besar terhadap percepatan impor

(kontribusi terhadap pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: BI, Perhitungan staf Bank Dunia

...tetapi juga menyebabkan peningkatan impor bahan bakar, yang berkontribusi terhadap peningkatan impor

Harga minyak yang lebih tinggi dan berlanjutnya peningkatan impor barang modal juga menyebabkan pembayaran impor yang lebih besar. Secara keseluruhan, impor barang meningkat menjadi 26,6 persen *yoy* di Triwulan ke-2 dari 19,7 persen di Triwulan ke-1. Berbeda dengan Triwulan ke-1, impor bahan bakar dan pelumas - terutama untuk konsumsi - memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan di Triwulan ke-2 (Gambar A.16).¹⁴ Secara keseluruhan, impor yang terkait minyak dan gas naik sebesar 45,6 persen *yoy* secara nominal, dari 6,0 persen pada kuartal sebelumnya. Impor barang modal tetap kuat, meningkat menjadi 38,8 persen *yoy* dari 26,7 persen di triwulan sebelumnya. Impor ini tampaknya terkait dengan penanaman modal di bidang kelistrikan dan infrastruktur transportasi, karena data bulanan BPS

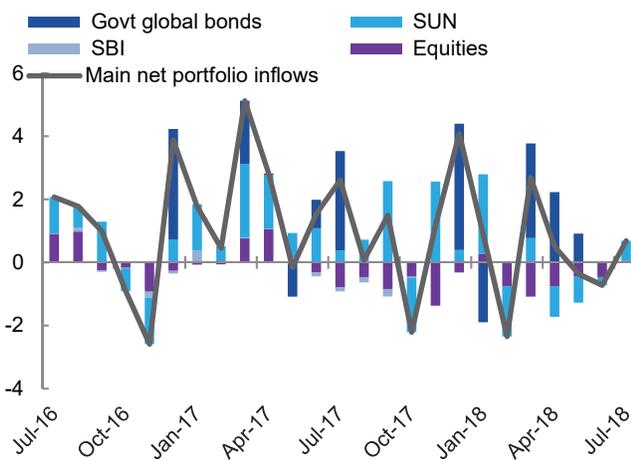
¹⁴ Pemerintah telah mengumumkan kewajiban untuk menggunakan biodiesel campuran mulai September 2018 dengan harapan bahwa langkah ini akan mengurangi ketergantungan pada impor bbm.

dari bulan April dan Mei menunjukkan adanya peningkatan impor mesin khusus dan mesin pengerjaan logam, pesawat terbang dan suku cadang pesawat terbang, dan mesin kelistrikan. Impor untuk masukan antara (*intermediate inputs*), terutama pasokan bagi industri, juga tetap tinggi.

Meskipun aliran keluar penanaman modal portofolio terus berlanjut, surplus neraca keuangan meningkat

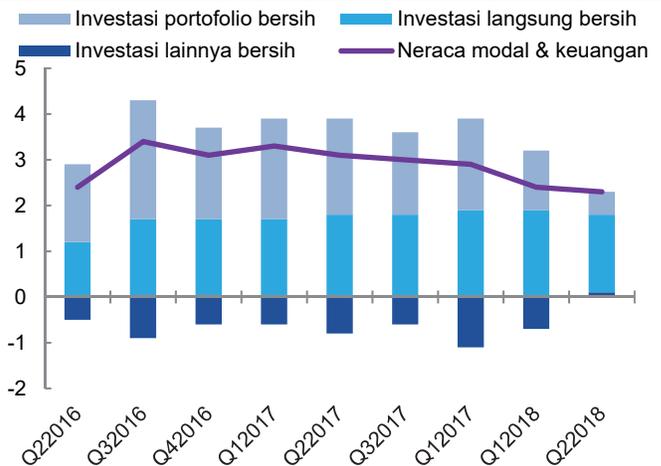
Aliran modal bersih berjumlah 4,0 miliar dolar AS di Triwulan ke-2 tahun 2018, lebih rendah dari 5,3 miliar dolar AS di Triwulan ke-2 tahun 2017. Karena adanya tekanan dari normalisasi kebijakan moneter AS dan ketidakpastian yang disebabkan oleh “perang dagang” yang meningkat di bulan Juni, pihak asing terus memindahkan investasi dari negara-negara pasar berkembang sebagai *kelas aset* (*asset class*, yaitu sekumpulan efek yang menunjukkan karakteristik serupa, berperilaku serupa di pasar dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama – pent.). Tidak terkecuali Indonesia, yang mencatat 1,6 miliar dolar AS dari arus keluar selama triwulan ini (Gambar A.17)¹⁵. Meskipun demikian, investasi portofolio bersih mencatat saldo yang meskipun kecil tetapi positif, sebesar 53,6 juta dolar AS. Arus masuk investasi lainnya juga meningkat, meskipun sebagian dari transaksi *swap* dan deposito berjangka Bank Indonesia (BI) dengan bank-bank dalam negeri. Secara keseluruhan, neraca modal dan neraca keuangan mencatat surplus sebesar 2,3 persen dari PDB di empat triwulan hingga Triwulan ke-2, lebih rendah dari 3,1 persen dari PDB di Triwulan ke-2 tahun 2017 (Gambar A.18)¹⁶. Secara keseluruhan, cadangan internasional turun menjadi 118,3 miliar dolar AS, tetapi cukup untuk membiayai pembayaran utang luar negeri pemerintah dan impor selama 8 bulan. Penurunan cadangan sebesar 6,2 miliar dolar AS selama triwulan tersebut merupakan yang terbesar yang terjadi sejak Triwulan ke-3 tahun 2015, karena Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar mata uang untuk meredam depresiasi Rupiah, menghindari munculnya gejolak yang berlebihan.

Gambar A.17: Investor asing menjual surat utang dan ekuitas Indonesia di Paruh Pertama tahun 2018...
(miliar dolar AS)



Sumber: BI, Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) adalah obligasi dengan mata uang lokal

Gambar A.18: ... tetapi neraca keuangan tetap surplus karena masuknya portofolio dan investasi lain di Triwulan ke-2
(persen dari PDB)



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

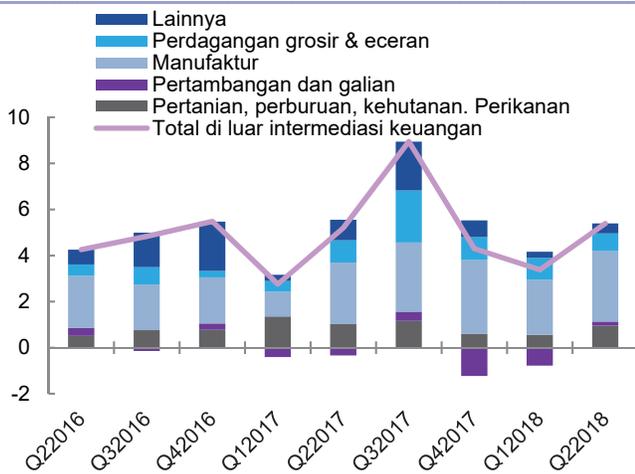
¹⁵ Namun demikian, data di bulan Juli mulai menunjukkan berbaliknya tren, dengan terjadinya aliran positif dari pembelian asing terhadap saham dan obligasi SUN (lihat Gambar A.3).

¹⁶ Surplus neraca modal dan keuangan triwulanan menurun dari 2,1 persen dari PDB secara triwulanan di Triwulan ke-2 tahun 2017 menjadi 1,5 persen dari PDB di Triwulan ke-2 tahun 2018.

Penanaman modal asing langsung meningkat

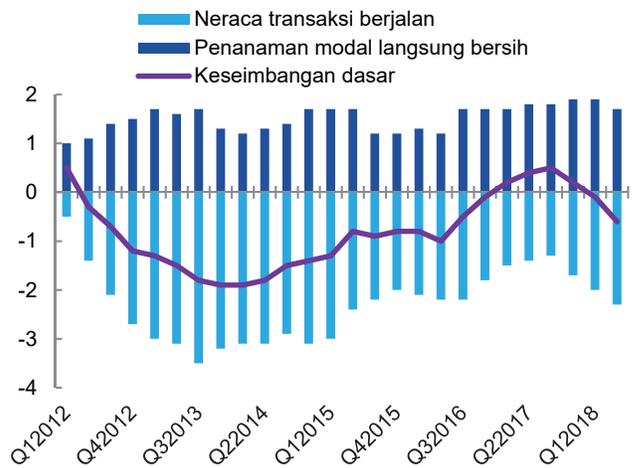
Penanaman modal asing langsung (FDI)¹⁷ berjumlah 5,5 miliar dolar AS di Triwulan ke-2, naik dari 3,7 miliar dolar AS di Triwulan ke-1 (Gambar A.19). Sektor manufaktur terus menjadi penerima utama FDI, kemungkinan karena adanya penanaman modal besar di pabrik penggilingan padi kuartal ini¹⁸. Sektor-sektor yang terkait dengan pertanian juga mencatat aliran bersih sebesar hampir satu miliar dolar AS, sementara penanaman modal bersih di sektor pertambangan akhirnya berubah positif setelah adanya ketidakpastian peraturan selama beberapa bulan. Meskipun begitu, Indonesia masih relatif sedikit menarik FDI dibandingkan dengan negara-negara setara lainnya¹⁹. Investasi langsung bersih (investasi langsung di Indonesia dikurangi investasi langsung Indonesia di luar negeri) adalah sebesar 1,7 persen dari PDB di empat triwulan sampai Triwulan ke-2²⁰, dan belum cukup untuk membiayai defisit neraca transaksi berjalan sejak Triwulan ke-1 tahun 2018 (Gambar A.20).

Gambar A.19: Penanaman modal asing langsung bersih (FDI) meningkat, sebagian besar di sektor manufaktur...
miliar dolar AS



Sumber: BI, Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Tidak termasuk intermediasi keuangan, yang mengalami aliran besar satu kali di Triwulan ke-4 tahun 2016. Perdagangan grosir dan eceran termasuk perbaikan kendaraan bermotor, sepeda motor, dan barang-barang pribadi serta barang rumah tangga. Lainnya termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan kegiatan layanan pribadi.

Gambar A.20: ...tetapi penanaman modal langsung bersih belum menutupi defisit transaksi berjalan di beberapa triwulan terakhir
persen dari PDB



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Keseimbangan dasar adalah penjumlahan neraca transaksi berjalan dan penanaman modal langsung bersih.

¹⁷ Dinyatakan secara neto.

¹⁸ Sebagaimana ditunjukkan oleh data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM.

¹⁹ FDI ke Indonesia rata-rata sebesar 2,1 persen dari PDB selama 2013-2017, dibandingkan dengan Malaysia (3,5 persen), Brasil (3,7 persen), dan Vietnam (5,7 persen). Lihat WDI, perhitungan staf Bank Dunia dan juga Bank Dunia (2017) untuk pembahasan lebih rinci mengenai pendorong FDI di Indonesia.

²⁰ Membandingkan Triwulan ke-2 tahun 2017 dengan Triwulan ke-2 tahun 2018, investasi langsung bersih triwulanan turun dari 1,7 persen menjadi 0,9 persen dari PDB secara triwulanan.

Kotak A.4: Bagaimana dampak perang dagang terhadap Indonesia?

Amerika Serikat baru-baru ini meningkatkan – atau mengancam untuk meningkatkan – tingkat perlindungan impor terhadap eksportir utama ke Amerika Serikat, terutama Tiongkok. Secara khusus, Amerika Serikat telah meningkatkan tarif impor sebesar 25 poin persentase terhadap hampir 1.300 produk yang diimpor dari Tiongkok melalui dua seri tindakan. Pada tanggal 6 Juli, Amerika Serikat mulai menerapkan tarif senilai 34 miliar dolar AS untuk barang-barang dari Tiongkok ini; sementara sisanya dari langkah tersebut itu diberlakukan pada tanggal 23 Agustus.¹ Tiongkok mulai menerapkan langkah yang sama pada jumlah yang setara terhadap impor dari Amerika Serikat; sementara Amerika Serikat juga mengancam akan menargetkan barang impor dari Tiongkok senilai 200 miliar dolar AS dengan tarif yang sama. Pada bulan Mei, Amerika Serikat telah memberlakukan tarif baru sebesar 25 persen untuk baja dan 10 persen untuk aluminium terhadap semua negara kecuali Uni Eropa, Kanada dan Meksiko.

Perekonomian Indonesia mungkin terpengaruh oleh 'perang dagang' ini melalui empat saluran:

- **Ketidakpastian pasar keuangan:** dengan meningkatnya ketidakpastian perdagangan global, investor dapat menarik diri dari investasi berisiko termasuk ekuitas dan utang negara pasar berkembang, yang memperburuk ketidakstabilan dalam arus modal; pertumbuhan ekspor yang melambat dan defisit perdagangan yang meluas serta masuknya penanaman modal asing langsung (FDI) yang rendah membuat Indonesia sangat rentan terhadap saluran ini.
- **Jalur perdagangan langsung:** Indonesia mungkin mendapat manfaat dari ekspor yang lebih tinggi ke Amerika Serikat dan Tiongkok, karena kedua negara ini saling mengganti pemasok ke pemasok lain. Perkiraan kami menunjukkan bahwa perkiraan penurunan ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat untuk produk yang juga diekspor oleh Indonesia ke pasar AS bernilai 3,6 miliar dolar AS, atau 0,4 persen dari PDB Indonesia.
- **Saluran perdagangan dan pertumbuhan tidak langsung:** Dalam jangka pendek hingga menengah, ekspor Indonesia mungkin lebih rendah karena permintaan yang lebih rendah untuk barang masukan antara (*intermediate inputs*) di dalam rantai pasokan, dan yang terutama dari berkurangnya kegiatan ekonomi di Amerika Serikat dan Tiongkok. Mengingat relatif rendahnya pangsa nilai tambah domestik yang terkait dengan permintaan Tiongkok dan AS, saluran ini kemungkinan adalah saluran yang relatif tidak berdampak. Pada saat yang sama, harga komoditas juga akan merosot jika komoditas tertentu menjadi target – seperti yang terjadi dalam kasus kedelai, di mana Indonesia adalah pengimpor besar – atau dari pertumbuhan yang lebih rendah dan akibatnya permintaan komoditas yang lebih rendah dari Tiongkok;
- **Saluran investasi langsung:** Dalam waktu dekat, ketidakpastian yang lebih besar dapat mengurangi prospek investasi langsung secara global, seiring meningkatnya premi risiko dan investor menunggu kejelasan yang lebih pasti. Namun demikian, dalam jangka menengah, perang dagang mempercepat proses investasi Tiongkok di luar negeri, karena perusahaan-perusahaan Tiongkok berusaha memperluas pasar ke negara-negara lain, termasuk sebagai cara potensial untuk menghindari dari lonjakan tarif impor AS. Potensi relokasi investasi Tiongkok ke Indonesia akan menguntungkan meskipun tidak setinggi potensi Vietnam dan Malaysia, yang produk-produk ekspornya (*export baskets*) lebih mirip dengan produk-produk ekspor Tiongkok. Kedua negara tersebut juga lebih terintegrasi ke dalam rantai pasokan global dan regional.

Indonesia dapat menerapkan beberapa kebijakan untuk mengurangi ketidakpastian eksternal yang meningkat ini. Indonesia dapat membantu produsen dalam negeri yang memiliki potensi untuk menggantikan eksportir Tiongkok ke Amerika Serikat dengan memfasilitasi akses terhadap barang-barang masukan impor yang diperlukan. Ini juga termasuk memastikan ketersediaan keuangan, termasuk pembiayaan perdagangan, yang diperlukan untuk produksi dan ekspor tambahan. Secara lebih luas, dengan meningkatkan kondisi di sektor keuangan akan memberikan penyangga tambahan terhadap gejolak dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Indonesia juga dapat menargetkan untuk menarik calon investor yang mencoba untuk menghindari pengenaan tarif AS dengan mengurangi pembatasan untuk investasi di sektor terkait, termasuk batasan bagi ekuitas asing, persyaratan kandungan lokal dan perizinan investasi yang rumit.

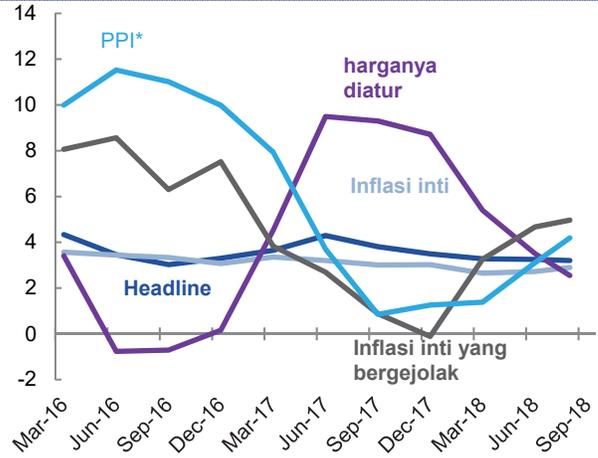
¹ Lihat daftar lengkap barang yang diterbitkan oleh USTR di sini (tahap pertama): USTR (20 Juni 2018) dan di sini (tahap kedua): USTR (2018).

4. Inflasi IHK (*headline inflation*) tetap tidak berubah di Triwulan ke-2

Inflasi IHK (*headline inflation*) tetap tidak berubah di Triwulan ke-2, karena kenaikan harga listrik dan bahan bakar yang lebih kecil mengimbangi inflasi harga pangan yang lebih tinggi

Inflasi tetap rendah, sebesar rata-rata 3,3 persen *yoY* di Triwulan ke-2 tahun 2018, sama dengan Triwulan ke-1, meskipun terjadi pelemahan nilai rupiah dan peningkatan dalam indeks harga produsen baru-baru ini (Gambar A.21). Nilai inflasi IHK tersebut, yang terendah sejak Triwulan ke-4 tahun 2016, sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kenaikan harga barang-barang yang harganya diatur Pemerintah (*administered price*), seperti BBM bersubsidi, tarif listrik, dan tarif angkutan. Kenaikan harga yang lebih kecil ini sebagian disebabkan oleh efek dasar yang tinggi dari kenaikan tarif listrik sebanyak tiga kali di paruh pertama tahun 2017 serta sebagian oleh kebijakan pemerintah²¹. Meskipun harga minyak global lebih tinggi, kenaikan harga bahan bakar eceran dalam negeri sebagian besar tidak berubah di semua kategori produk bahan bakar. BBM premium bersubsidi (RON-88) tetap, dan bahan bakar yang tidak disubsidi seperti RON-92 meningkat hanya 0,1 persen *yoY* di Triwulan ke-1 dan Triwulan ke-2, masing-masing (Gambar A.22).

Gambar A.21: Inflasi IHK tetap rendah di Triwulan ke-2
(*perubahan yoY, persen*)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: PPI * adalah singkatan dari Indeks Harga Produsen; hanya kategori Umum Non-Minyak & Gas Bumi yang digunakan di sini. Harga makanan adalah rata-rata tertimbang dari komponen harga bahan makanan dan makanan olahan dari IHK

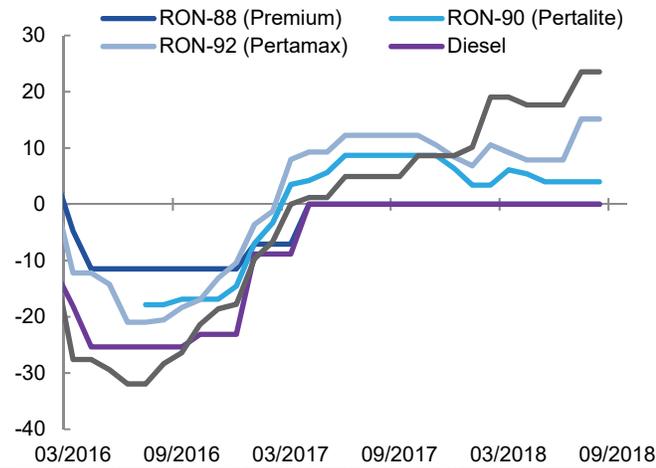
Sebaliknya, inflasi komponen bergejolak (*volatile inflation*) meningkat di Triwulan ke-2, sebesar rata-rata 4,7 persen *yoY* dibandingkan dengan 3,3 persen di Triwulan ke-1. Ini sebagian didorong oleh kenaikan harga pangan yang lebih besar. Harga eceran ayam meningkat sebesar 12,4 persen sementara telur sebesar 13,3 persen di Triwulan ke-2, menyusul kenaikan yang cukup tinggi masing-masing sebesar 8,9 persen dan 11,3 persen di Triwulan ke-1, (Gambar A.23). Selain makanan, biaya angkutan dan komunikasi juga mengalami peningkatan yang lebih besar di Triwulan ke-2, naik 1,8 persen naik dari 1,6 persen di Triwulan ke-1. Inflasi makanan dan angkutan didorong oleh Hari Raya Lebaran di bulan Juni ketika masyarakat Indonesia *mudik* mengunjungi kerabat mereka²².

Angka inflasi bulanan yang terbaru melanjutkan pola yang ada di Triwulan ke-2

Angka inflasi bulanan terbaru menyampaikan hal yang serupa. Sementara harga rumah, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami kenaikan hanya sebesar rata-rata 2,0 persen *yoY* di bulan Juli dan Agustus, inflasi bahan makanan relatif lebih tinggi, sebesar rata-rata 5,1 persen selama periode yang sama. Dalam komponen bahan bakar, kenaikan harga yang tinggi yang terjadi pada RON-92 sebesar 15,2 persen *yoY* di bulan Juli dapat menjadi tanda bahwa harga bahan bakar tidak bersubsidi sedang menyesuaikan mendekati harga pasar global di semester pertama (Gambar A.22). Namun demikian, inflasi IHK di bulan Juli dan Agustus tetap rendah sebesar 3,2 persen, tetap berada di kisaran target inflasi BI sebesar 2,5 hingga 4,5 persen.

²¹ Pemerintah telah mengumumkan komitmen untuk menstabilkan harga listrik dan beberapa jenis bahan bakar sampai setidaknya akhir 2019. Lihat *The Jakarta Post* (6 Maret 2018).
²² *Indonesia Investment* (28 Juli 2018).

Gambar A.22: Meskipun harga minyak dunia meningkat, terdapat peningkatan harga bahan bakar eceran yang lebih kecil di Triwulan ke-2, dengan BBM bersubsidi yang harganya tidak berubah
(persen, kenaikan yoy, bulanan)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.23: Harga eceran ayam dan telur terus meningkat di Triwulan ke-2
(persen, kenaikan yoy, triwulanan)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Triwulan ke-3 2018 * hanya memasukkan data bulan Juli – Agustus saja

5. Kondisi makro-keuangan Indonesia secara umum menegat

Kondisi makro-keuangan Indonesia secara umum menegat di Triwulan ke-2

Meskipun pertumbuhan kredit dalam negeri bertumbuh lebih cepat, kondisi makro keuangan Indonesia secara umum menegat di Triwulan ke-2, sejalan dengan gejolak yang terjadi di pasar keuangan global. Beberapa faktor eksternal secara bersama-sama menyebabkan investor keluar dari negara-negara pasar berkembang sebagai *kelas aset* (*asset class*, yaitu sekumpulan efek yang menunjukkan karakteristik serupa, berperilaku serupa di pasar dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama – pent.) untuk tujuan *safe haven* (aset yang digunakan sebagai pelarian di saat kondisi ekonomi global dianggap sedang tidak aman – pent.) tradisional. Terlepas dari lonjakan imbal hasil obligasi di seluruh tenor, arus modal keluar yang cukup besar ini menyebabkan semakin melemahnya nilai Rupiah, yang menyebabkan BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin secara kumulatif di Triwulan ke-2 dan 25 basis poin lainnya di bulan Agustus. Sementara itu, sistem keuangan masih menunjukkan fundamental yang baik dengan terus meningkatnya pertumbuhan kredit. Rasio kredit macet sedikit menurun, dan rasio kecukupan modal tetap stabil.

Rupiah terdepresiasi lebih lanjut secara nominal, sejalan dengan mata uang negara-negara pasar berkembang lainnya

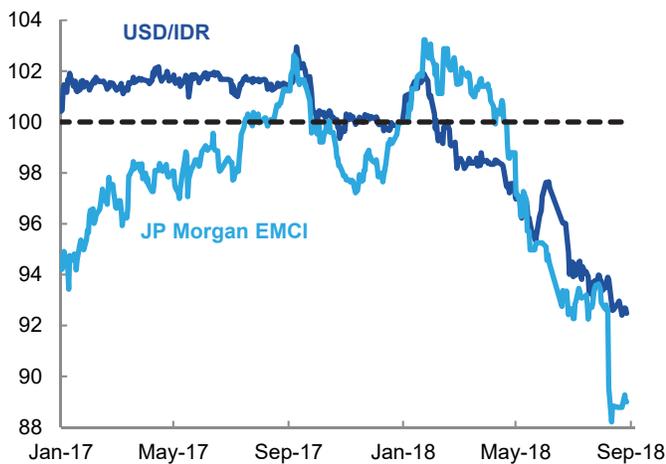
Normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan di negara-negara maju, ketidakpastian yang terkait dengan peningkatan proteksionisme perdagangan, dan gejolak yang terkait dengan negara-negara pasar berkembang besar lainnya seperti Argentina dan Turki, telah menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara pasar berkembang ke daerah-daerah tujuan *safe haven* tradisional. Rupiah terus terdepresiasi terhadap Dolar AS di Triwulan ke-2, menurun sebesar 4,8 persen selama triwulan tersebut, dan mencapai Rp 14.404/dolar AS di akhir bulan Juni, nilai yang terendah selama hampir tiga tahun ini, dan jauh lebih besar dari depresiasi di Triwulan ke-1 sebesar 1,3 persen.

Memasuki Triwulan ke-3 Rupiah terus menurun, mencapai Rp 14.927/dolar AS di minggu pertama bulan September, nilai yang terendah sejak Krisis Keuangan Asia, setelah lira Turki menyeret mata uang negara-negara pasar berkembang lainnya untuk jatuh pula.

Depresiasi Rupiah di Triwulan ke-2 yang tidak terlalu parah dibandingkan dengan EMCI, menandakan tetap adanya minat dari investor terhadap aset Indonesia

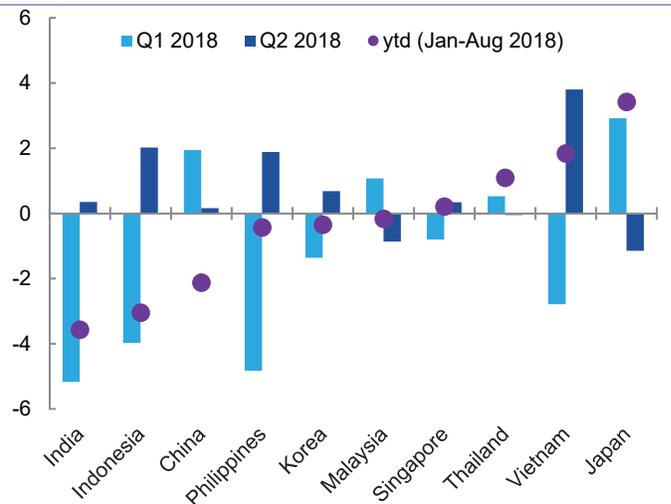
Pergerakan nilai Rupiah sejalan dengan pergerakan nilai mata uang negara-negara pasar berkembang lainnya, yang diwakili oleh Indeks Mata Uang Negara Pasar Berkembang (*Emerging Market Currency Indeks*, EMCI) JP Morgan²³, yang juga mengalami depresiasi yang jauh lebih besar di Triwulan ke-2 dibandingkan dengan Triwulan ke-1 (Gambar A.24). Namun demikian, fundamental Indonesia yang baik dan tanggapan kebijakan yang pro-aktif, menjadi cerminan atas penurunan nilai Rupiah di Triwulan ke-2 (sebelum devaluasi besar yang terjadi di Turki dan Argentina) yang tidak setajam EMCI, dengan EMCI yang menurun sebesar 8,7 persen. Secara keseluruhan, depresiasi EMCI di paruh pertama tahun 2018 adalah sebesar 8,0 persen, dibandingkan dengan penurunan Rupiah sebesar 7,3 persen selama periode yang sama. Kecenderungan penurunan EMCI ini berlanjut ke Triwulan ke-3 karena indeks mencapai rekor yang terendah pada minggu pertama bulan September, setelah turun sebesar 3,3 persen dalam satu hari di pertengahan Agustus karena jatuhnya Lira Turki.

Gambar A.24: Mata uang Rupiah dan mata uang negara-negara pasar berkembang terdepresiasi lebih lanjut terhadap Dolar AS di Triwulan ke-2
(indeks, 1 Januari 2018 = 100)



Sumber: JP Morgan; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.25: Meskipun menguat di Triwulan ke-2, Rupiah secara umum terdepresiasi di tahun 2018 secara efektif riil
(persen perubahan)



Sumber: Nilai Tukar Efektif Riil JP Morgan, berdasarkan IHK (2010 = 100)
Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili depresiasi.

Secara efektif riil, meskipun terjadi penguatan sementara di Triwulan ke-2, Rupiah terdepresiasi di 2018. Setelah terdepresiasi sebesar 4,0 persen di Triwulan ke-1, Rupiah mengalami penguatan nilai secara riil sebesar 2,0 persen di Triwulan ke-2 tahun 2018, salah satu yang tertinggi di kawasan (Gambar A.25)²⁴. Namun demikian, dibandingkan dengan nilainya di awal tahun, secara tahun-ke-tanggal (*year-to-date*) Rupiah terdepresiasi sebesar 3,0 persen.

Selisih antara imbal hasil obligasi Indonesia dan imbal hasil obligasi AS

Gejolak juga berimbas ke pasar obligasi, dengan imbal hasil obligasi Indonesia dan negara-negara pasar berkembang yang meningkat di Triwulan ke-2 (Gambar A.26). Setelah naik sebesar 30 basis poin di Triwulan ke-1, imbal hasil obligasi 10 tahun Indonesia naik sebesar 121 basis poin

²³ Mata uang yang termasuk dalam EMCI (*Emerging Markets Currency Indeks* - Indeks Mata Uang Negara Pasar Berkembang) adalah Real Brasil, Peso Meksiko, Peso Chili, Renminbi Tiongkok, Rupee India, Dolar Singapura, Lira Turki, Rubel Rusia, Forint Hungaria, dan Rand Afrika Selatan. Depresiasi tajam dalam EMCI ini sebagian disebabkan oleh jatuhnya lira Turki baru-baru ini.

²⁴ Berdasarkan J.P. Morgan REER (*Real Effective Exchange Rate*, Nilai Tukar Efektif Riil). Data dari Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan peningkatan yang sama dengan peningkatan nilai Rupiah sebesar 1,9 persen secara riil di Triwulan ke-2 setelah terdepresiasi sebesar 3,9 persen di Triwulan ke-1.

**melebar sejak awal
Triwulan ke-2**

di Triwulan ke-2, mencapai 8,2 persen, yang tertinggi sejak akhir 2016²⁵. Sementara itu, imbal hasil *Emerging Market Bond Indeks Plus* (EMBI +) naik sebesar 73 basis poin di Triwulan ke-2, lebih tinggi dari peningkatan sebesar 45 basis poin di Triwulan ke-1.

Imbal hasil yang lebih tinggi untuk obligasi Indonesia mencerminkan risiko mata uang yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko kredit (Gambar A.27), yang sejalan dengan peningkatan peringkat baru-baru ini²⁶ dari berbagai lembaga pemeringkat. Selisih (*spread*) yang lebih besar berlanjut ke Triwulan ke-3, mencapai selisih yang terbesar, sebesar 372 poin persentase di pertengahan bulan Agustus 2018, dan relatif tetap tidak berubah sejak waktu itu.

Gambar A.26: Selisih antara imbal hasil obligasi Indonesia dan negara-negara pasar berkembang dengan imbal hasil obligasi AS telah melebar secara signifikan



Sumber: CEIC, perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: EMBI+ adalah indeks Obligasi Negara Pasar Berkembang sampai dengan jatuh tempo dari JP Morgan

Gambar A.27: Selisih (*spread*) yang lebih lebar ini terutama disebabkan oleh meningkatnya risiko mata uang daripada risiko kredit



Sumber: CEIC, Perhitungan staf Bank Dunia

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya sebanyak tiga kali di Triwulan ke-2...

Setelah mempertahankan suku bunga acuan stabil selama tujuh bulan, BI menanggapi tekanan pada Rupiah dengan menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 100 poin secara kumulatif dalam tiga kali rapat dewan²⁷ menjadi 5,25 persen di Triwulan ke-2, dan 25 basis poin lainnya di bulan Agustus. Untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah serta menjaga inflasi yang relatif rendah adalah alasan untuk kenaikan suku bunga kebijakan ini²⁸.

Namun demikian, efek dari 7-day repo rate yang lebih tinggi ini belum berimbas pada tingkat bunga komersial yang lebih tinggi. Rata-rata tingkat suku bunga kredit masih turun sebesar 30 basis poin di Triwulan ke-2, meskipun lebih kecil dari penurunan di Triwulan ke-1 sebesar 140 basis poin. Sejalan dengan terus menurunnya tingkat suku bunga kredit, pertumbuhan kredit meningkat di Triwulan ke-2, rata-rata sebesar 9,6 persen yoy, lebih tinggi dari peningkatan di Triwulan ke-1 sebesar 8,1 persen. Kredit konsumsi bertumbuh paling tinggi, sebesar 11,3 persen (Gambar A.28), diikuti oleh pertumbuhan kredit modal kerja (10,4 persen) dan pertumbuhan kredit investasi (7,9 persen).

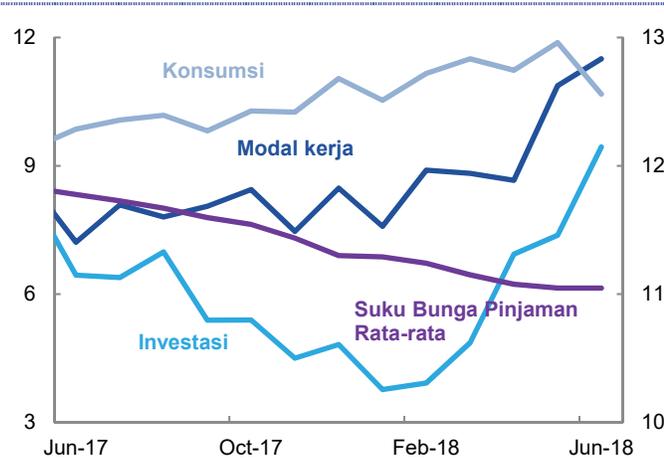
²⁵ Reuters (2018). Bank Sentral Indonesia yakin pada imbal hasil oleh karena telah melakukan penilaian terhadap jalur lintasan tingkat imbal hasil ini.

²⁶ Ada empat peningkatan peringkat terhadap utang negara Indonesia sejak Mei 2017, dari Standard and Poors, Fitch, Badan Pemeringkat Kredit Jepang (*Japan Credit Rating Agency*), dan Moody's.

²⁷ Termasuk satu rapat tambahan di akhir bulan Mei 2018 setelah gubernur Bank Indonesia yang baru, Perry Warjiyo, ditunjuk.

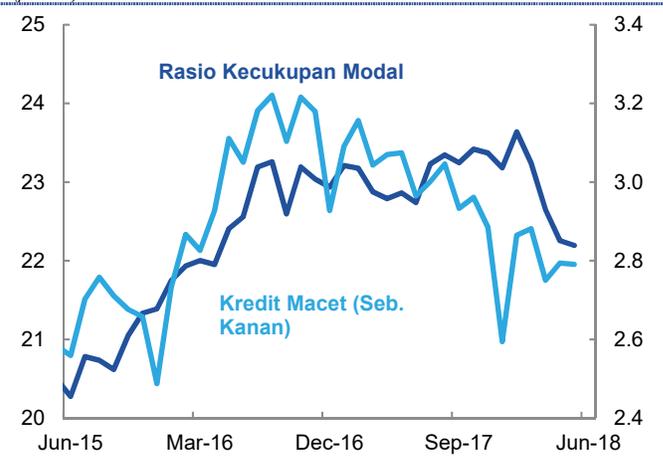
²⁸ Bank Indonesia (2018).

Gambar A.28: Pertumbuhan kredit meningkat sejalan dengan suku bunga pinjaman yang lebih rendah (pertumbuhan yoy, persen Seb. Kiri; persen, Seb. Kanan)



Sumber: CEIC; Bank Indonesia; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar A.29: Indikator perbankan menunjukkan bank dengan kapitalisasi yang baik dengan Kredit Macet (NPL) yang rendah (persen)



Sumber: CEIC; Bank Indonesia; Perhitungan staf Bank Dunia

...dan fundamental sektor perbankan tetap sehat

Sementara itu, sektor perbankan Indonesia tetap sehat di Triwulan ke-2. Kredit macet berada di rata-rata 2,8 persen, tidak berubah dari Triwulan ke-1 (Gambar A.29). Hasil ini melanjutkan tren penurunan secara keseluruhan sejak paruh kedua tahun 2016, yang mencerminkan peningkatan berkelanjutan dalam kualitas pinjaman. Rasio kecukupan modal turun menjadi 22,2 persen di Triwulan ke-2 dari 23,2 di Triwulan ke-1 tetapi tetap jauh di atas tingkat minimum Basel III yang dipersyaratkan, yang menunjukkan struktur modal sistem perbankan yang baik.

6. Peningkatan penerimaan yang tinggi mendukung belanja yang lebih tinggi, kebanyakan pada bantuan sosial dan subsidi

Peningkatan penerimaan yang tinggi mendukung peningkatan belanja

Kinerja penerimaan yang tinggi teramati di paruh pertama tahun 2018, sebagian karena faktor siklus dan sebagian karena reformasi yang sedang berlangsung. Sementara harga komoditas mendorong kinerja penerimaan, terdapat bukti adanya dampak dari reformasi, yakni kebijakan mengenai tembakau yang berkontribusi pada peningkatan penerimaan cukai sebesar dua digit serta kepatuhan yang lebih baik, yang membantu mendorong sebagian dari peningkatan pajak penghasilan. Penerimaan yang lebih baik mendukung peningkatan total belanja, yang bertumbuh hampir dua kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan di paruh pertama tahun 2017, terutama karena belanja sosial dan subsidi energi. Namun demikian, belanja modal terus mengalami kontraksi. Secara keseluruhan, peningkatan manajemen fiskal melalui target penerimaan yang realistis membantu memastikan bahwa revisi anggaran tidak diperlukan di tahun 2018. Defisit fiskal sebesar 2,1 persen dari PDB diproyeksikan untuk tahun 2018, 0,1 poin persentase lebih rendah dari target defisit pemerintah tahun 2018 sebesar 2,2 persen dari PDB.

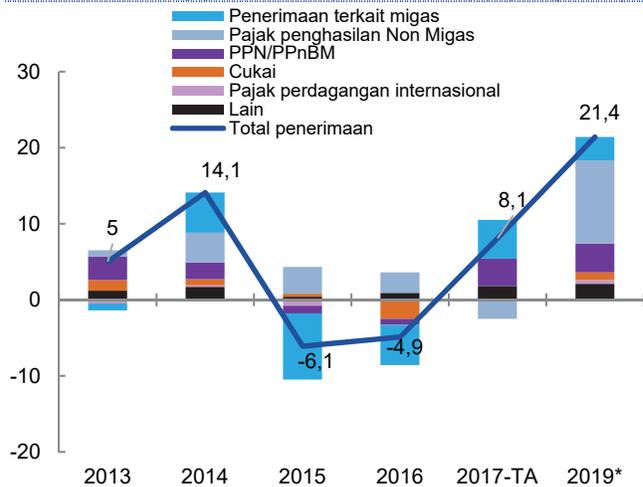
Total penerimaan meningkat dengan laju peningkatan yang paling tinggi dalam sepuluh tahun terakhir

Peningkatan total penerimaan dari tahun ke tahun hampir tiga kali lipat menjadi 21,4 persen yoy secara nominal dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu²⁹, laju peningkatan yang paling tinggi dalam sepuluh tahun³⁰ (Gambar A.30). Total penerimaan pajak meningkat sebesar 21,6 persen yoy dan berkontribusi sebesar 16,6 poin persentase terhadap pertumbuhan total penerimaan. Mirip dengan tren yang terlihat di awal tahun ini, pemungutan pajak penghasilan non-migas³¹ dan pajak pertambahan nilai (PPN)³² yang tinggi terus menjadi pendorong pemungutan pajak. Sementara itu, harga minyak global yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam penerimaan terkait minyak dan gas bumi³³, yang memberikan kontribusi sebesar 3,1 poin persentase terhadap peningkatan total penerimaan. Khususnya, pemungutan cukai bulan Januari-Juni membukukan peningkatan sebanyak dua digit untuk pertama kalinya sejak tahun 2013, memberikan kontribusi yang kecil namun positif untuk keseluruhan pemungutan penerimaan. Hasil yang positif ini terutama disebabkan oleh penyederhanaan klasifikasi tarif cukai tembakau, penerapan tarif cukai tembakau yang lebih tinggi di bulan Januari 2018, dan program penegakan cukai³⁴.

Peningkatan total belanja pemerintah terutama didorong oleh belanja sosial...

Secara nominal, total belanja pemerintah naik 5,7 persen yoy dari Januari hingga Juni 2018, hampir dua kali lipat tingkat pertumbuhan yang terlihat pada periode yang sama tahun lalu (Gambar A.31). Belanja bantuan sosial, salah satu pendorong utama pertumbuhan ini, melonjak sebesar 75 persen yoy, meningkat enam kali lipat dari periode yang sama tahun lalu, karena

Gambar A.30: Total penerimaan meningkat dengan laju tercepat dalam sepuluh tahun terakhir, didorong oleh pajak penghasilan dan PPN Non-Migas
(kontribusi terhadap pertumbuhan, Januari – Juni yoy, poin persentase)



Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Migas adalah singkatan dari minyak dan gas bumi, Non-Migas adalah singkatan dari non-minyak dan gas bumi; PPnBM adalah singkatan dari pajak penjualan barang mewah; "Lainnya" termasuk: pajak bumi dan bangunan, penerimaan pajak lainnya; penerimaan negara bukan pajak non-minyak dan gas bumi; penerimaan negara bukan pajak lainnya (laba perusahaan negara, penerimaan dari Badan Layanan Umum [BLU], dan penerimaan negara bukan pajak [PNBP]). AP-2017 berarti bahwa total penerimaan mengesampingkan biaya penyesuaian yang dipungut berdasarkan Program Amnesti Pajak. 2018* adalah perbandingan yoy terhadap AP-2017.

²⁹ Perbandingan ini tidak termasuk biaya penyesuaian dari Program Amnesti Pajak (AP) pada tahun 2017. Jika penerimaan AP dimasukkan, total penerimaan tahun-ke-tanggal (year-to-date) meningkat sebesar 16 persen yoy secara nominal dibandingkan dengan tahun 2017.

³⁰ Pemerintah telah mengumpulkan Rp 833 triliun pada akhir Juni, yang juga merupakan tingkat nominal tertinggi untuk periode yang sama dalam sepuluh tahun terakhir (penerimaan 2016-2017 tidak termasuk pemungutan dari AP).

³¹ Hal ini terutama didorong oleh pemungutan pajak pendapatan perusahaan yang tinggi. Pada akhir bulan Mei, pajak penghasilan dari impor (PPn Impor Pasal 22) dan pajak penghasilan perusahaan (Pasal 25/29) masing-masing meningkat sebesar 30,8 persen dan 29,3 persen yoy. PPn Impor Pasal 22 adalah pembayaran di muka kewajiban pajak penghasilan badan, yang dapat dilihat sebagai bagian dari pajak penghasilan badan untuk Indonesia.

³² PPN meningkat sebesar 16,8 persen yoy di akhir bulan Mei karena harga komoditas yang lebih tinggi. Sementara itu, permintaan domestik yang bergairah mendorong pertumbuhan PPN impor yang signifikan yang terlihat meningkat sebesar 25,6 persen yoy secara nominal dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

³³ Penerimaan terkait migas meningkat sebesar 32 persen yoy pada bulan Juni, di mana 28,3 poin persentase disumbangkan oleh PNBP Non-Migas.

³⁴ Peraturan tarif yang baru menetapkan bahwa rokok dikenai tarif cukai sebesar 11,4 persen. Sementara itu, Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi dimulai di Triwulan ke-3 2017 berhasil membongkar kasus rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai. Pengenaan cukai lebih lanjut terhadap *vaping liquid* (cairan vape) yang digunakan dalam rokok elektrik juga akan berlaku mulai 1 Oktober 2018.

pencairan yang lebih baik dari program bantuan sosial seperti premi bagi program kesehatan bersubsidi (PBI-JKN), PKH, dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Pencairan PKH dipercepat, karena BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial³⁵ secara bersama-sama memverifikasi dan memvalidasi data penerima PBI-JKN³⁶. Secara keseluruhan, pencairan belanja sosial (tidak termasuk subsidi) adalah sebesar 55,5 persen dari Anggaran tahun 2018, dibandingkan dengan rata-rata 43,1 persen dari tahun 2014-17. Meskipun demikian, terdapat gangguan kecil dalam pencairan BPNT karena adanya tantangan yang terkait kesiapan pemerintah daerah, verifikasi 2,4 juta penerima manfaat baru, dan terbatasnya ketersediaan e-warung di daerah-daerah terpencil³⁷.

Belanja pegawai juga meningkat karena pembayaran tunjangan untuk guru, pegawai honorer, dan pensiunan untuk Hari Raya Lebaran, meningkatkan konsumsi pemerintah secara keseluruhan (lihat bagian A.1). Belanja barang juga meningkat karena pengadaan awal barang dan jasa pemerintah, dan belanja yang terkait dengan pemilihan kepala daerah di bulan April serta Asian Games di bulan Agustus.

...dan subsidi energi, khususnya pembayaran tunggakan

Subsidi energi, terutama dari pembayaran tunggakan, juga mendorong peningkatan total pengeluaran secara keseluruhan. Subsidi untuk bbm dan listrik secara *yoy* meningkat untuk pertama kalinya sejak tahun 2014, masing-masing sebesar 13,6 persen dan 8,8 persen, setelah terjadinya penurunan secara berturut-turut (Gambar A.31). Hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah saat ini untuk mempertahankan harga bbm dan listrik konstan hingga akhir 2019 meskipun harga minyak mentah lebih tinggi, serta adanya permasalahan dalam penetapan penerima manfaat subsidi LPG 3 kg³⁸. Selain itu, pemerintah juga merealisasikan 100 persen pembayaran tunggakan jangka pendek sebesar Rp 12,3 triliun dan Rp 3,3 triliun masing-masing untuk subsidi bbm dan listrik bagi Pertamina dan PLN, pada H1 2018. Pembayaran tunggakan ini tercatat dalam kategori “pengeluaran lainnya”.

Belanja modal terus mengalami kontraksi, dan pelaksanaan pencairan tetap lamban

Belanja barang modal, di sisi lain, mengalami kontraksi sebesar 14,2 persen di paruh pertama tahun 2018, penurunan secara *yoy* yang terbesar sejak tahun 2014. Hanya seperlima dari alokasi belanja modal tahun 2018 yang telah dicairkan di akhir Juni (Gambar A.32). Pencairan yang lamban ini disebabkan oleh keterlambatan proses pembebasan lahan beberapa proyek infrastruktur³⁹, serta antisipasi terhadap peraturan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang baru (Perpres 16/2018) mulai bulan Juli 2018⁴⁰. Namun demikian, pencairan yang lebih lambat mungkin tidak berarti keterlambatan yang sama dalam kemajuan fisik infrastruktur proyek, karena anggaran Pemerintah Pusat hanya membiayai sekitar sepertiga dari total biaya investasi infrastruktur. Selain itu, kemajuan fisik proyek infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaporkan lebih cepat daripada pencairan keuangannya⁴¹. Pencairan belanja modal diperkirakan akan meningkat di paruh kedua tahun

³⁵ Kontan (May 02, 2018).

³⁶ Semua penerima PKH juga merupakan penerima PBI-JKN. Lihat Tirto.id (15 Agustus 2018).

³⁷ Merdeka (April, 2018).

³⁸ Kekhawatiran terhadap validitas data penerima manfaat untuk LPG 3 kg telah menghambat penetapan target subsidi LPG dan menunda pelaksanaan sistem distribusi secara tertutup. Sebagai langkah untuk mengurangi kebocoran subsidi LPG 3 kg, mulai 1 Juli 2018, pemerintah mengizinkan peredaran varian baru tabung LPG 3 kg (varian non-subsidi) untuk didistribusikan ke pasar, dengan harapan lebih banyak orang memilih untuk varian baru ini daripada LPG 3 kg dengan tabung yang berwarna hijau. Lihat Kumparan (24 Juni 2018).

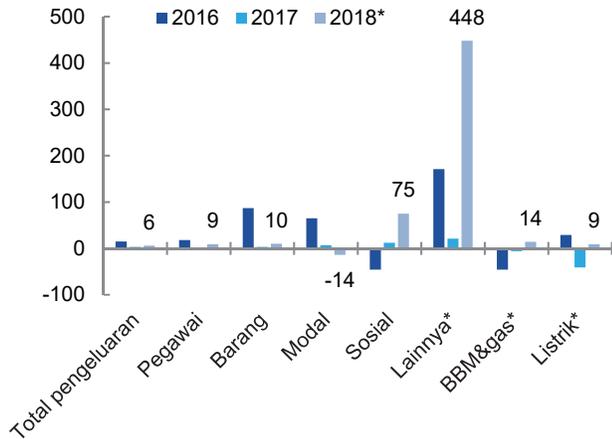
³⁹ Lihat Detikfinance (24 April 2018).

⁴⁰ APBN Kita (Juli 2018).

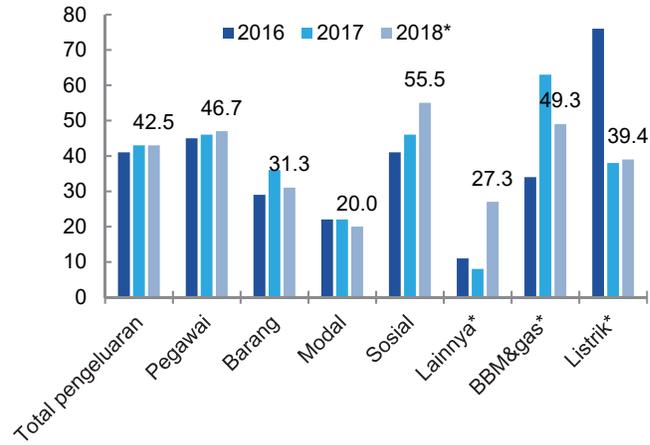
⁴¹ Lihat PU-net (5 Juli 2018). Agar kontraktor proyek memenuhi syarat untuk menagihkan pembayaran, mereka harus memenuhi target pembangunan fisik tertentu. Oleh karena itu, kontraktor cenderung mempercepat pembangunan fisik proyek, tetapi hanya menagihkan pembayaran mendekati akhir masa proyek (Studi Pelacakan DIPA, 2009).

2018, karena pengadaan bagi lebih dari 80 persen dari anggaran yang dianggarkan telah dilakukan⁴².

Gambar A.31: Belanja sosial dan subsidi bahan bakar terus mendorong peningkatan belanja yang lebih tinggi
(peningkatan pengeluaran Januari-Juni yoy, persen)



Gambar A.32: Pencairan subsidi belanja sosial, belanja pegawai, dan subsidi listrik lebih tinggi
(pengeluaran Januari-Juni sebagai persen anggaran)



Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: * Bahan bakar & gas untuk 2018 bukanlah angka yang diterbitkan oleh APBN Kita dari Pemerintah, karena tidak termasuk pembayaran tunggakan yang ditambahkan kembali ke kategori belanja “Lainnya” sesuai dengan klasifikasi Anggaran. * Lainnya mulai 2017 dan seterusnya termasuk pembayaran tunggakan dari subsidi energi sebelumnya.

Pemerintah berada di jalur yang benar untuk memenuhi target defisit anggaran untuk tahun 2018

Dengan penerimaan yang lebih baik dari yang diperkirakan, Pemerintah berharap untuk mencatatkan defisit fiskal sebesar 2,1 persen dari PDB pada tahun 2018, lebih rendah dari target sebesar 2,2 persen dari PDB dan defisit tahun 2017 sebesar 2,5 persen dari PDB. Bank Dunia juga mempertahankan proyeksi defisit fiskal sebesar 2,1 persen dari PDB pada tahun 2018 tetapi dengan asumsi yang kurang optimis mengenai penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran total yang lebih rendah (97 persen), mengingat lambatnya pencairan belanja modal sejauh ini. Secara keseluruhan, kebutuhan pembiayaan utang Pemerintah mencapai Rp 176,2 triliun di akhir Juni 2018, 18,8 persen lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah telah mengurangi rencana penerbitan obligasi dalam negeri dengan mendapatkan pinjaman multilateral tambahan, yang dibuktikan dengan pergeseran dari penerbitan surat berharga (- Rp 26,5 triliun) ke pinjaman luar negeri (+ Rp 14,7 triliun) di paruh pertama tahun 2018⁴³. Secara keseluruhan, kebutuhan pinjaman yang lebih rendah menyiratkan pasokan aset berdenominasi Rupiah yang lebih terbatas, yang, bersama dengan upaya untuk merangsang pembelian obligasi dalam negeri oleh masyarakat, bertujuan untuk membatasi kebutuhan arus masuk portofolio asing. Sikap fiskal dan manajemen utang Pemerintah yang berhati-hati ini dibenarkan dengan mempertimbangkan pengetatan kondisi global dan gejolak di negara-negara pasar berkembang.

Secara keseluruhan, stok total utang pemerintah pusat hingga Juni 2018 mencapai Rp 4.227,8 triliun atau 29,8 persen dari PDB, relatif tidak berubah dari akhir Maret 2018 dan jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan sebesar 60 persen. 57 persen utang dalam mata uang lokal dan

⁴² Lihat APBN Kita (Juli 2018). Selain itu, 90 persen dan 85 persen dari belanja modal yang dianggarkan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan, masing-masing, telah mengalami kontraksi. Kementerian-kementerian tersebut bertanggungjawab terhadap 54 persen dari total belanja modal Kementerian Lini (Laporan Anggaran Semester Pertama Kementerian Keuangan, 2018).

⁴³ Menurut Kemenkeu (2018).

10,1 persen akan jatuh tempo dalam jangka pendek⁴⁴, menurunkan paparan terhadap risiko nilai tukar.

7. Kondisi pasar tenaga kerja tetap menggembirakan dengan tingkat tenaga kerja yang bekerja mencapai tingkat yang tertinggi selama dua dekade

Tingkat tenaga kerja yang bekerja naik hingga 65,7 persen pada Februari 2018, mencapai rekor yang tertinggi selama dua dekade

Tingkat lapangan kerja Indonesia secara keseluruhan naik ke rekor tertinggi selama dua dekade sebesar 65,7 persen pada Februari 2018, naik dari 65,3 persen pada Februari 2017⁴⁵. Hal ini sesuai dengan tingkat pengangguran yang mencapai rekor terendah selama 18 tahun sebesar 5,1 persen pada Februari 2018, turun dari 5,3 persen pada Februari 2017⁴⁶. Lapangan pekerjaan meningkat sebesar 2 persen selama periode yang sama. Sementara itu, angkatan kerja secara luas bertumbuh sebesar 1,8 persen dan populasi usia kerja bertumbuh sebesar 1,6 persen selama periode yang sama (Gambar A.33)⁴⁷. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 69,0 persen pada Februari 2017 menjadi 69,2 persen pada Februari 2018 dan tidak berubah secara signifikan selama 18 tahun terakhir dimana TPAK pada tahun 2000 sebesar 69,3 persen. Setelah terjadinya peningkatan nominal upah bulanan yang tertinggi bagi karyawan sejak tahun 2001 sebesar 23,9 persen di bulan Februari 2017, peningkatan nominal upah bulanan mengalami peningkatan *yo-y* negatif sebesar -1,8 persen di bulan Februari 2018, sebagian karena adanya efek dasar yang tinggi dan perubahan dalam kuesioner Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)⁴⁸.

Penciptaan lapangan kerja mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun lalu, tetapi masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lima dan dua puluh tahun terakhir

Terdapat 127,1 juta orang yang bekerja pada bulan Februari 2018, dengan jumlah pekerja yang dipekerjakan bertambah sebanyak 2,5 juta (2,0 persen) dari tahun sebelumnya. Meskipun angka ini lebih tinggi dari rata-rata jangka panjang (1999-2018) sebesar 1.969.769 orang, penambahan pekerja pada bulan Februari 2018 menandakan adanya perlambatan dalam penciptaan lapangan kerja kembali ke kecepatan yang lebih normal dibandingkan dengan bulan Februari 2017, ketika jumlah lapangan kerja meningkat sebesar 3.891.152 orang (3,2 persen), pertumbuhan yang tertinggi sejak tahun 2011⁴⁹. Sektor restoran dan perhotelan serta manufaktur mencatat jumlah absolut lapangan kerja baru yang terbesar, mencatat masing-masing 1 juta dan 830.000 lapangan kerja baru. Sektor utilitas, restoran dan perhotelan, serta sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan tertinggi dari tingkat pekerjaan, masing-masing sebesar 18,2 persen, 14,4 persen, dan 17,7 persen.

Pekerjaan paruh waktu meningkat, yang dapat

Meskipun tingkat pengangguran secara luas mencapai rekor terendah dalam 18 tahun ini pada Februari 2018, pangsa pekerja setengah menganggur dari total tenaga kerja, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, sedikit meningkat menjadi 31,5 persen pada Februari 2018

⁴⁴ Setelah bulan Desember 2017, Pemerintah memproyeksikan bahwa 10,1, 25,4, dan 39,8 persen dari total utang pemerintah masing-masing akan jatuh tempo dalam 1, 3, dan 5 tahun. DJPPR (2018).

⁴⁵ Tingkat tenaga kerja yang bekerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dibagi dengan total penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih). Nilai yang tercatat cenderung lebih tinggi pada Sakernas bulan Februari dibandingkan dengan Sakernas bulan Agustus.

⁴⁶ Karena kurangnya data untuk tahun 1998-99, analisis untuk tingkat pengangguran hanya dapat dilakukan dari tahun 2000 hingga 2018, bukan dari tahun 1998.

⁴⁷ Sesuai dengan ketentuan BPS, "usia kerja" didefinisikan sebagai siapa pun yang berusia 15 tahun atau lebih.

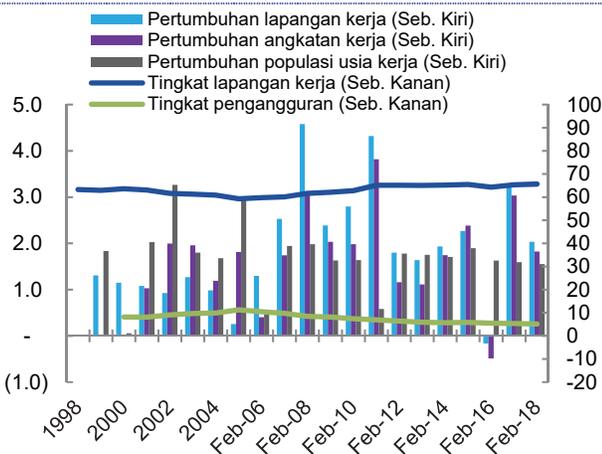
⁴⁸ Sejak tahun 2015, ada beberapa perubahan dalam sampel, metodologi, dan kuesioner dari Sakernas. Perubahan ukuran sampel: Pada bulan Agustus 2016, ukuran sampel berkurang dari 200.000 rumah tangga pada bulan Agustus 2015 menjadi 50.000 rumah tangga. Karena stratifikasi sampel didasarkan pada klasifikasi industri dan lokasi, dan bukan pada indeks kekayaan, perubahan ukuran sampel dapat mempengaruhi data mengenai upah. Perubahan kuesioner: Pada bulan Agustus 2016, pertanyaan mengenai penghasilan adalah total penghasilan, tetapi pada bulan Februari 2017, pertanyaan mengenai penghasilan dipecah menjadi (1) gaji dan tunjangan, (2) uang lembur, (3) tunjangan transportasi dan uang makan. Pada bulan Agustus 2017, pertanyaan mengenai penghasilan dipecah menjadi (1) gaji dan tunjangan, (2) uang lembur, transportasi dan uang makan. Pada bulan Februari 2018, pertanyaan mengenai penghasilan diubah lagi menjadi total penghasilan. Perubahan ini mungkin memengaruhi data mengenai upah. Perubahan metodologi: Pada tahun 2015-2016, Badan Pusat Statistik Indonesia menggunakan panel blok sensus, sementara mulai tahun 2017, telah menggunakan panel rumah tangga. Karena adanya semua perubahan ini, penggunaan beberapa data Sakernas dalam beberapa periode harus diperlakukan dengan berhati-hati.

⁴⁹ Rata-rata penambahan pekerja per tahun sejak tahun 1999, tidak termasuk bulan Februari 2017, adalah 1.868.644 orang.

menunjukkan perubahan sifat pekerjaan dan preferensi pekerja untuk jenis pekerjaan yang lebih fleksibel

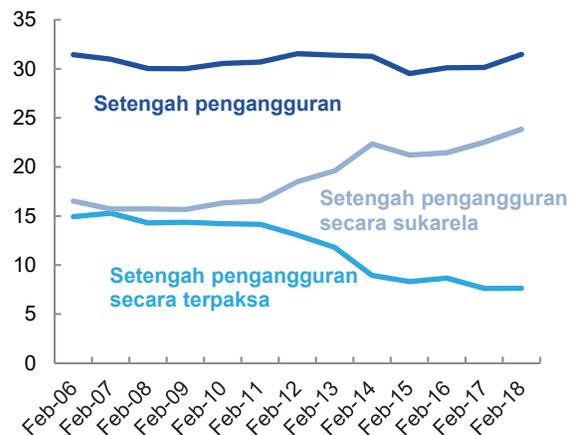
dari 30,1 persen pada bulan Februari 2017. Tren pangsa pekerja setengah menganggur sepanjang decade ini adalah sekitar 31 persen; namun demikian, sejak tahun 2011, terdapat peningkatan yang signifikan dan terus-menerus dalam persentase pengangguran sukarela (“paruh waktu”) terhadap setengah pengangguran yang terpaksa. Pangsa setengah pengangguran sukarela dari total lapangan kerja meningkat dari 16,5 persen pada tahun 2011 menjadi 23,8 persen pada tahun 2017, sementara pangsa setengah pengangguran yang terpaksa turun hampir setengahnya, dari 14,2 persen menjadi 7,6 persen (Gambar A.34). Ini mungkin menunjukkan sifat dari pekerjaan yang berubah, termasuk pekerjaan kontraktor independen yang muncul di tengah-tengah kebangkitan *gig economy*⁵⁰, dan para pekerja lebih memilih untuk bekerja dengan pola kerja yang lebih fleksibel. Kondisi ekonomi yang membaik juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan para pekerja lebih memilih untuk bekerja paruh waktu dibandingkan dengan pekerjaan penuh waktu.

Gambar A.33: Tingkat lapangan kerja (tingkat pengangguran) mencapai rekor tertinggi (terendah) dalam dua dekade terakhir di bulan Februari 2018
(tingkat lapangan kerja, tingkat pengangguran, pertumbuhan lapangan kerja, angkatan kerja, dan penduduk usia kerja, poin persentase)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas

Gambar A.34: Terjadi peningkatan yang signifikan dan berlanjut dalam persentase setengah pengangguran secara sukarela dibandingkan dengan setengah pengangguran secara terpaksa
(tingkat setengah pengangguran, tingkat setengah pengangguran secara terpaksa, tingkat setengah pengangguran secara sukarela, persen)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas

Tren jangka panjang dalam ukuran dekade dari partisipasi angkatan kerja Indonesia menunjukkan tanda “penuaan” angkatan kerja ...

Secara absolut, terdapat 2,395,889 juta pekerja baru yang memasuki angkatan kerja selama setahun terakhir ini, dan 22,5 juta pekerja baru selama dekade terakhir. Peningkatan sebesar 20,2 persen dalam angkatan kerja ini selama satu dekade terakhir merupakan lonjakan besarnya potensi ekonomi dari sisi pasokan pekerja.

Namun demikian, terdapat tanda “penuaan” di antara para tenaga kerja pendatang baru ini, yang tercermin dalam perubahan pangsa tenaga kerja berdasarkan kelompok usia. Pangsa kaum muda dalam angkatan kerja (mereka yang berusia antara 20 dan 39 tahun) telah menurun dari 52,2 persen dalam satu dekade terakhir menjadi 47,8 pada bulan Februari 2018, sementara pangsa dari pekerja yang lebih tua (40 tahun ke atas) meningkat, dari 40,3 persen menjadi 47,5 persen (Gambar A.35). Tenaga kerja yang menua memiliki implikasi positif dan negatif bagi perekonomian, seperti memiliki pekerja yang lebih matang dan berpengalaman, tetapi juga tingkat keterampilan yang ketinggalan jaman yang lebih tinggi dan kesehatan yang lebih buruk. Kebijakan untuk mendorong peningkatan keterampilan bagi pekerja yang lebih tua dan untuk merestrukturisasi perekonomian ke sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi dan padat

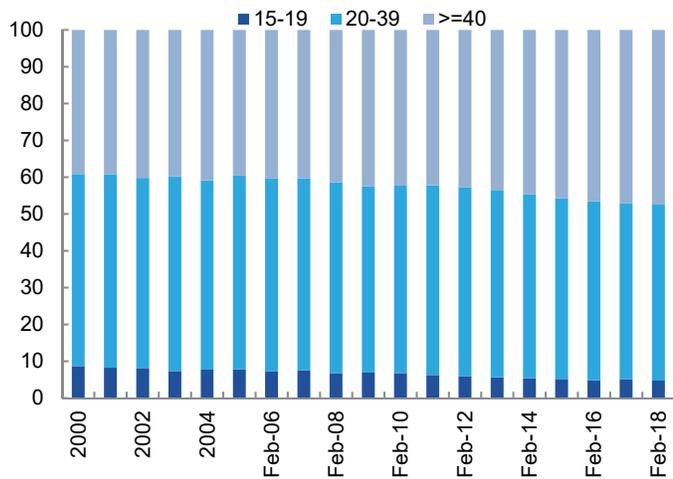
⁵⁰ Dalam *gig economy*, kontraktor independen dan pekerja lepas bekerja untuk sementara dengan fleksibilitas yang tinggi.

modal harus dipertimbangkan untuk mengurangi dampak perlambatan pertumbuhan tenaga kerja ini.

...sementara bukti yang lebih baru menunjukkan adanya tingkat keterampilan yang rendah di antara para pendatang baru di pasar tenaga kerja.

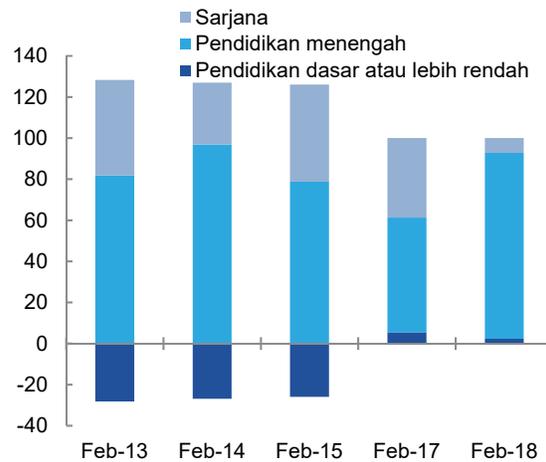
Selain angkatan kerja yang menua, data terbaru menunjukkan bahwa tenaga kerja baru yang memasuki pasar tenaga kerja memiliki tingkat keterampilan yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan pangsa tenaga kerja baru dengan pendidikan sarjana telah menyusut, dari 39 persen pada bulan Februari 2017 menjadi 7 persen pada bulan Februari 2018 (Gambar A.36). Sementara itu, pangsa tenaga kerja baru dengan pendidikan menengah meningkat, dari 56 persen pada bulan Februari 2017 menjadi 90 persen pada bulan Februari 2018. Selama beberapa tahun terakhir, telah ada arus masuk bersih dari tenaga kerja baru dengan pendidikan dasar atau lebih rendah, membalikkan tren tiga tahun terakhir ini (2013-15) dari arus keluar bersih.

Gambar A.35: Terdapat tanda “penuaan” di antara angkatan kerja
(pangsa angkatan kerja menurut kelompok usia, persen)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas

Gambar A.36: Tahun ini, tingkat pendidikan para pekerja baru di pasar tenaga kerja membalikkan tren selama lima tahun ini ke tenaga kerja yang lebih berpendidikan⁵¹
(pangsa dari tenaga kerja baru berdasarkan tingkat pendidikan, persen)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas

Komposisi pekerja perempuan telah bergeser dari pekerja keluarga yang tidak dibayar menjadi karyawan yang dibayar.

Dalam hal kesetaraan gender di pasar tenaga kerja, terdapat kesenjangan yang menetap, dan bahkan semakin melebar, antara upah karyawan laki-laki dan perempuan, meskipun rasio upah karyawan laki-laki dan perempuan meningkat. Pada bulan Februari 2018, upah bulanan rata-rata untuk karyawan perempuan dan laki-laki masing-masing adalah Rp 2.213.282 dan Rp 2.910.301. Sejak tahun 2001, rata-rata upah karyawan laki-laki sekitar 25 persen lebih tinggi daripada upah karyawan perempuan.

Karena pangsa perempuan setengah menganggur lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, perbedaan antara upah rata-rata karyawan laki-laki dan perempuan sebagian karena perbedaan dalam pangsa setengah menganggur tersebut. Namun demikian, jika kita merinci upah untuk karyawan purna waktu dan karyawan setengah menganggur, masih ada perbedaan upah antara karyawan laki-laki dan perempuan, dan perbedaan tersebut signifikan. Pada bulan Februari 2018, upah rata-rata untuk karyawan laki-laki purna waktu adalah Rp 2.984.526 sementara upah rata-rata untuk karyawan perempuan purna waktu adalah Rp 2,380,790.

⁵¹ Kami tidak memasukkan pengamatan tahun 2016 karena adanya masalah kualitas data yang mencurigakan yang membuat variabel yang dianalisa terlihat tidak menentu relatif terhadap tren. Dimasukkannya pengamatan akan membingungkan pembaca.

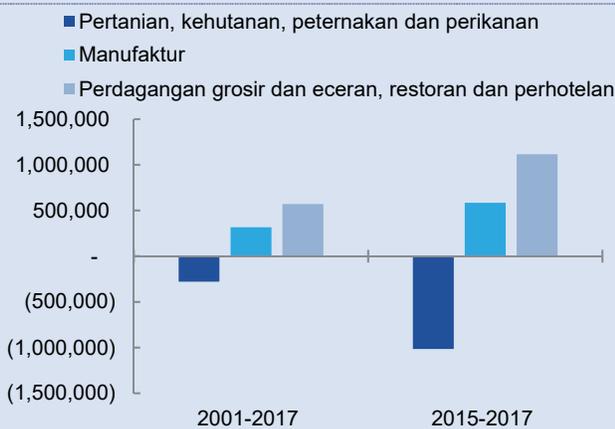
Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) sedikit meningkat dari 55,0 persen pada bulan Februari 2017 menjadi 55,4 persen pada bulan Februari 2018. Meskipun TPAKP telah mencapai tingkatnya yang tertinggi sejak tahun 2000, TPAKP tetap relatif jalan di tempat, dengan hanya dua poin persentase peningkatan selama 18 tahun terakhir. TPAKP Indonesia termasuk yang terendah di kawasan. Suatu penelitian yang menggunakan data panel dari tahun 1993 hingga 2014 untuk Indonesia menunjukkan bahwa perempuan tanpa akses langsung terhadap sarana penitipan anak lebih dibatasi untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja dan ada biaya ekonomi untuk hal ini karena adanya penghasilan yang hilang dan peralihan ke pekerjaan yang bergaji lebih rendah setelah melahirkan⁵².

Pada catatan yang lebih positif, sejak tahun 2000, komposisi pekerjaan perempuan telah bergeser dari pekerjaan keluarga yang tidak dibayar ke karyawan yang bergaji, dengan pangsa karyawan perempuan secara total meningkat dari 28 persen pada tahun 2000 menjadi 35 persen pada tahun 2018, dan pangsa perempuan pekerja keluarga yang tidak dibayar menurun dari 39 persen pada tahun 2000 menjadi 26 persen pada tahun 2018.

Kotak A.5: Percepatan transformasi struktural dan kebangkitan lapangan kerja manufaktur?

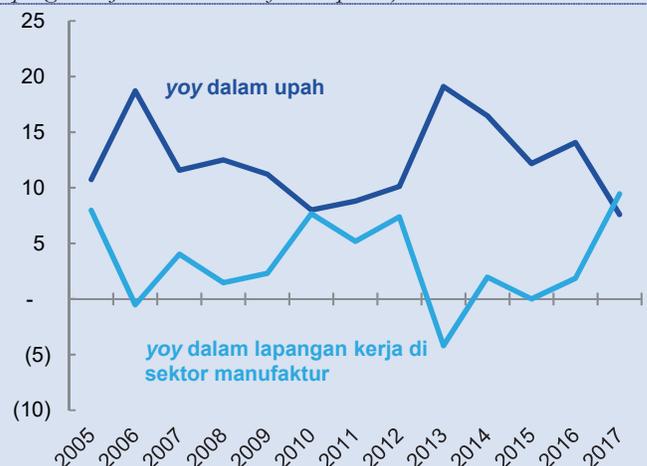
Komposisi sektoral penciptaan lapangan kerja telah berubah selama tiga tahun terakhir, dengan pekerjaan yang bergeser dari sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan dan masuk ke sektor perdagangan dan grosir, restoran, dan perhotelan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Gambar A.37). Selama tiga tahun terakhir ini, rata-rata satu juta lapangan pekerjaan hilang di sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, sementara 1,1 juta lapangan pekerjaan diciptakan di sektor perdagangan, restoran, dan perhotelan. Pergerakan ini secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan tren jangka panjang sejak tahun 2001, di mana rata-rata lapangan pekerjaan yang hilang setiap tahun hanya sebesar 279.785 lapangan pekerjaan di sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan dan 569.680 pekerjaan yang diciptakan rata-rata setiap tahun di sektor perdagangan, restoran, dan perhotelan. Dalam hal produktivitas tenaga kerja (PDB sektoral per pekerja), transformasi sektoral ini adalah merupakan tanda positif, karena sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan telah menjadi “hambatan produktivitas” pada perekonomian: Meskipun merupakan sekitar sepertiga dari total lapangan kerja, produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan hanya seperempat dari produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur dan setengah dari produktivitas tenaga kerja di sektor jasa.

Gambar A.37: Transformasi struktural seperti tiga tahun terakhir ini belum pernah terjadi sebelumnya
(rata-rata penciptaan lapangan kerja, orang)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas

Gambar A.38: Kenaikan upah minimum menghambat penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur
(pertumbuhan yoy dalam upah minimum, pertumbuhan yoy dalam lapangan kerja di sektor manufaktur, persen)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas, APINDO (upah minimum))

⁵² Halim, D. (2017).

Selama tiga tahun terakhir, elastisitas lapangan kerja yang tersirat¹ di sektor manufaktur secara signifikan lebih tinggi (1.2) dibandingkan dengan tren jangka panjang (2000-17) sebesar 0,5 dan periode pra-krisis (1993-1996) sebesar 0,7². Alasan awalnya termasuk peningkatan upah minimum yang lebih rendah. Dengan menggunakan data tahun 2005-17, korelasi antara pertumbuhan yoy dari upah minimum dan dalam lapangan pekerjaan di sektor manufaktur adalah -0,86, yang berarti bahwa peningkatan upah minimum menghambat penciptaan lapangan kerja di sektor ini (Gambar A.38). Sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran, yang juga diwajibkan untuk mematuhi kebijakan upah minimum, juga telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam elastisitas lapangan kerja dalam tiga tahun terakhir menjadi 0,8, dua kali lipat dari rata-rata jangka panjangnya (2000– 17) sebesar 0,4. Sementara itu, pertumbuhan di sektor keuangan, bisnis, asuransi, dan real estat secara konsisten mendorong penciptaan lapangan kerja (atau “*pro-job*”) dengan elastisitas lapangan kerja jangka panjang (2000-17) sebesar 1,4. Pertumbuhan di sektor keuangan, bisnis, asuransi, dan real estat juga menjadi sumber lapangan kerja formal bagi perempuan dan pemuda³.

¹ Elastisitas lapangan kerja didefinisikan sebagai persentase peningkatan persentase dalam lapangan kerja untuk satu peningkatan poin persentase dalam PDB.
² Estimasi elastisitas lapangan kerja titik ke titik sensitif terhadap pilihan jangka waktu karena fluktuasi normal dari tahun ke tahun.
³ Menggunakan model regresi *log-on-log*, mengikuti Kapsos (2005), analisis elastisitas lapangan kerja (*employment elasticity*, EE) dilakukan di tingkat nasional dan regional, menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Definisi formal didasarkan pada definisi yang disederhanakan dari BPS-Indonesia, di mana pekerja formal termasuk karyawan dan pengusaha yang dibantu oleh pekerja tetap. Dalam hal kelompok usia, usia 15 hingga 24 tahun didefinisikan sebagai pekerja muda; 25–64, dewasa; dan 65 ke atas, tua. Sumber: Kapsos, Steven. 2015. *The Employment Intensity of Growth: Trends and Macroeconomic Determinants*. ILO

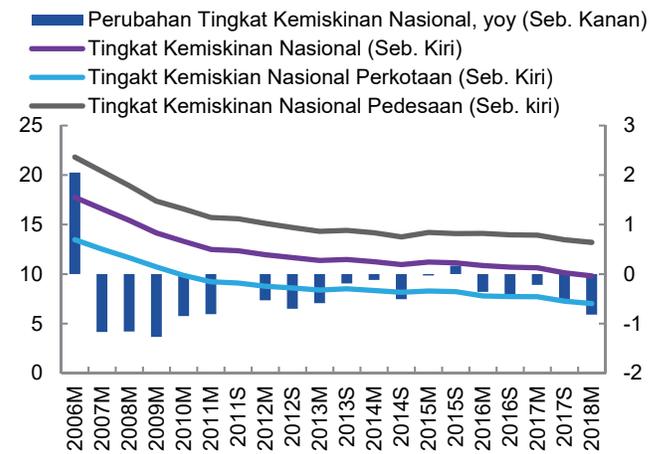
8. Tingkat kemiskinan Indonesia menurun menjadi satu digit untuk pertama kalinya

Tingkat kemiskinan tercatat turun menjadi satu digit untuk pertama kalinya di bulan Maret 2018

Tingkat kemiskinan Indonesia tercatat turun menjadi satu digit untuk pertama kalinya. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat kemiskinan turun dari 10,6 persen pada Maret 2017 menjadi 9,8 persen pada Maret 2018. Penurunan tersebut merupakan penurunan *yoy* terbesar sejak Maret 2011, dan terbesar kedua sejak saat terjadinya penurunan tingkat kemiskinan yang sangat signifikan pada akhir tahun 2000an (Gambar A.39). Secara absolut, jumlah masyarakat miskin berkurang dari 27,8 juta pada Maret 2017 menjadi 26,0 juta pada Maret 2018. Kesenjangan kemiskinan⁵³ juga turun dari 2,5 persen pada Maret 2017 menjadi 2,4 persen pada Maret 2018⁵⁴. Turunnya tingkat kemiskinan dan turunnya kesenjangan kemiskinan tersebut sebagian dihasilkan dari perluasan program-program bantuan sosial baru-baru ini seperti PKH, yang telah mengurangi kemungkinan rumah tangga rentan untuk kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

Penurunan tingkat kemiskinan tersebut juga disebabkan oleh kondisi pasar tenaga kerja yang menunjang (Lihat Bagian A7). Tingkat lapangan kerja mencapai tingkat tertinggi dalam dua

Gambar A.39: Tingkat kemiskinan Maret 2018 mengalami penurunan *yoy* terbesar sejak Maret 2011 (*tingkat kemiskinan, persen, Seb. Kiri; perubahan dalam tingkat kemiskinan, poin persentase, Seb. Kanan*)



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas

⁵³ Kesenjangan kemiskinan mengacu pada sejauh mana pengeluaran rumah tangga miskin berada di bawah garis kemiskinan. Ini dinyatakan sebagai persentase garis kemiskinan.

⁵⁴ Kesenjangan kemiskinan menggambarkan biaya minimum rata-rata untuk memberantas kemiskinan, sehingga menurunnya kesenjangan kemiskinan berarti bahwa, secara rata-rata, masyarakat miskin pada bulan Maret 2018 lebih kurang miskin dibandingkan masyarakat miskin pada bulan Maret 2017. Ini berarti bahwa lebih mudah/lebih murah, untuk memberantas kemiskinan pada Maret 2018 dibandingkan dengan bulan Maret 2017.

decade, sebesar 65,7 persen, pada bulan Februari, yang dibarengi dengan turunnya tingkat pengangguran ke tingkat yang terendah dalam 18 tahun terakhir, sebesar 5,1 persen. Selain itu, 70 persen dari lapangan kerja baru yang tercipta adalah di sektor restoran, perhotelan, dan manufaktur, yang diketahui mempekerjakan pekerja berketerampilan rendah atau tidak terampil, yang biasanya berada di bagian terbawah dari distribusi penghasilan.

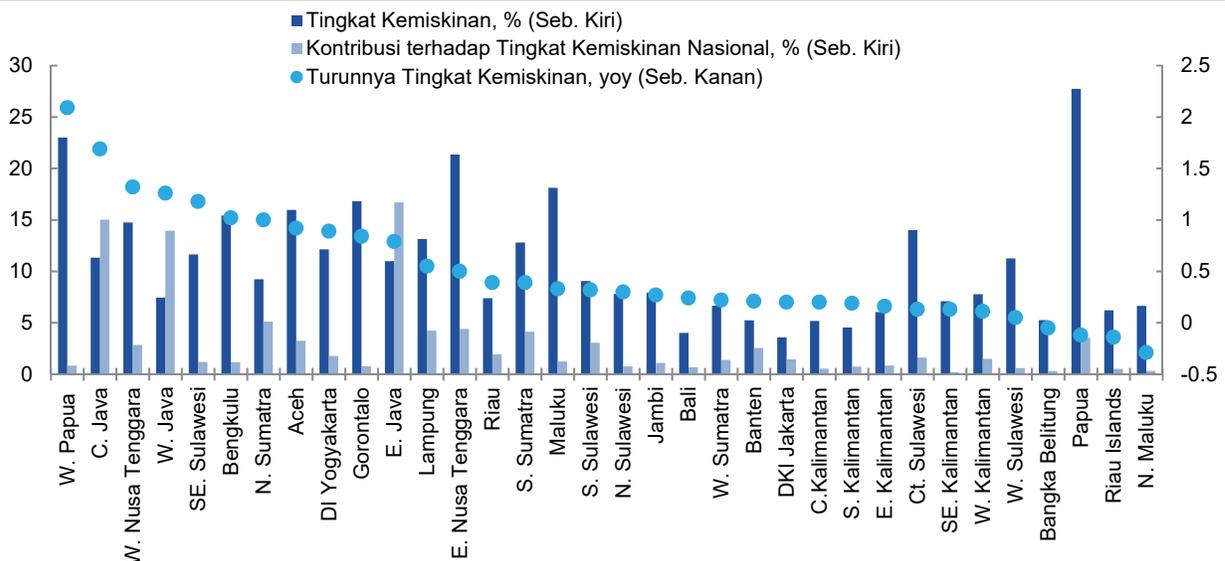
Kemiskinan sebagian besar masih merupakan fenomena daerah pedesaan tetapi pangsa daerah perkotaan meningkat

Kemiskinan sebagian besar masih merupakan fenomena pedesaan, baik secara absolut maupun dalam hal tingkat kemiskinan. Pada bulan Maret 2018, 61,9 persen penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan; dan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan adalah 13,2 persen, hampir dua kali lipat dari 7,0 persen di daerah perkotaan. Dan juga, dari 1,8 juta penduduk yang terangkat dari kemiskinan antara bulan Maret 2017 dan bulan Maret 2018, 70,9 persen tinggal di daerah pedesaan. Kemiskinan lebih dominan di daerah pedesaan karena masyarakat pedesaan memiliki akses yang relatif terbatas terhadap peluang yang menghasilkan pendapatan, terhadap pasar, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dll., jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Meskipun kemiskinan sebagian besar adalah fenomena pedesaan, pangsa daerah perkotaan dalam kemiskinan secara bertahap meningkat – dari 34,7 persen pada bulan Maret 2002 menjadi 38,1 persen pada bulan Maret 2018, terutama karena urbanisasi.

Sementara tingkat kemiskinan nasional menurun, beberapa provinsi mengalami peningkatan tingkat kemiskinan

Meskipun terdapat penurunan tingkat kemiskinan yang substansial di tingkat nasional, penurunan ini tidak seragam di seluruh Indonesia (Gambar A.40). Bahkan, tingkat kemiskinan memburuk di empat provinsi: Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Papua. Penurunan tingkat kemiskinan yoy terbesar hingga Maret 2018 terjadi di Papua Barat (2,1 poin persentase) diikuti oleh Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Bengkulu. Provinsi-provinsi lainnya mencatat penurunan tingkat kemiskinan kurang dari 1 poin persentase dalam periode yang sama. Sebagian besar penduduk miskin berada di Pulau Jawa, tetapi tingkat kemiskinan tertinggi di Papua (27,7 persen di Papua dan 23,0 persen di Papua Barat).

Gambar A.40: Meskipun kemiskinan menurun secara nasional, penurunannya tidak merata di semua provinsi
(tingkat kemiskinan, persen; penurunan tingkat kemiskinan, poin persentase)



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas. Catatan: M = Maret dan S = September

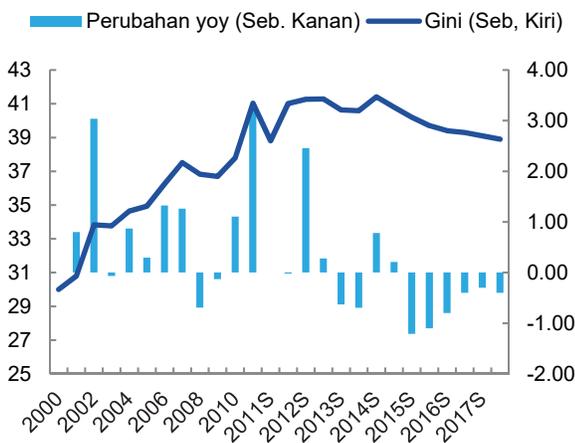
Ketimpangan terus menurun, terutama

Ketimpangan di tingkat nasional, yang diukur dengan koefisien Gini, menurun dari 39,1 pada Maret 2017 menjadi 38,9 pada Maret 2018, sehingga melanjutkan tren penurunan yang dimulai

karena adanya peningkatan pangsa konsumsi untuk masyarakat di 40% bagian bawah dan 40% bagian tengah dalam konsumsi nasional

pada tahun 2014 (Gambar A.41). Namun demikian, serupa dengan tingkat kemiskinan, peningkatannya tidaklah seragam. Di antara daerah perkotaan dan pedesaan, ketimpangan menurun di daerah perkotaan, tetapi meningkat di daerah pedesaan. Penurunan ketimpangan di tingkat nasional dan di daerah perkotaan terjadi karena pangsa konsumsi untuk masyarakat di 40 persen bagian bawah dan 40 persen bagian tengah dari total konsumsi nasional meningkat secara substansial dibandingkan dengan 20 persen bagian atas dari jumlah penduduk (Tabel A.2). Ketimpangan di daerah pedesaan meningkat karena pangsa konsumsi untuk masyarakat di 20 persen bagian atas dari total konsumsi nasional meningkat sebesar 0,3 poin persentase sementara 40 persen bagian bawah dan 40 persen bagian tengah turun masing-masing sebesar 0,2 poin persentase.

Gambar A.41: Ketimpangan terus menurun (pangsa dari konsumsi nasional, persen)



Sumber: Susenas
Catatan: M = Maret dan S = September

Tabel A.2: Turunnya ketimpangan di tingkat nasional didorong oleh peningkatan dalam pangsa konsumsi di 40 persen bagian bawah dan 40 persen bagian tengah (pangsa dari konsumsi nasional, persen)

	Periode	40 persen bagian bawah	40 persen bagian tengah	20 persen teratas
Nasional	Mar 2017	17,1	36,5	46,4
	Mar 2018	17,3	36,6	46,1
	Δ 2017-2018	+0,2	+0,2	-0,3
Perkotaan	Mar 2017	16,0	36,9	47,1
	Mar 2018	16,5	36,9	46,6
	Δ 2017-2018	+0,4	+0,0	-0,5
Pedesaan	Mar 2017	20,4	39,7	40,0
	Mar 2018	20,2	39,6	40,3
	Δ 2017-2018	-0,2	-0,2	+0,3

Sumber: Susenas

9. Pandangan (outlook) dan risiko pertumbuhan ekonomi

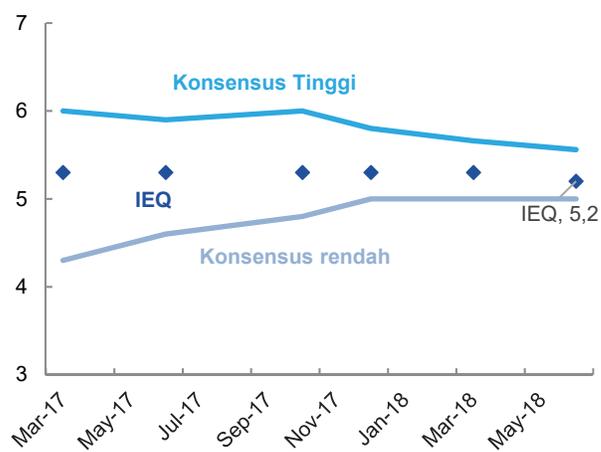
Pandangan terhadap perekonomian masih cukup positif, dengan lebih besarnya risiko yang merugikan

Meskipun kondisi lingkungan global yang bergejolak dan tidak menentu, pandangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup positif yang bersandar pada fundamental yang kuat dan dengan permintaan dalam negeri yang lebih tinggi yang diproyeksikan berada di atas cakupan perkiraan. Namun demikian, risiko yang merugikan meningkat.

Pertumbuhan diperkirakan akan mencapai 5,2 persen pada tahun 2018 dan 2019 karena permintaan dalam negeri yang lebih tinggi

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 5,2 persen tahun ini dan pada tahun 2019, dan secara bertahap menguat hingga 5,3 persen pada tahun 2020 (Tabel A.3). Perkiraan ini juga sejalan dengan perkiraan dari konsensus (Gambar A.42). Berlanjutnya pemulihan penjualan ritel dan penjualan sepeda motor serta pulihnya kepercayaan konsumen yang terjadi sejak awal tahun ini, konsumsi swasta diperkirakan akan meningkat sehubungan dengan pemilihan presiden yang berlangsung tahun depan, inflasi yang terus terkendali, kondisi pasar tenaga kerja yang kuat, dan tingkat pinjaman yang lebih rendah. Demikian pula, karena meningkatnya ruang fiskal yang terkait dengan reformasi penerimaan yang sedang berlangsung, konsumsi pemerintah diproyeksikan akan meningkat. Di tengah berlanjutnya impor barang modal yang tinggi dan tingginya sentimen sektor swasta, pertumbuhan investasi diperkirakan akan tetap tinggi dan meningkat, terutama dengan menurunnya ketidakpastian politik setelah berlangsungnya pemilihan presiden.

Gambar A.42: Perkiraan pertumbuhan dalam IEQ untuk tahun 2018 tetap sejalan dengan perkiraan dari Consensus Economics (PDB riil, perubahan persentase)



Sumber: Consensus Economics

Tabel A.3: Indikator perekonomian utama
(pertumbuhan yoy, persen, kecuali dinyatakan lain)

	Tahunan			Revisi dari IEQ sebelumnya
	2017	2018f	2019p	2018
1. Indikator perekonomian utama				
Produk Domestik Bruto (PDB)	5,1	5,2	5,2	0,0
Pengeluaran konsumsi swasta	5,0	5,1	5,1	0,1
Konsumsi pemerintah	2,1	4,0	4,5	1,0
Pembentukan modal tetap bruto	6,2	6,8	6,8	-0,8
Ekspor barang dan jasa	9,1	6,5	6,8	-0,5
Impor barang dan jasa	8,1	9,5	8,7	0,0
2. Indikator perekonomian lainnya				
Indeks harga konsumen	3,8	3,4	3,7	-0,1
3. Asumsi Ekonomi				
Nilai tukar (Rp/USD)	13.381	14.100	14.250	230
Harga minyak mentah Indonesia (USD/bbl)	51	62,9	62,9	0,1

Sumber: BPS; BI; CEIC; proyeksi staf Bank Dunia

Catatan: Angka di tahun 2017 adalah hasil aktual. P berarti perkiraan. Perbedaan statistik dan perubahan persediaan tidak disajikan di dalam tabel ini. Semua komponen PDB didasarkan pada data PDB yang terbaru. Asumsi nilai tukar dan harga minyak mentah adalah data tahunan rata-rata. Revisi relatif terhadap proyeksi di IEQ edisi Maret 2018

Nilai tukar perdagangan diproyeksikan akan memburuk

Nilai tukar perdagangan diproyeksikan akan memburuk untuk tahun 2018

Nilai tukar perdagangan (*Terms-of-Trade, ToT*) Indonesia diproyeksikan akan melemah secara signifikan pada tahun 2018 dan 2019, fluktuasi yang cukup besar dari kondisi tahun 2017⁵⁵. Posisi ToT yang berubah ini didorong oleh perkiraan pergerakan harga batubara dan minyak kelapa sawit, yang keduanya menurun dan diperkirakan akan terus begitu, serta menurunnya harga minyak mentah baru-baru ini, yang pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan yang tinggi.

Indeks Harga Perdagangan Tertimbang Bersih (*Net-Trade Weighted Price Index*)⁵⁶ tahun 2018 saat ini berada di bawah indeks tahun 2017, mencerminkan pola yang diproyeksikan untuk tahun 2018 (Gambar A.43). ToT yang diproyeksikan untuk tahun 2018 dan 2019 bahkan lebih lemah lagi jika harga di pasar berjangka adalah harga yang dipakai untuk perkiraan harga batubara, gas, dan minyak kelapa sawit, dan bukannya perkiraan dari Bank Dunia⁵⁷.

Gambar A.43: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih – historis dan perkiraan hingga tahun 2019 (indeks 2015 = 100)



Sumber: BPS; Bank Dunia; investing.com; cmegroup.com; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih dibangun atas enam komoditas ekspor utama Indonesia (karet, logam dasar, batubara, minyak mentah, gas alam cair, dan minyak kelapa sawit). Proyeksi harga pasar berjangka tahun 2018 dan 2019 menggunakan data historis aktual Januari – Mei tahun 2018, dan kemudian harga pasar berjangka sesudahnya.

⁵⁵ Nilai tukar perdagangan (ToT) mengacu pada harga relatif impor dalam hal ekspor dan didefinisikan sebagai rasio harga ekspor terhadap harga impor. Hal ini dapat diartikan sebagai jumlah barang impor yang dapat dibeli oleh suatu negara dengan barang eksportnya.

⁵⁶ Indeks Harga Perdagangan Komoditas Bersih atau Indeks Perdagangan Bersih (*Net Trade Index, NTI*) didefinisikan sebagai: $NTI_t = \frac{Bobot_{i,p} \times Harga_{i,t}}{Harga_{i,t}}$ di mana $Bobot_{i,p} = \frac{(E_{i,t}) - (I_{i,t})}{\sum (E_{N,t}) - \sum (I_{N,t})}$ dan I jenis komoditas; t = bulan; p = siklus periode (mis. rata-rata 5 tahun); N = jumlah komoditas; T = tahun basis; E = nilai ekspor; I = nilai impor.

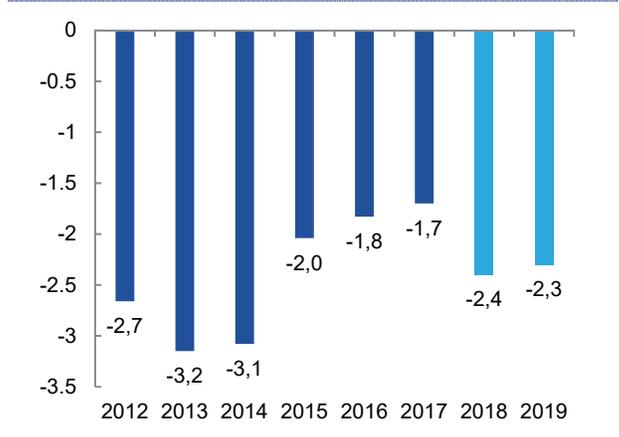
⁵⁷ NTI alternatif dihitung dengan menggunakan rata-rata harga pasar berjangka batubara (ICE, CSX), rata-rata dari tiga tolok ukur minyak, yaitu Brent, WTI dan Dubai (ICE), dan minyak kelapa sawit (Malaysia). Harga untuk komoditas penting lainnya diambil dari Bank Dunia (2018).

Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan membesar pada tahun 2018

Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan membesar pada tahun 2018

Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan membesar dengan nilai tukar perdagangan (TtT) yang lebih lemah, permintaan investasi yang kuat terhadap barang modal impor, dan menurunnya pertumbuhan dari para mitra dagang utama. Sejalan dengan proyeksi penguatan harga minyak mentah tetapi dengan harga batubara dan minyak kelapa sawit yang melemah menjelang paruh kedua tahun ini, nilai tukar perdagangan komoditas Indonesia diperkirakan akan semakin melemah. Pada saat yang sama, volume ekspor bersih diperkirakan akan terus menekan pertumbuhan karena pertumbuhan yang menurun di negara-negara mitra dagang utama dan permintaan investasi yang kuat meningkatkan volume impor. Defisit neraca transaksi berjalan sebagai pangsa dari PDB diperkirakan akan membesar menjadi 2,4 persen tahun ini dan stabil di 2,3 persen pada tahun 2019, diperparah lagi oleh nilai rupiah yang menurun secara efektif riil (Gambar A.44).

Gambar A.44: Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan membesar pada tahun 2018 dan 2019 karena investasi yang sarat barang impor tetap tinggi dan nilai tukar perdagangan yang melemah (persen)



Sumber: CEIC dan BI; perhitungan Staf Bank Dunia
Catatan: Angka untuk tahun 2018 dan 2019 adalah perkiraan

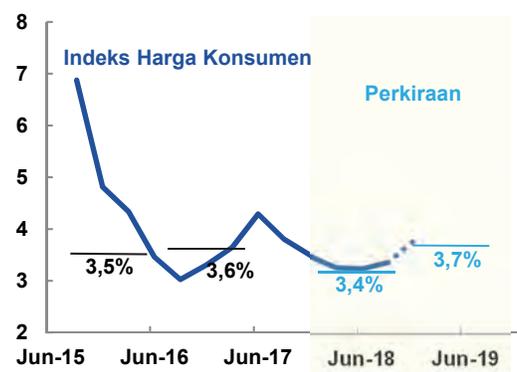
Inflasi harga konsumen diperkirakan akan sedikit meningkat, tetapi tetap di dalam kisaran target BI

Inflasi harga konsumen tetap berada di dalam kisaran target BI

Sementara inflasi IHK rata-rata sebesar 3,3 persen pada semester pertama tahun ini, diperkirakan terjadi sedikit peningkatan di semester kedua tahun 2018 karena adanya pemilu, depresiasi Rupiah, dan inflasi harga pangan yang berkelanjutan. Akibatnya, inflasi IHK untuk tahun 2018 diperkirakan rata-rata sebesar 3,4 persen, lebih rendah daripada tahun 2017. Dampak inflasi yang cukup kuat ini diperkirakan akan terbawa ke tahun depan, yang mengarah ke perkiraan sebesar 3,7 persen untuk tahun 2019 (Gambar A.45). Namun demikian, risiko peningkatan inflasi tetap ada, terutama inflasi dari barang-barang impor oleh karena depresiasi Rupiah dan harga minyak yang lebih tinggi.

Gambar A.45: Inflasi diperkirakan meningkat di Semester Ke-2, sebesar rata-rata 3,4 persen untuk tahun 2018

(perubahan rata-rata tahunan yoy, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Defisit APBN diperkecil pada tahun 2018

Pengelolaan fiskal meningkat; Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar

Pengelolaan fiskal di Semester pertama tahun 2018 membaik karena perkiraan penerimaan yang realistis, dan akibatnya tidak diperlukan adanya perubahan APBN pada tahun 2018, meskipun tahun ini merupakan tahun pemilihan umum. Ini adalah kemajuan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2016 ketika pemotongan anggaran tengah tahun perlu dilakukan. Total penerimaan pemerintah pusat diproyeksikan meningkat tahun ini sebesar 12,1

2,1 persen dari PDB pada tahun 2018

persen *yoY* menjadi Rp 1,868 triliun secara nominal, sebagian besar didorong oleh peningkatan yang diproyeksikan dalam pemungutan pajak penghasilan. Proyeksi penerimaan dari Bank Dunia adalah 1,4 persen lebih rendah daripada APBN tahun 2018. Sementara itu, total pengeluaran pemerintah secara nominal diperkirakan akan meningkat sebesar 8,2 persen menjadi Rp 2.172 triliun dari tahun 2017, didorong oleh proyeksi peningkatan belanja sosial, yang 2,2 persen lebih rendah dari APBN tahun 2018. Secara keseluruhan, Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,1 persen dari PDB, 0,1 poin persentase lebih rendah dari target defisit APBN tahun 2018 sebesar 2,2 persen dari PDB (Tabel A.4).

Tabel A.4: Bank Dunia memproyeksikan pendapatan dan belanja yang lebih rendah daripada dalam APBN tahun 2018
(Rp, triliun, kecuali dinyatakan lain)

	2017 Aktual yang Sudah Diperi ksa	2018 APBN	2018 Perkiraan Kemenkeu	2018 Bank Dunia	2019 Rancangan APBN	Perkiraan 2018 vs APBN 2018 (%)	Rancangan APBN 2019 vs APBN 2018 (%)
A. Penerimaan	1.666	1.895	1.903	1.868	2.143	0,4	13,1
(% dari PDB)	12,3	12,8	12,9	13,0	13,3		
1. Penerimaan pajak	1.343	1.618	1.549	1.520	1.781	-4,3	10,1
(% dari PDB)	9,9	10,9	10,5	10,6	11,1		
Pajak Penghasilan Minyak & Gas Bumi	50	38	55	50	62	44,7	63,2
Pajak Non-Minyak & Gas, o/w:	1,101	1,386	1,296	1,274	1,510	-6,5	8,9
Pajak Non Minyak & Penghasilan Gas	596	817	706	700	827	-13,5	1,2
PPN/PPnBM	481	542	565	549	655	4,2	20,8
Pajak tanah & bangunan	17	17	17	17	19	0,0	11,8
Pajak lainnya	7	10	8	8	9	-0,2	-0,1
Pajak perdagangan internasional	39	39	42	43	43	7,7	10,3
Cukai	153	155	156	152	166	0,6	7,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	311	275	349	342	361	26,9	31,3
(% dari PDB)	2,3	1,9	2,4	2,4	2,2		
Penerimaan sumber daya alam	111	104	169	161	178	62,5	71,2
Minyak & Gas Bumi	82	80	144	130	148	80,0	85,0
Non-Migas	29	23	25	31	30	8,7	30,4
Penerimaan bukan pajak lainnya	200	172	180	181	183	4,7	6,4
3. Hibah	12	1	5	5	0,4	400	-60,0
B. Pengeluaran	2.007	2.221	2.217	2.172	2.440	-0,2	9,9
(% dari PDB)	14,8	15,0	15,1	15,1	15,2		
1. Pemerintah pusat	1.265	1.455	1.454	1.407	1.607	-0,1	10,4
(% dari PDB)	9,3	9,8	9,9	9,8	10,0		
Belanja Pegawai	313	366	343	340	369	-6,3	0,8
Barang	291	340	320	308	319	-5,9	-6,2
Modal	208	204	194	176	212	-4,9	3,9
Pembayaran bunga pinjaman	217	239	249	227	275	4,2	15,1
Subsidi	166	156	228	230	221	46,2	41,7
Energi	98	95	164	176	157	72,6	65,3
BBM	47	47	104	108	100	121,3	112,8
Listrik	51	48	60	68	57	25,0	18,8
Non-energi	69	62	65	55	65	4,8	4,8
Dana hibah	5	1	2	1	2	100,0	100,0
Sosial	55	81	80	80	103	-1,2	27,2
Lainnya	9	67	39	44	106	-41,8	58,2
2. Transfer ke daerah	742	766	764	765	832	-0,3	8,6
(% dari PDB)	5,5	5,2	5,2	5,3	5,2		
C. Keseimbangan Umum	-341	-326	-314	-304	-297	-3,7	-8,9
(% dari PDB)	-2,5	-2,2	-2,1	-2,1	-1,8		
D. Pembiayaan	367	342	314	304	297	-8,2	-13,2

1. Pembiayaan utang	429	399	387	386	359	-3,0	-10,0
SBN	442	415	388		386		-7,0
Utang luar negeri	-20	-18	-4		-27		0,5
Lainnya	8	3	3		0,5		-8,3
2. Pembiayaan investasi	-60	-66	-66		-75		13,6
3. Pemberian pinjaman	-2	7	-7		-2		-128,5
4. Kewajiban penjaminan	-1	1	-1		-		
5. Pembiayaan lainnya	0,4	0,2	0,2		15		74
Asumsi							
Tingkat pertumbuhan PDB riil (%)	5,1	5,4	5,2	5,2	5,3		
IHK (%)	3,6	3,5	3,5	3,5	3,		
Nilai tukar (Rp/USD)	13.384	13.400	13.973	14.100	14.400		
Harga minyak mentah (USD/barrel)	51	48	70	65	70		ddd

Sumber: Kementerian Keuangan dan perhitungan Staff Bank Dunia.

Sementara perkiraan pertumbuhan ekonomi tetap positif, risiko yang merugikan telah meningkat

Risiko eksternal terhadap perkiraan termasuk berlanjutnya gejolak di pasar keuangan dan modal, pengetatan kondisi keuangan, dan melemahnya kepercayaan konsumen

Risiko terhadap perkiraan pertumbuhan Indonesia lebih mengarah ke sisi negatif di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Normalisasi kebijakan moneter AS yang berkelanjutan, bersama dengan gejolak yang terkait dengan negara-negara pasar berkembang besar lainnya, seperti Argentina dan Turki, adalah hal-hal yang menyebabkan para investor untuk keluar dari negara-negara pasar berkembang, termasuk Indonesia, sebagai kelas aset (*asset class*). Sebagai akibatnya, Rupiah terdepresiasi dan imbal hasil obligasi meningkat. Sementara nilai mata uang yang lebih rendah akan membantu menahan defisit transaksi berjalan, namun menurunnya nilai mata uang tersebut juga dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan inflasi, yang mengakibatkan pertumbuhan konsumsi yang lebih lambat. Imbal hasil obligasi yang lebih tinggi akan menyebabkan pembiayaan yang lebih mahal bagi korporasi, yang dapat mengurangi pemulihan kredit yang sedang merebak, dan dengan demikian menurunkan investasi swasta. Meningkatnya proteksionisme juga menimbulkan risiko yang tinggi bagi Indonesia melalui pertumbuhan ekspor yang melambat atau melalui efek perluasan (*spillover*) yang negatif dari pertumbuhan regional yang lebih lambat – sebagian karena melemahnya harga komoditas.

Kebijakan moneter dan fiskal dapat lebih diperketat dengan memberi pembobotan yang lebih banyak lagi pada pertumbuhan

Karena kondisi ekonomi dan inflasi di Amerika Serikat terus menguat, normalisasi kebijakan moneter AS mungkin tidak hanya sedang berlangsung tetapi mungkin bahkan berakselerasi. Oleh karena itu ada risiko bahwa tekanan dari arus keluar modal dapat meningkat, yang semakin membebani Rupiah dan harga obligasi Indonesia. Dalam menghadapi arus keluar modal yang dipercepat, pemerintah kemungkinan akan semakin memperketat kebijakan moneter dan fiskal untuk membendung arus keluar modal tersebut, yang menjadi penghambat bagi pertumbuhan dalam jangka pendek dan menengah.

Langkah pembatasan impor dapat meningkatkan inflasi; menghambat potensi pertumbuhan

Mengingat nilai rupiah terdepresiasi, untuk menurunkan impor dan oleh karena itu memperlebar neraca transaksi berjalan, pemerintah telah mengusulkan dan menerapkan langkah-langkah yang mencakup pengurutan (*sequencing*) produk-produk infrastruktur untuk mengurangi impor barang modal yang terkait, meningkatkan tarif pada barang-barang konsumsi⁵⁸, dan menerapkan langkah-langkah pengganti impor⁵⁹. Mengingat adanya kesenjangan infrastruktur yang signifikan di negara ini, langkah-langkah ini mungkin memiliki efek yang tidak diinginkan yang menghambat potensi pertumbuhan dan memberi akibat jangka panjang bagi perekonomian.

⁵⁸ Kementerian Keuangan telah mengumumkan niatnya untuk menaikkan tarif impor atas 900 barang konsumsi. Asian Nikkei (24 Agustus 2018).

⁵⁹ Mulai 1 September 2018, semua kendaraan bermotor dan alat berat yang menggunakan mesin diesel di Indonesia akan diharuskan untuk menggunakan minyak solar yang mengandung metil ester asam lemak (*fatty acid methyl ester*, FAME), sejenis ester asam lemak yang didapatkan dari minyak kelapa sawit. Aturan baru ini adalah bagian dari program B20 pemerintah Indonesia yang diperluas yang mewajibkan semua kendaraan menggunakan biodiesel yang terdiri dari 20 persen biodiesel lokal dan 80 persen solar. Lihat Investasi Indonesia (31 Agustus 2018).

Peningkatan tarif pada barang-barang konsumsi juga dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, dan membebani konsumsi swasta.

Tabel A.5: Perbandingan indikator makroekonomi terpilih, Indonesia di masa lalu dan saat ini

	September 2018	<i>Taper Tantrum</i> (2013)	Krisis Keuangan Asia (1998)
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,1	6,0	7,9
Pertumbuhan kredit (% yoy)	8,7	23,5	..
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% dari PDB)	-2,3	-3,0	-2,7
Cadangan (bulan impor barang)	8,7	6,9	..
Utang Luar Negeri (% dari PDB)	33,0	32,9	62,1
Inflasi (% yoy)	3,4	4,2	5,2

Sumber: BPS, BI melalui CEIC; IIF

Catatan: Periode *taper tantrum* (*taper tantrum* adalah istilah yang dipakai untuk merujuk lonjakan imbal hasil Obligasi Negara AS di tahun 2013, yang disebabkan oleh pengurangan jumlah uang yang masuk ke dalam sistem ekonomi secara bertahap oleh Bank Sentral AS – pent.) dimulai pada Mei 2013 sementara periode Krisis Keuangan Asia (*AFC*) dimulai pada Juli 1997. Variabel bulanan: Pertumbuhan kredit, cadangan, inflasi (menggunakan rata-rata 12 bulan sebelum kejadian). Variabel triwulanan: Pertumbuhan PDB, Defisit Neraca Transaksi berjalan (menggunakan rata-rata 4 kuartal sebelum dimulainya acara). Variabel tahunan: Keseimbangan fiskal, utang luar negeri (menggunakan angka 1 tahun sebelum kejadian). Cadangan dihitung seperti dalam Cadangan pada tahun t / Impor Barang pada tahun $t + 1$. Aktiva cadangan resmi mencakup cadangan mata uang asing, posisi cadangan IMF, Hak penarikan khusus, Emas, dan aktiva cadangan lainnya.

Risiko yang terkait dengan krisis keuangan tetap kecil

Sementara risiko yang merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar, risiko yang terkait dengan krisis keuangan untuk Indonesia tetap kecil, karena koordinasi kebijakan yang kuat dan fundamental ekonomi yang lebih kuat, terutama bila dibandingkan dengan periode *Taper Tantrum* dan Krisis Keuangan Asia (Tabel A.5). Menurun dari rekor tertingginya di awal tahun, cadangan devisa tetap sehat, sebesar impor senilai 8,7 bulan. Meskipun melakukan intervensi untuk meminimalkan gejolak, BI menjaga cadangan dengan memungkinkan depresiasi nilai Rupiah berjalan berdasarkan nilai pasar daripada mempertahankan nilai mata uang pada kurs tetap. Kebijakan moneter juga telah diperketat untuk menjaga perbedaan tingkat suku bunga dengan Amerika Serikat untuk menjinakkan arus keluar modal. Demikian juga, kebijakan fiskal telah dilakukan dengan berhati-hati; tingkat defisit dan utang tetap rendah dengan utang pemerintah yang kurang dari setengah ambang batas legalnya sebesar 60 persen dari PDB, di mana 57 persen dari utang tersebut adalah dalam mata uang lokal. Pada saat yang sama, sektor perbankan dan keuangan tetap sehat; pertumbuhan kredit meningkat tetapi tidak meningkat tanpa kendali, dan struktu permodalan bank yang sehat dengan tingkat kredit macet yang rendah. Yang terpenting, dengan fokusnya pada penjagaan stabilitas, Pemerintah diperkirakan akan terus memperketat kebijakan untuk membendung arus modal keluar, bahkan jika tindakan tersebut akan menjadi penghambat bagi pertumbuhan.

B. Mengupayakan agar urbanisasi dapat bermanfaat bagi semua masyarakat Indonesia⁶⁰



Urbanisasi dapat menjadi kekuatan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, biaya kemacetan yang terkait dapat merusak potensi manfaatnya dan mengakibatkan timbulnya pemisahan, isolasi dan ketimpangan yang lebih besar. Indonesia terus melakukan urbanisasi dengan kecepatan yang stabil, sebagian besar disebabkan oleh peralihan dari daerah-daerah yang sebelumnya adalah pedesaan menjadi permukiman perkotaan. Sementara peluang ekonomi yang lebih baik di kota-kota telah membantu banyak masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan dan bergabung dengan kelas menengah, urbanisasi di Indonesia pada umumnya tidak dapat memberikan manfaat yang dapat dinikmati oleh lebih banyak penduduk jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Timur. Ketimpangan di berbagai wilayah telah meningkat, sebagian besar didorong oleh disparitas sumber daya manusia dan kurangnya integrasi spasial di dalam kota. Daerah perkotaan menghadapi biaya kemacetan yang tinggi dan meningkat, sebagaimana dibuktikan oleh permintaan yang belum terpenuhi untuk perumahan yang terjangkau yang mengakibatkan tumbuhnya daerah kumuh, dan oleh tingginya tingkat kemacetan lalu lintas dan polusi. Untuk memastikan bahwa urbanisasi dapat memberi manfaat untuk semua masyarakat Indonesia, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memberlakukan kebijakan yang dapat mencapai tiga tujuan: (i) menyatukan dan meningkatkan pemberian layanan dasar untuk memastikan bahwa semua penduduk Indonesia dapat menikmati pendidikan, layanan kesehatan, layanan air bersih dan sanitasi yang berkualitas, sehingga mengurangi kesenjangan kesempatan, (ii) menghubungkan dan mengintegrasikan di dalam dan di antara berbagai daerah; (iii) menyesuaikan dan menargetkan orang-orang dan tempat-tempat yang mungkin akan tertinggal, seperti mereka yang disabilitas atau kelompok lain yang cenderung tertinggal, serta daerah-daerah tertinggal dari negara ini.

1. Urbanisasi terkait dengan semakin besarnya kemakmuran dan lebih rendahnya kemiskinan, tetapi kepadatan penduduk yang berlebihan dapat merusak manfaat ini

Urbanisasi dapat menyebabkan ekonomi aglomerasi

Kota adalah urat nadi perekonomian, politik dan sosial dari negara. Ketika masyarakat dan perusahaan mulai mengelompok dalam permukiman, urbanisasi menumbuhkan 'ekonomi aglomerasi': kedekatan spasial dari konsumen, pekerja dan perusahaan menciptakan lingkungan

⁶⁰ Bagian B dari Laporan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (IEQ) ini didasarkan pada, dan menyampaikan pratinjauan terhadap, materi dari Laporan Utama (Flagship) Urbanisasi Indonesia yang segera diterbitkan. Ini adalah produk dari *Poverty, Social, Urban, Rural and Resilience, and Macroeconomics, Trade and Investment Global Practices* dari Bank Dunia. Dukungan keuangan dari Pemerintah Swiss dan Australia untuk karya Bank Dunia mengenai urbanisasi ini sangat kami hargai.

yang meningkatkan kemakmuran dan mendorong pertumbuhan

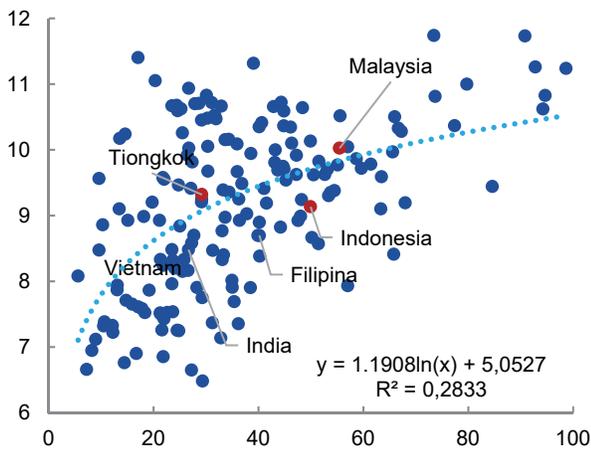
yang kondusif bagi inovasi dan meningkatkan produktivitas. Mencocokkan bakat dengan pekerjaan menjadi lebih mudah, ide dan pengetahuan lebih sering dipertukarkan, dan perusahaan-perusahaan berbagi masukan, mendorong munculnya pemasok-pemasok lokal. Daerah perkotaan menawarkan lebih banyak kesempatan untuk spesialisasi, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan skala ekonomi yang lebih besar. Kota juga cenderung menawarkan fasilitas yang lebih baik, karena biaya tetap bagi penyediaan infrastruktur dipikul oleh lebih banyak orang. Mobilitas dan konektivitas yang lebih besar di berbagai tempat memungkinkan alokasi faktor-faktor produksi yang lebih efisien, meningkatkan potensi produktif perekonomian secara keseluruhan dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi kemakmuran.

Negara-negara yang lebih urban memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah...

Serupa dengan keberadaan ekonomi aglomerasi, terdapat hubungan positif yang kuat antara pangsa dari penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan kemakmuran ekonomi. Negara-negara dengan pangsa yang lebih tinggi dari penduduk yang tinggal di daerah perkotaan memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi, yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Terdapat pula hubungan yang relatif erat antara urbanisasi dan kemiskinan. Sebagian besar negara yang telah memberantas kemiskinan sangat bersifat urban/perkotaan (Gambar B.1 dan Gambar B.2). Secara rata-rata, satu persen peningkatan dalam pangsa penduduk perkotaan terkait dengan peningkatan PDB per kapita sebesar 4 persen, dan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1,3 persen.⁶¹ Demikian pula di Indonesia, kabupaten dengan persentase penduduk yang lebih tinggi di daerah perkotaan juga memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah⁶².

Gambar B.1: Negara-negara dengan pangsa jumlah penduduk perkotaan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi...

(sumbu-y, Log GDP per kapita, 2016, dolar internasional 2011; sumbu-x: pangsa jumlah penduduk perkotaan, persen)

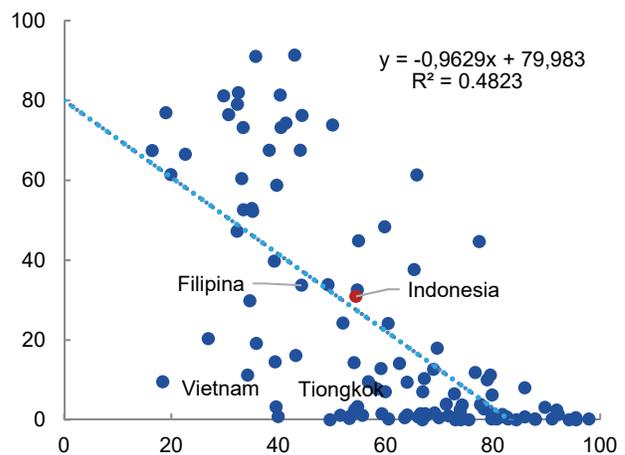


Sumber: Pangsa jumlah penduduk perkotaan dihitung berdasarkan penerapan algoritma Dijkstra dan Poelman (2014) untuk data jumlah penduduk yang dipetakan melalui data Landscan-2012. PDB per kapita dalam dolar internasional tahun 2011 konstan dari Indikator Pertumbuhan Dunia (World Development Indicators, WDI) Bank Dunia.

Catatan: PDB per kapita adalah data dari tahun 2016

Gambar B.2: ...dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah

(sumbu-y, Rasio penghitungan kemiskinan sebesar USD 3,20 per hari per orang; sumbu-x: pangsa jumlah penduduk perkotaan, 2016, persen)



Sumber: Pangsa jumlah penduduk perkotaan dihitung berdasarkan penerapan algoritma Dijkstra dan Poelman (2014) untuk data jumlah penduduk yang dipetakan melalui data Landscan-2012. Tingkat kemiskinan dari Indikator Pertumbuhan Dunia (World Development Indicators, WDI) Bank Dunia.

Catatan: Data tingkat kemiskinan mengacu pada tahun terbaru yang tersedia antara tahun 2011-2016

...tetapi urbanisasi juga terkait dengan

Karena kota-kota menjadi lebih padat, banyak kota yang tidak dapat mendukung kebutuhan dasar penduduk akan udara bersih, air minum dan sanitasi. Pasar properti dan perumahan dapat

⁶¹ Diperkirakan dari korelasi lintas negara dengan menggunakan data *World Development Indicators* dari Bank Dunia.

⁶² Diperkirakan dari korelasi lintas kabupaten dengan menggunakan data dari BPS.

dampak dari kepadatan penduduk...

menjadi tertekan, yang menyebabkan munculnya pertumbuhan wilayah yang tidak terkendali (*sprawl*) dan permukiman kumuh, dan kemudian meningkatnya kejahatan, menumpuknya sampah dan penyakit. Daerah perkotaan juga lebih mungkin untuk terpapar tingkat polusi yang tinggi, baik dari kegiatan industri maupun penggunaan kendaraan bermotor, dan lebih rentan terhadap dampak berbahaya dari perubahan iklim dan bencana alam. Dampak dari kepadatan penduduk ini timbul dari tindakan urbanisasi terhadap ekonomi aglomerasi, yang menghambat manfaat kemakmuran yang dapat dihasilkan dan menurunkan tingkat kelayakan dan inklusivitas kota.

...yang harus dikelola melalui kebijakan dan kelembagaan yang baik

Meskipun dampak dari kepadatan penduduk sering dikaitkan dengan kegagalan pasar, hal ini juga dapat diperburuk oleh kegagalan kebijakan. Semua kota menderita kemacetan - memang, semakin sukses sebuah kota, semakin menarik bagi para migran dan dampak dari kepadatan penduduk akan cenderung semakin tinggi. Namun demikian, semakin baik suatu kota untuk mampu mengelola dampak dari kepadatan penduduk dengan kebijakan dan lembaga yang baik, semakin tinggi pula jumlah penduduk dan tingkat kemakmurannya, di mana dampak dari kepadatan penduduk ini cenderung mengimbangi ekonomi aglomerasi. Bukannya dampak dari kepadatan penduduk yang membedakan London, New York, dan Tokyo dari Jakarta dan banyak kota-kota berkembang lainnya, melainkan adanya fakta bahwa kelompok kota yang pertama tadi memiliki kebijakan dan lembaga yang lebih berhasil mengimbangi dampak kepadatan penduduk.

Daerah perkotaan lebih makmur daripada daerah pedesaan di Indonesia, tetapi proses urbanisasi belum memberi manfaat bagi Indonesia sebesar manfaat yang didapat beberapa negara lain

Meskipun daerah perkotaan umumnya lebih produktif dibandingkan dengan daerah pedesaan (kecuali dalam kasus di mana pertambangan atau perkebunan mendominasi ekonomi), proses urbanisasi di Indonesia belum dikaitkan dengan manfaat sebesar yang didapat di beberapa negara lain di kawasan. Tiongkok hanya sedikit mengalami urbanisasi dibandingkan dengan Indonesia antara tahun 1990-2015⁶³, namun mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 9,1 persen dalam pendapatan per kapita selama periode ini – hampir tiga kali lipat laju pertumbuhan di Indonesia (lihat Gambar B.3). Vietnam juga menikmati pertumbuhan 5,5 poin persentase lebih banyak meskipun peningkatan pertumbuhannya 13 persentase poin lebih kecil dalam pangsa penduduk perkotaan. Selain itu, meskipun tingkat kemiskinan secara substansial turun selama tahun 1990-2015, Indonesia belum mengalami penurunan tingkat kemiskinan sebanyak negara-negara tersebut. Pangsa dari jumlah penduduk yang hidup dengan USD 3,20 atau kurang per hari turun masing-masing sebesar 70 dan 65 poin persentase di Tiongkok dan Vietnam selama periode tersebut, dibandingkan dengan 43 poin persentase di Indonesia (Gambar B.4).

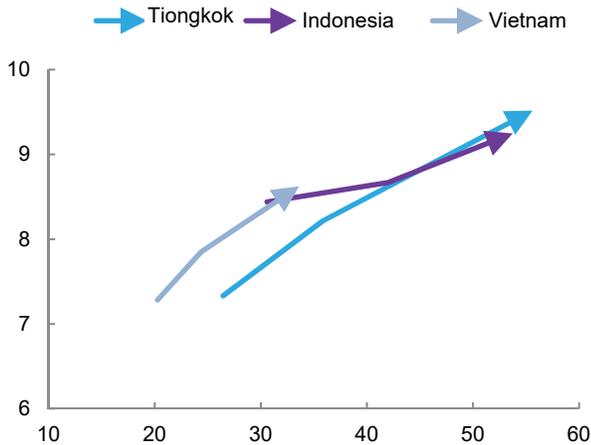
Kebijakan dan kelembagaan yang lebih baik dapat membantu Indonesia agar urbanisasi dapat lebih inklusif, dan memberi manfaat bagi semua penduduk Indonesia

Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia edisi kali ini melakukan penilaian mengenai upaya yang dilakukan Indonesia agar urbanisasi dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat Indonesia. Sementara peluang ekonomi yang lebih baik di daerah perkotaan telah mendukung pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, terdapat kesenjangan yang besar, baik di dalam maupun di antara berbagai wilayah dalam hal akses terhadap layanan dasar dan hasil pembangunan. Bagian ini diakhiri dengan pilihan kebijakan yang dapat membantu Indonesia untuk memaksimalkan urbanisasi, dibingkai melalui tiga ‘M’: (i) **menyatukan dan memperluas** penyediaan layanan berkualitas baik seperti pendidikan, kesehatan, serta air bersih dan sanitasi untuk semua masyarakat Indonesia, di mana pun mereka berada; (ii) **menghubungkan dan mengintegrasikan** kawasan-kawasan perkotaan, serta berbagai jenis kawasan perkotaan dan pedesaan dengan cara yang lebih baik lagi; dan (iii) **menyesuaikan dan menargetkan** solusi kebijakan untuk wilayah metropolitan besar yang menjangkau berbagai distrik, wilayah tertinggal dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung (misalnya warga penyandang disabilitas, kaum wanita, lansia, dll).

⁶³ Pangsa jumlah penduduk perkotaan Tiongkok meningkat sebesar 29 poin persentase selama tahun 1990-2015, dibandingkan dengan 23 poin persentase di Indonesia selama periode yang sama.

Gambar B.3: Indonesia belum mendapat manfaat ekonomi dari tingkat urbanisasi yang ada sebesar yang didapat oleh Tiongkok dan Vietnam...

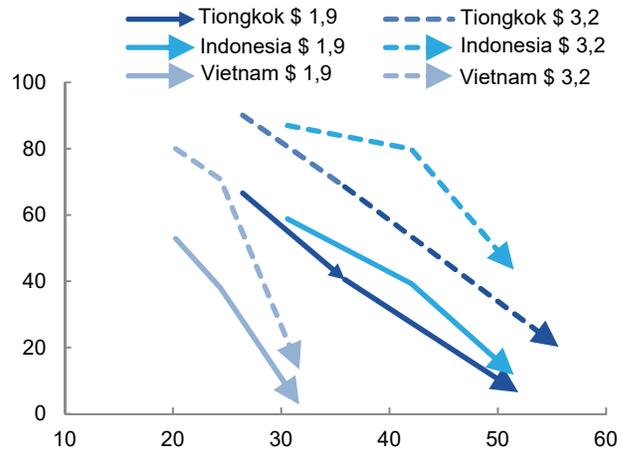
(sumbu-y, Ln PDB per kapita pada tahun 1990, 2000 dan 2015, menggunakan PPP 2011; sumbu-x, tingkat urbanisasi pada tahun 1990, 2000 dan 2015, persen)



Sumber: Perhitungan berdasarkan data dari Indikator Pembangunan Dunia dari Bank Dunia.

Gambar B.4: ...maupun penurunan tingkat kemiskinan sebesar yang didapat di negara-negara tersebut, mengingat tingkat urbanisasi yang ada di Indonesia

(sumbu-y, pangsa jumlah penduduk yang hidup dengan atau di bawah USD 1,90 atau USD 3,20 per hari pada tahun 1990, 2000 dan 2012, persen; sumbu-x, tingkat urbanisasi pada tahun 1990, 2000 dan 2012, persen)



Sumber: Perhitungan berdasarkan data dari World Development Indicators dari Bank Dunia
Catatan: Tingkat kemiskinan Vietnam adalah untuk tahun 1992 bukan tahun 1990.

2. Indonesia sedang mengalami urbanisasi dengan laju yang 'normal', sebagian besar melalui transformasi dari daerah-daerah yang semula adalah daerah pedesaan

Indonesia telah mengalami urbanisasi dengan pesat sejak kemerdekaannya pada tahun 1945...

Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, hanya satu dari delapan orang yang tinggal di kota, dan seluruh penduduk perkotaan di negara ini berjumlah sekitar 8,6 juta jiwa, kurang lebih setara dengan jumlah penduduk Swiss saat ini.⁶⁴ Sejak saat itu, Indonesia telah mengalami transformasi perkotaan yang luar biasa. Saat ini, hampir 55 persen jumlah penduduknya atau hampir 148 juta jiwa tinggal di kota. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, laju pertumbuhan urbanisasi di Indonesia⁶⁵ rata-rata lebih dari 1,5 persen per tahun. Laju pertumbuhan tersebut kemudian mulai berakselerasi, rata-rata lebih dari 3 persen per tahun pada tahun 1980-an dan 1990-an – lebih cepat daripada di negara-negara berkembang di Asia Timur lainnya pada saat itu, termasuk Tiongkok, dan relatif cepat dibandingkan dengan tingkat urbanisasi Indonesia pada saat itu (Gambar B.5).

...tetapi laju urbanisasi telah menurun ke tingkat yang “normal” dalam beberapa dekade terakhir ini

Namun demikian, sejak pergantian abad ini, laju urbanisasi Indonesia mulai melambat, kembali mendekati laju yang ada di tahun 1950-an dan 1960-an. Antara tahun 1990–2000 dan 2010–2017, laju urbanisasi di Indonesia terpengkas lebih dari separuhnya, tertinggal dari negara-negara lain di kawasan tetapi tingkat urbanisasinya serupa⁶⁶. Oleh karena itu, penurunan laju yang ada baru-baru ini adalah kembali ke titik yang dapat dianggap sebagai “normal”, atau laju urbanisasi rata-rata untuk negeri ini (Gambar B.5).⁶⁷

⁶⁴ Semua angka jumlah penduduk yang dikutip dalam paragraf ini didasarkan pada data dari database World Urbanization Prospects tahun 2018 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (<https://esa.un.org/unpd/wup/>).

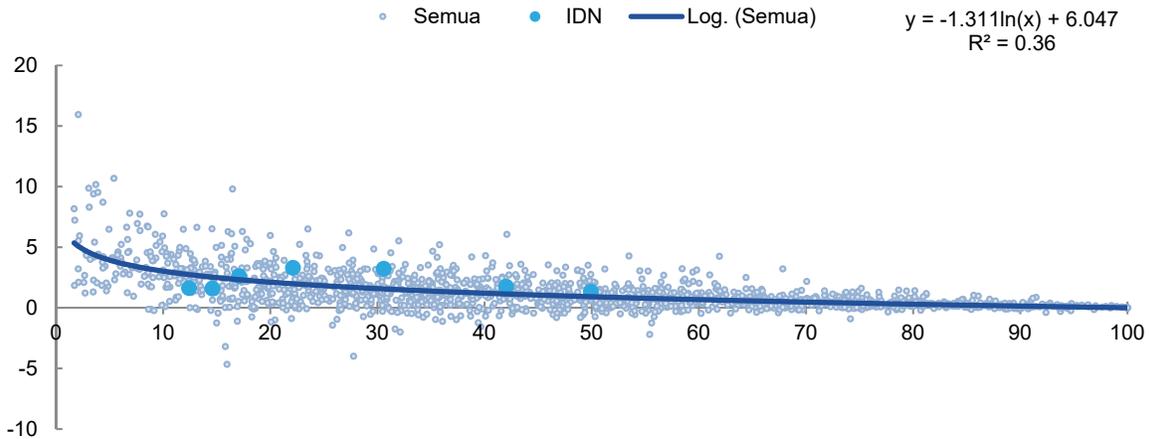
⁶⁵ Tingkat pertumbuhan dari pangsa penduduk yang tinggal di daerah perkotaan.

⁶⁶ Sedangkan selama tahun 1990–2000, tingkat urbanisasi ini mengungguli Tiongkok, Thailand, dan Vietnam, pada tahun 2010–2017 laju pertumbuhannya tertinggal oleh ketiga negara tersebut.

⁶⁷ Pola yang sama dari laju urbanisasi yang melambat sejak pergantian abad juga nampak dalam pertumbuhan penduduk perkotaan secara absolut.

Gambar B.5: Tolok ukur (benchmarking) laju urbanisasi Indonesia terhadap pengalaman global, 1950-2015

(sumbu-y, tingkat pertumbuhan pangsa perkotaan, persen; sumbu-x, pangsa perkotaan awal, persen)



Sumber: Perhitungan berdasarkan *World Urbanization Prospects* tahun 2018 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (<https://esa.un.org/unpd/wup/>)
Catatan: Setiap titik data menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata pangsa dari jumlah penduduk suatu negara yang tinggal di daerah perkotaan selama periode waktu tertentu (sumbu-y) relatif terhadap pangsa jumlah penduduk perkotaan pada awal periode waktu tersebut (sumbu-x). Tujuh pengamatan dicatat untuk masing-masing dari 231 negara: untuk tahun 1950–1960, 1960–1970, 1970–1980, 1980–1990, 1990–2000, 2000–2010, dan 2010–2015. Tingkat pertumbuhan dihitung sebagai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan dari pangsa jumlah penduduk perkotaan pada lebih dari 10 tahun interval dengan pengecualian dari tahun 2010-2015.

Secara keseluruhan, pertumbuhan penduduk perkotaan lebih didorong oleh urbanisasi (sebagai akibat) dari daerah yang semula adalah daerah pedesaan (berubah menjadi daerah perkotaan), bukan oleh adanya perpindahan penduduk

Pertumbuhan urbanisasi⁶⁸ di Indonesia terutama didorong oleh meningkatnya kepadatan pemukiman, yang menyebabkan terjadinya klasifikasi ulang daerah tersebut dari pedesaan menjadi perkotaan, diikuti oleh pertumbuhan alami penduduk di daerah perkotaan. Faktor-faktor ini menyumbang lebih dari 80 persen pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia antara tahun 2000 dan 2010. Sebaliknya, perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan hanya menyumbang kurang dari seperlima dari keseluruhan pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia antara tahun 2000 dan 2010.⁶⁹ Peran perpindahan penduduk dalam pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan relatif kecil di Indonesia dibandingkan dengan India dan terutama Tiongkok (Gambar B.6), meskipun perbandingan harus diperlakukan dengan hati-hati karena perbedaan dalam metodologinya.

Saat ini, urbanisasi di Indonesia berada pada tahap peralihan...

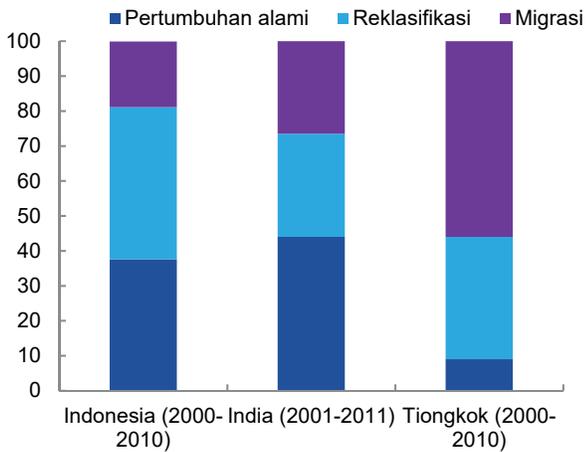
Meskipun lebih urban dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti India, Vietnam, Filipina, dan Thailand berdasarkan definisi nasional resmi daerah perkotaan, urbanisasi di Indonesia berada pada tingkat yang dapat disebut sebagai menengah. Tingkat ini masih jauh dari tingkat urbanisasi di negara-negara maju di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dan di negara-negara pembanding lainnya yang lebih maju seperti Brasil. (Gambar B.7)

⁶⁸ Definisi urbanisasi di Indonesia yang digunakan dalam laporan ini mengikuti definisi statistik (Peraturan BPS No. 37/2010): Hal ini didasarkan pada sistem penilaian gabungan yang menilai daerah-daerah, baik sebagai daerah perkotaan maupun pedesaan, berdasarkan adanya “karakteristik perkotaan” tertentu. Karakteristik tersebut adalah: (i) kepadatan penduduk; (ii) struktur ekonomi lokal; (iii) keberadaan jenis-jenis infrastruktur tertentu (yaitu jaringan listrik dan jaringan telepon); dan (iv) keberadaan fasilitas perkotaan tertentu (misalnya sekolah, rumah sakit, hotel, bioskop, toko, dll). Setiap daerah diberi skor berdasarkan karakteristik dan untuk keperluan statistik, diklasifikasikan sebagai perkotaan jika skornya melebihi ambang batas tertentu.

⁶⁹ Dekomposisi pertumbuhan penduduk perkotaan adalah menurut Wai-Poi dkk. (2018).

Gambar B.6: Migrasi kurang berperan dalam mendorong urbanisasi di Indonesia, dibandingkan dengan Tiongkok dan India

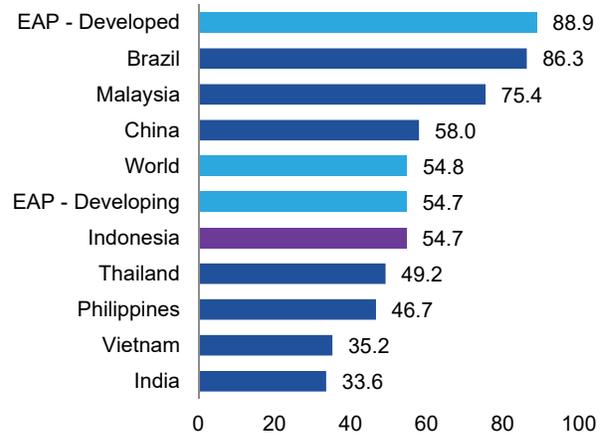
(persen dari urbanisasi)



Sumber: Berasal dari angka yang disajikan dalam Wai-Poi dkk. (2018), Bank Dunia - DRC (2014) dan Pradhan (2013), masing-masing untuk Indonesia, Tiongkok dan India.

Gambar B.7: Urbanisasi di Indonesia berada pada tahap peralihan

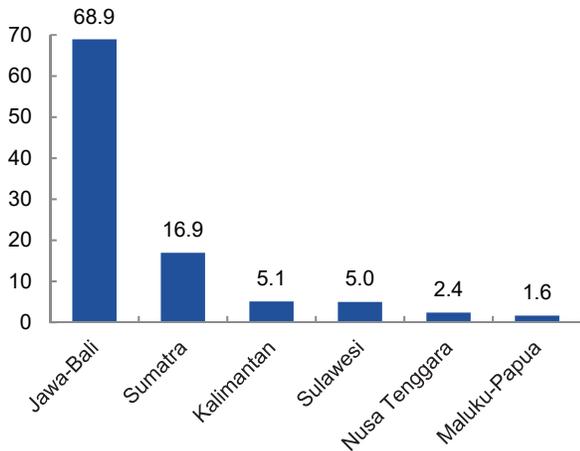
(persen penduduk yang tinggal di daerah perkotaan)



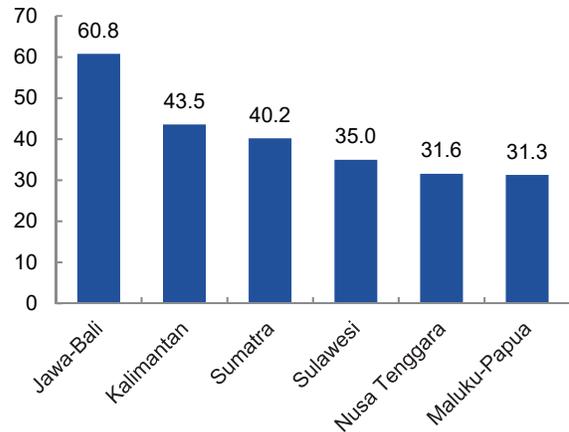
Sumber: Perhitungan berdasarkan *World Urbanization Prospects PBB 2018* (<https://esa.un.org/unpd/wup/>). Catatan: EAP adalah kawasan Asia Timur dan Pasifik, mengikuti definisi negara dari Bank Dunia. EAP-Maju hanya mencakup negara-negara berpenghasilan tinggi di EAP; EAP-sedang Berkembang hanya mencakup negara-negara non-berpenghasilan tinggi di EAP.

Gambar B.8: Sementara urbanisasi secara keseluruhan di Indonesia dan di Jawa-Bali berada pada tahap peralihan, untuk bagian lain negara ini masih berada pada tahap awal

(pangsa jumlah penduduk perkotaan nasional, persen)



(pangsa jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, persen)



Sumber: Perhitungan berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016

...tetapi urbanisasi berada pada tahap yang lebih awal di luar Jawa-Bali

Sementara urbanisasi berada pada tahap peralihan untuk Indonesia secara keseluruhan dan untuk wilayah Jawa-Bali, tingkat urbanisasi ini masih berada pada tahap yang masih baru di bagian-bagian lain dari negeri ini⁷⁰. Jawa-Bali adalah kawasan pulau di Indonesia yang paling padat penduduknya dan paling urban. Kawasan ini adalah satu-satunya dari enam wilayah pulau

⁷⁰ Laporan Pembangunan Dunia Bank Dunia (2009) mendefinisikan daerah-daerah urbanisasi yang sedang berkembang adalah daerah-daerah dengan pangsa penduduk perkotaan sekitar 25 persen, dengan kepadatan ekonomi yang rendah. Daerah dengan pangsa penduduk perkotaan sekitar 50 persen dapat dianggap sebagai daerah urbanisasi 'peralihan', sedangkan yang 'maju' memiliki pangsa penduduk perkotaan sekitar 75 persen atau lebih.

di Indonesia di mana lebih dari separuh penduduknya (60,8 persen) tinggal di daerah perkotaan.⁷¹ Kalimantan adalah kawasan pulau yang paling urban berikutnya, dengan pangsa penduduk perkotaan sebesar 43,5 persen pada tahun 2016 (Gambar B.8). Nusa Tenggara dan Maluku-Papua adalah yang paling tidak urban, dengan kurang dari satu dari tiga orang yang tinggal di perkotaan.

Karakteristik ekonomi dan fungsi daerah perkotaan berbeda-beda di seluruh portofolio daerah di Indonesia

Sama seperti laju urbanisasi yang berbeda-beda di seluruh wilayah pulau, karakteristik dan fungsi ekonomi perkotaan di Indonesia berbeda-beda tergantung pada ukuran mereka. Di bagian atas hirarki perkotaan atau 'portofolio' daerah perkotaan adalah kawasan metropolitan. Biasanya yang paling atas adalah kota 'prima' – seringkali merupakan pusat politik, ekonomi dan budaya yang dominan di negeri ini – diikuti oleh kota-kota besar dan kota-kota sedang lainnya yang seringkali berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi regional⁷².

Di Indonesia, setengah dari penduduk perkotaan tinggal di daerah metropolitan. Daerah ini dapat menjangkau banyak distrik ('metro multi distrik') atau hanya terdiri dari satu distrik ('metro dengan distrik tunggal'). Misalnya, wilayah metro Jakarta terdiri dari 14 distrik, sedangkan wilayah metro Palembang hanya terdiri dari satu distrik. Metro multi distrik lebih lanjut dipecah menjadi distrik 'inti' dan 'pinggiran', dengan distrik pinggiran terdiri dari distrik yang mungkin kebanyakan bersifat perkotaan atau pedesaan. Distrik 'Pinggiran' dicirikan oleh adanya fakta bahwa sejumlah besar penduduk bekerja atau mengakses layanan di distrik 'inti'.

Setengah lainnya dari penduduk perkotaan Indonesia tinggal di daerah non-metropolitan. Sekitar 57 dari 434 distrik non-metro ini adalah 'daerah perkotaan non-metro', atau kota-kota kecil dan kota-kota di perbatasan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Daerah-daerah tersebut menyediakan, misalnya, pasar induk untuk hasil pertanian yang diproduksi di daerah pedesaan sekitarnya. Distrik yang tersisa adalah 'kawasan pedesaan non-metro', di mana sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan.

Kotak B.1 menjelaskan portofolio daerah-daerah di Indonesia secara lebih rinci.

⁷¹ Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Pengelompokan yang kami lakukan terhadap wilayah kepulauan ini mengikuti, misalnya, Bank Dunia (2012)

⁷² Di negara-negara maju, kota-kota berukuran sedang dan lebih kecil cenderung lebih berorientasi pada manufaktur dibandingkan dengan kota-kota besar, yang perekonomiannya cenderung lebih didorong oleh aktivitas layanan yang sarat modal manusia (human capital-intensive) yang dapat diperdagangkan, lihat Bank Dunia (2008). Hal ini tampaknya tidak terjadi di Indonesia, di mana manufaktur cenderung terjadi di pinggiran kota-kota metropolitan multi-distrik.

Kotak B.1: Portofolio daerah-daerah perkotaan di Indonesia, 2016

Empat jenis perkotaan dan pedesaan secara umum dapat dibedakan di Indonesia⁷³.

- 1) **Wilayah metro multi distrik** adalah daerah metropolitan besar dengan pasar tenaga kerja fungsional yang melintasi beberapa distrik, sebagaimana didefinisikan dengan menggunakan data aliran komuter. Pada gilirannya, daerah metropolitan multi-distrik terdiri dari jenis sub-daerah berikut ini:
 - a. **Metro inti**, merujuk distrik di dalam wilayah metro yang menunjukkan kepadatan penduduk rata-rata yang tertinggi,⁷⁴ kecuali dalam kasus Jakarta di mana kawasan inti ini disematkan pada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
 - b. **Metro pinggiran**, merujuk distrik non-inti di dalam wilayah metro. Distrik-distrik ini terkait dengan inti melalui arus komuter yang tinggi. Distrik pinggiran Metro ini sebagian besar bisa saja perkotaan ('pinggiran kota') atau pedesaan ('pinggiran pedesaan')⁷⁵, di mana distrik yang sebagian besar berupa perkotaan adalah salah satu daerah di mana setidaknya 50 persen penduduk tinggal di daerah perkotaan.
- 2) **Wilayah metro dengan distrik tunggal**, adalah Kota kabupaten⁷⁶ dengan jumlah penduduk paling sedikit 500.000 dan rata-rata kepadatan penduduk yang menyerupai wilayah metro multi distrik, namun demikian pasar tenaga kerja fungsionalnya dibatasi dalam batas-batas wilayah administratif satu distrik.
- 3) **Kawasan perkotaan non-metro** adalah distrik yang tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai daerah metro berdistrik tunggal atau bagian dari wilayah metro multi-distrik, tetapi di dalamnya sebagian besar penduduk tinggal di daerah perkotaan. Distrik-distrik tersebut dapat berupa Kota atau Kabupaten. Tiga puluh dua dari 57 daerah perkotaan non-metro adalah Kota.
- 4) **Kawasan pedesaan non-metro** adalah distrik non-metro di mana sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan. Dalam prakteknya, semua distrik tersebut adalah Kabupaten. Mayoritas distrik ini (354 dari 377) adalah Kabupaten.

	Jenis daerah perkotaan	Keterangan	Jumlah distrik	Pangsa dari jumlah penduduk perkotaan nasional (%)
Kawasan metropolitan	Kawasan metro multi distrik			
	Inti	Kabupaten dengan kepadatan penduduk yang tertinggi (kecuali dalam kasus Jakarta, di mana DKI Jakarta adalah intinya)	DKI Jakarta & 20 kota lainnya	20,1
	Perkotaan pinggiran	Sebagian besar distrik non-inti di daerah perkotaan	27	27,0
	Pedesaan pinggirin	Sebagian besar distrik non-inti di daerah pedesaan	20	4,9
	Kawasan metro dengan distrik tunggal			
		Sebagian besar Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk ≥ 500.000 & \geq kepadatan penduduk 1.500	7	4,9
Kawasan non metropolitan	Non-metro			
	Perkotaan	Sebagian besar kabupaten non-metro di perkotaan	57	15,3
	Pedesaan	Sebagian besar kabupaten non-metro di pedesaan	377	27,9

Sumber: Perhitungan berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016 untuk % jumlah penduduk perkotaan nasional
Catatan: Tipologi berasal mengikuti metodologi yang dijelaskan di Park dan Roberts (2018). Jumlah kabupaten berdasarkan batas administrasi kabupaten tahun 2016.

⁷³ Untuk penjelasan mengenai metodologi yang digunakan untuk mendapatkan tipologi ini, lihat *Park and Roberts (2018)*.

⁷⁴ Identifikasi metro inti ini sangat kuat untuk kriteria lain bagi pilihan mereka, seperti status suatu daerah sebagai Kota dan pangsa-nya terhadap jumlah penduduk perkotaan, dengan pengecualian metro Medan. Berdasarkan batas di tahun 1996, metro Medan memiliki tiga kabupaten Kota, dua dari daerah tersebut 100 persen dari jumlah penduduknya tinggal di daerah perkotaan.

⁷⁵ Agar ringkas, kami akan merujuk ke daerah-daerah pinggirin 'yang sebagian besar daerah perkotaan' dan 'yang sebagian besar daerah pedesaan' hanya sebagai 'kota pinggirin' dan 'desa pinggirin'. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa daerah yang sebagian besar merupakan perkotaan mungkin masih memiliki jumlah penduduk pedesaan yang besar, dan sebaliknya.

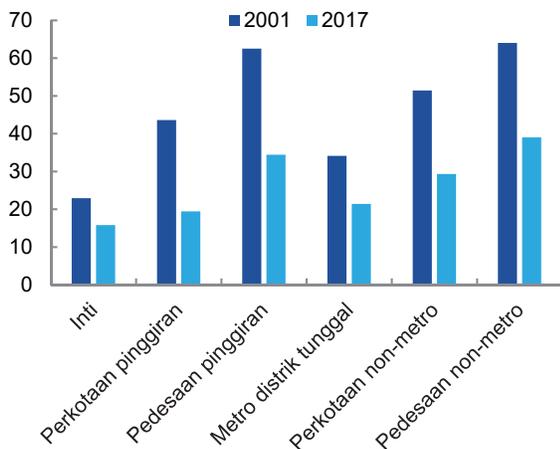
⁷⁶ Terdapat dua jenis distrik di Indonesia - Kota dan Kabupaten. Kota berarti "kota", sedangkan Kabupaten merujuk pada daerah apa yang secara tradisional dianggap sebagai daerah pedesaan.

3. Peluang ekonomi yang lebih baik di daerah metropolitan telah membantu banyak orang Indonesia keluar dari kemiskinan dan bergabung dengan kelas menengah

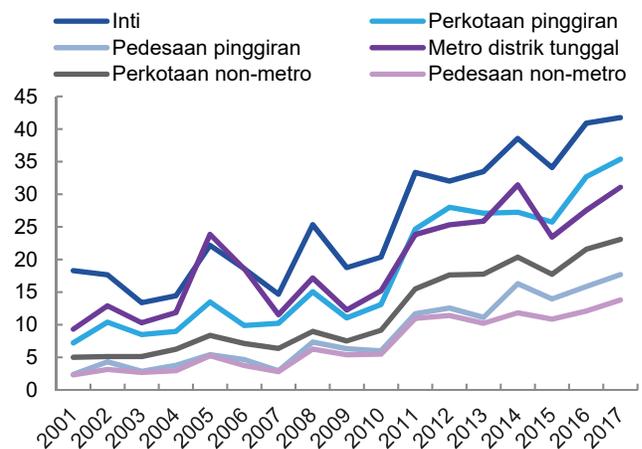
Kemiskinan dan kerentanan menurun dengan laju yang paling cepat di pinggiran daerah metropolitan

Indonesia telah mengalami penurunan besar dalam tingkat kemiskinan dan kerentanan selama dua dekade terakhir ini, dari 54 persen penduduk miskin dan rentan pada tahun 2001, turun menjadi 31 persen pada tahun 2017.⁷⁷ Namun demikian, laju kemajuan tersebut berbeda di seluruh portofolio daerah di Indonesia. Di luar daerah pedesaan non-metro, kemiskinan dan kerentanan menurun paling cepat di pinggiran metro: pangsa penduduk miskin dan rentan turun masing-masing sebesar 28,1 dan 24,2 poin persentase di pinggiran kota dan pedesaan. Sebaliknya, tingkat kemiskinan dan kerentanan hanya menurun sebesar 7,1 dan 12,7 poin persentase di metro inti dan di daerah-daerah metro ber-distrik tunggal, meskipun daerah-daerah tersebut adalah daerah di mana tingkat kemiskinan dan kerentanan relatif rendah (Gambar B.9). Berdasarkan wilayah kepulauan, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Jawa-Bali mengalami penurunan kumulatif yang tercepat, mendekati 25 poin persentase, sementara Sumatera, di mana kemajuannya paling lambat, mengalami penurunan sebesar 18 poin persentase.

Gambar B.9: Tingkat kemiskinan dan kerentanan menurun paling cepat di pinggiran kawasan metro ...
(pangsa penduduk miskin atau rentan, persen)



Gambar B.10: ... sementara pangsa pangsa penduduk kelas menengah yang terbesar berada di kawasan metropolitan
(pangsa penduduk kelas menengah, persen)



Sumber: perhitungan staf Bank Dunia dari Susenas, berbagai tahun
Catatan: Daerah yang ditetapkan mengikuti metodologi yang dijelaskan di Park dan Roberts (2018). Tingkat kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan resmi Pemerintah Indonesia. Kerentanan didefinisikan sebagai proporsi masyarakat dengan konsumsi per kapita di atas garis kemiskinan tetapi di bawah 1,5 x garis kemiskinan dan pangsa penduduk yang merupakan kelas menengah dihitung sebagai proporsi penduduk dengan konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi dari 3,5 x garis kemiskinan.

Kawasan metropolitan memberikan peluang terbaik bagi masyarakat untuk

Kelas menengah Indonesia telah tumbuh dari 5 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2001 menjadi 22 persen pada tahun 2017⁷⁸. Sementara pangsa tersebut telah berkembang di mana-mana, pangsa tersebut bertumbuh paling cepat secara absolut di wilayah metropolitan: sebesar 25 poin persentase di pinggiran metro, 23 poin persentase di metro inti dan 22 poin persentase di metro berdistrik tunggal. Ini juga merupakan wilayah dengan pangsa terbesar dari jumlah penduduk kelas menengah pada tahun 2017 (Gambar B.10). Sebaliknya, hanya sedikit lebih besar

⁷⁷ Kemiskinan didefinisikan sebagai proporsi masyarakat dengan konsumsi rumah tangga per kapita di bawah garis kemiskinan, dan kerentanan didefinisikan sebagai proporsi masyarakat dengan konsumsi di atas garis kemiskinan tetapi di bawah 1,5 kali garis kemiskinan dan dengan demikian rentan menjadi miskin. Perhatikan juga bahwa angka-angka tersebut merupakan tingkat gabungan bagi kedua kelompok tersebut.

⁷⁸ Mereka yang dianggap termasuk kelas menengah adalah jika konsumsi rumah tangga per kapita mereka memadai bagi mereka untuk tidak berisiko jatuh ke dalam kerentanan. Secara khusus, mereka dengan konsumsi rumah tangga di atas 3,5 kali garis kemiskinan dianggap cukup aman secara ekonomi untuk berada di kelas menengah. Lihat Bank Dunia (2018a) untuk informasi lebih lanjut tentang kelas menengah yang berkembang di Indonesia.

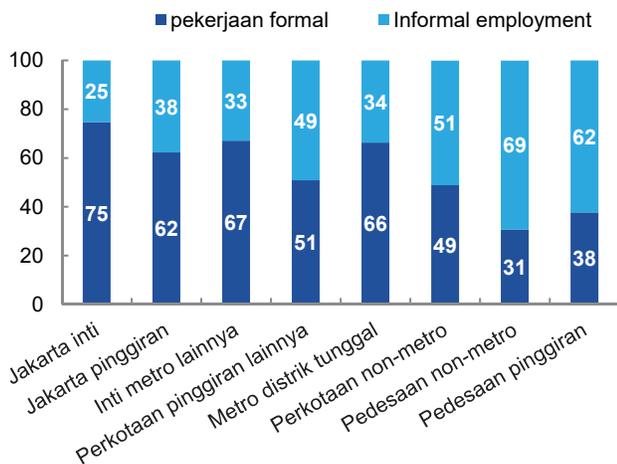
pindah ke kelas menengah

dari 1 dari 10 orang Indonesia di daerah pedesaan non-metro berada di kelas menengah. Bahkan setelah memperhitungkan karakteristik seperti ukuran rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan karakteristik pasar tenaga kerja lainnya, sekitar 50 persen rumah tangga di metro inti dan metro ber-distrik tunggal lebih mungkin untuk menjadi kelas menengah daripada rumah tangga yang sama di daerah pedesaan non-metro.

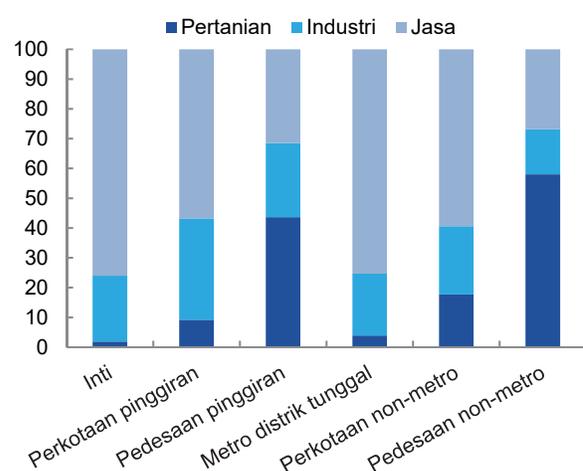
Ini sebagian karena wilayah metro umumnya memberikan peluang ekonomi yang lebih baik...

Salah satu alasan bahwa wilayah metro menawarkan peluang yang lebih baik untuk tidak menjadi miskin atau rentan dan berada di kelas menengah adalah karena wilayah tersebut memberikan peluang ekonomi yang lebih baik. Dua pertiga orang yang tinggal dan bekerja di metro inti bekerja di pekerjaan formal, pekerjaan bergaji, dibandingkan dengan hanya 31 persen di daerah pedesaan non-metro, di mana pekerjaan di lingkungan keluarga yang tidak dibayar dan pekerja mandiri adalah pekerjaan yang lebih umum dilakukan (Gambar B.11). Pekerjaan bergaji juga jauh lebih umum di wilayah metro berdistrik tunggal dan pinggiran kota dibandingkan dengan daerah pedesaan non-metro. Meskipun pada umumnya pekerjaan bergaji tidak selalu menjadi pekerjaan dengan pembayaran yang tertinggi,⁷⁹ namun jenis pekerjaan tersebut tetap diinginkan oleh masyarakat kurang mampu karena tingkat stabilitasnya yang lebih tinggi.⁸⁰

Gambar B.11: Daerah perkotaan cenderung menawarkan lebih banyak kesempatan untuk pekerjaan formal...
(pangsa dari total pekerja yang bekerja, persen)



Gambar B.12: ... dan sebagian besar penduduk Indonesia di daerah perkotaan bekerja di luar sektor primer
(pangsa dari total pekerja yang bekerja, persen)



Sumber: Perhitungan berdasarkan Sakernas, 2017, menurut tempat bekerjanya
Catatan: Pekerjaan formal termasuk pekerja berupah dan pekerja tetap. Pekerjaan informal termasuk pekerja mandiri, karyawan sementara, pekerja lepas, dan pekerja keluarga yang tidak dibayar.

Sumber: Perhitungan berdasarkan Sakernas, 2017, berdasarkan tempat kerjanya

... dan pekerjaan di sektor yang lebih produktif

Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia di wilayah metropolitan bekerja di pekerjaan di luar sektor primer dibandingkan dengan daerah pedesaan. Di metro inti, hampir empat dari lima pekerjaan ada di bidang manufaktur atau jasa. Pangsa pekerjaan di bidang manufaktur paling tinggi di pinggiran kota (terutama pinggiran kota Jakarta), yang kemungkinan mencerminkan konsentrasi perusahaan yang lebih tinggi yang memilih untuk menempatkan operasi mereka cukup dekat untuk mendapatkan manfaat dari kepadatan inti tanpa menanggung biaya tinggi untuk beroperasi di sana. Seperti yang diharapkan, daerah pedesaan non-metro, dan sampai

⁷⁹ Beberapa bentuk wirausaha dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, terutama di luar pertanian, tetapi jalur ini seringkali memiliki risiko yang tinggi. Digabungkan dengan kengganannya untuk mendapat risiko seperti itu, masyarakat miskin mungkin mendapati bahwa jalur seperti itu relatif lebih sulit dilakukan dalam lingkungan yang dibatasi kredit.

⁸⁰ Apapun jenis kontraknya, pekerjaan bergaji merepresentasikan aliran pendapatan yang stabil yang memungkinkan orang untuk merencanakan dan mempertahankan standar kehidupan yang stabil. Selain itu, ketika kontrak mencakup beberapa jaminan kepemilikan, pekerjaan ini dapat mengurangi kerentanan dan memfasilitasi untuk masuk ke kelas menengah.

batas tertentu pedesaan pinggiran, memiliki jumlah penduduk yang cukup besar – masing-masing sekitar 60 persen dan 40 persen, – yang terlibat dalam kegiatan pertanian (Gambar B.12).

Penciptaan lapangan kerja yang tinggi di pinggiran kota berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dan kerentanan yang lebih cepat

Dari tahun 1996 hingga 2015, 12,2 juta lapangan kerja diciptakan di pinggiran kota, dibandingkan dengan hanya 2,5 juta di daerah pedesaan non-metro, yang mencerminkan ukuran dan kecepatan pertumbuhan penduduk. Sebagian besar pekerjaan baru ini adalah dalam bidang jasa dan industri, terutama di bidang manufaktur. Perkotaan pinggiran menambahkan 7,0 juta lapangan kerja bersih di bidang jasa antara tahun 1996 dan 2015, tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5,8 persen, dan 4,4 juta lapangan kerja bersih di bidang industri pada tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 6,1 persen.

Semakin banyak pekerjaan yang lebih baik menyebabkan peluang penghasilan yang lebih baik di daerah metropolitan

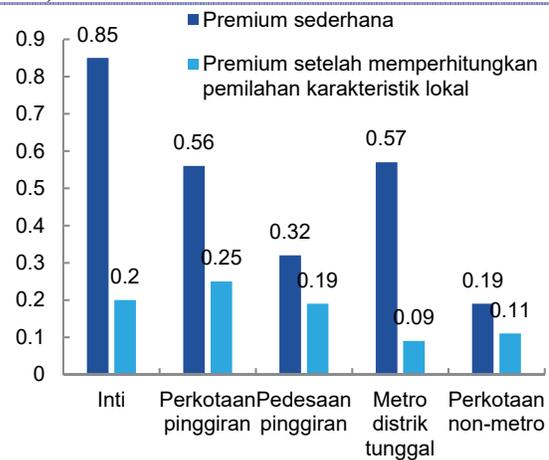
Dengan peluang ekonomi yang lebih banyak dan lebih baik, daerah perkotaan memiliki premi pendapatan yang tinggi relatif terhadap daerah pedesaan non-metro. Penghasilan bulanan rata-rata lebih dari 90 persen lebih tinggi di daerah metro inti dibandingkan dengan di daerah pedesaan non-metro. Daerah pinggiran kota dan daerah metro distrik tunggal memiliki premi yang sama tingginya dengan di daerah pedesaan. Daerah perkotaan non-metro atau kota kecil memiliki premi sederhana (tanpa syarat) yang terendah – sekitar 20 persen. Dengan demikian, terdapat gradien penghasilan yang terlihat bergerak turun dari daerah-daerah yang lebih bersifat perkotaan ke daerah-daerah kurang bersifat perkotaan (Gambar B.13).

Bahkan setelah memperhitungkan efek pemilahan⁸¹, terdapat premi pendapatan yang cukup besar di daerah-daerah metropolitan. Setiap orang yang tinggal di daerah metro multi-distrik memiliki pendapatan sekitar 20 persen lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sebanding di daerah pedesaan non-metro.

Namun demikian, eskalator peningkat ke kelas menengah mungkin melambat bagi para migran

Meskipun kawasan metro multi-distrik telah memberi mobilitas yang tinggi bagi para penghuninya, “premi mobilitas” yang ditawarkan kepada para migran oleh metro inti secara khusus mungkin telah berkurang. Sebagian besar kaum migran yang berhasil memasuki kelas menengah tampaknya telah bermigrasi ke daerah metro inti sebelum tahun 2000-an. Bagi mereka yang pindah setelah tahun 2000-an, eskalator peningkat ini tampaknya tidak berhasil

Gambar B.13: Premi pendapatan di kawasan metro relatif tinggi dibandingkan dengan kawasan non-metro (persen)



Sumber: Setiawan dkk (2018)

Catatan: Nilai yang dilaporkan dihitung sebagai $[exp(\hat{\alpha}) - 1]$ di mana $\hat{\alpha}$ adalah koefisien pada variabel *dummy* lokasi dari regresi log pendapatan pada variabel *dummy* ini dengan daerah pedesaan non-metro yang menjadi kategori yang dihilangkan. Versi kendali bersyarat (batang berwarna biru muda) untuk memilah karakteristik pekerja (usia, jenis kelamin, status perkawinan, tahun pendidikan, status migran), karakteristik pekerjaan (pertanian, industri atau jasa), karakteristik pekerjaan (karyawan atau wirausaha dari berbagai jenis), karakteristik geografis (wilayah pulau), dan karakteristik rumah tangga (ukuran, rasio ketergantungan). Semua koefisien yang dilaporkan di batang tersebut signifikan, pada tingkat satu persen.

⁸¹ Ada kemungkinan bahwa pekerja yang lebih produktif memilih untuk tinggal dan bekerja di bagian-bagian tertentu dari negeri ini dan dengan demikian memilah diri mereka sendiri ke dalam jenis pekerjaan tertentu, dan premi tanpa syarat mungkin saja meningkatkan dampak dari manfaat yang diterima oleh para individu yang secara positif terpilahkan tersebut. Untuk memperhitungkan kemungkinan ini, beberapa karakteristik yang dapat diamati dari individu, rumah tangga, pekerjaan, dan lokasi mereka dikendalikan.

yang paling baru ke daerah metro inti

meningkatkan kelas mereka. Meskipun demikian, prospek untuk masuk ke kelas menengah bagi para pendatang baru ke pinggiran kota tetap sangat tinggi, karena pinggiran kota mempertahankan keunggulan kedekatan dengan kemakmuran di daerah metro inti sekaligus menghindari biaya yang tinggi bagi mereka.

4. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan tetap ada, tetapi ketimpangan yang terbesar di Indonesia berada di antara kedua daerah tersebut

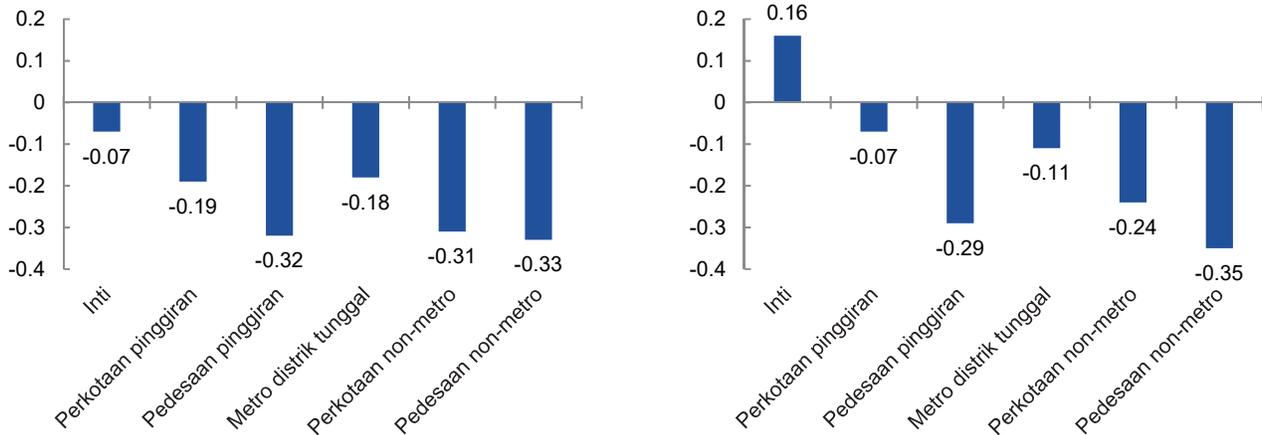
Ketimpangan konsumsi rumah tangga di antara berbagai daerah tetap tinggi, tetapi menurun

Sampai taraf tertentu, upaya untuk mengurangi kesenjangan antara daerah-daerah maju dan tertinggal di Indonesia telah membuahkan hasil. Secara keseluruhan, kesenjangan dalam tingkat konsumsi rumah tangga⁸² antara wilayah metro inti Jakarta (DKI Jakarta) dan semua wilayah-wilayah lain yang sebagian besar adalah wilayah perkotaan (metro inti lainnya, kota pinggiran, metros distrik tunggal, dan daerah perkotaan non-metro) menurun dari 19 persen pada tahun 1993 menjadi 7 persen pada tahun 2015 (Gambar B.14). Namun demikian, kesenjangan antara DKI Jakarta dan daerah pedesaan non-metro melebar dari 33 persen menjadi 35 persen selama periode yang sama. Kesenjangan kesejahteraan yang tetap ada ini mencerminkan kurangnya integrasi antar wilayah di Indonesia dan menuntut adanya respon kebijakan yang lebih baik untuk memungkinkan daerah tertinggal mendapatkan manfaat dari pertumbuhan di daerah-daerah yang maju.

Gambar B.14: Kesenjangan konsumsi antara DKI Jakarta dan pinggiran kota menurun

(a. perbedaan kesejahteraan di tahun 1993)

(b. perbedaan kesejahteraan di tahun 2015)



Sumber: Tiwari dan Shidiq (2018)

Catatan: Kesenjangan kesejahteraan dihitung menggunakan perbedaan dalam rasio kesejahteraan yang mewakili pengeluaran rumah tangga terhadap garis kemiskinan dengan periode waktu yang sama di wilayah tempat tinggal yang dinyatakan dalam Rupiah di DKI Jakarta.

Akses terhadap layanan dasar menunjukkan

Meskipun kesenjangan akses terhadap layanan publik menurun⁸³, penduduk perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar dibandingkan dengan penduduk pedesaan⁸⁴. Hampir semua orang Indonesia yang tinggal di daerah metro inti dan

⁸² Kesenjangan kesejahteraan diukur dengan menggunakan rasio kesejahteraan, yaitu rasio pengeluaran rumah tangga terhadap garis kemiskinan wilayah, dinyatakan dalam Rupiah DKI Jakarta. Bagi mereka yang tinggal di DKI Jakarta, rasio kesejahteraan ini persis sama dengan pengeluaran rumah tangga. Untuk rumah tangga di daerah di mana, katakanlah, garis kemiskinan adalah setengah dari garis kemiskinan di DKI Jakarta, rasio kesejahteraan ini akan sebesar dua kali lipat pengeluaran rumah tangga mereka. Penyesuaian ini memperhitungkan biaya perbedaan hidup di antara berbagai wilayah.

⁸³ Rata-rata akses terhadap layanan dasar meningkat dari 48,8 persen pada tahun 2001 menjadi 70,9 persen pada tahun 2015, sementara koefisien perbedaannya menurun dari 0,23 ke 0,17. Lihat Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia edisi Desember 2017: “Desentralisasi yang Memberi Hasil”.

⁸⁴ Analisis kekurangan akses terhadap layanan dan pencapaian hasil di bagian ini adalah dari Lain (2018), menggunakan data dari PODES dan SUSENAS.

konvergensi, tetapi penduduk perkotaan masih memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk pedesaan...

daerah metro distrik tunggal memiliki fasilitas perawatan kesehatan dasar (Puskesmas), fasilitas persalinan dan rumah sakit yang berada di atau dekat dengan desa / kelurahan mereka (Gambar B.15) Sebaliknya, lebih dari seperlima masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan non-metro tidak memiliki akses yang mudah ke rumah sakit, dan lebih dari 80 persen tidak memiliki akses yang mudah ke dokter. Demikian pula, sementara kurang dari sepersepuluh rumah tangga di daerah metro inti dan metro distrik tunggal tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman, sekitar 40 persen rumah tangga di daerah pedesaan non-metro dan pedesaan pinggiran terhambat aksesnya pada dimensi ini. Meskipun telah terjadi konvergensi dalam akses terhadap layanan, kesenjangan yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan tetap terlihat pada akses untuk kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi dan kebersihan (Gambar B.15).

...yang menyebabkan capaian kesehatan dan pendidikan yang lebih baik di daerah perkotaan metropolitan

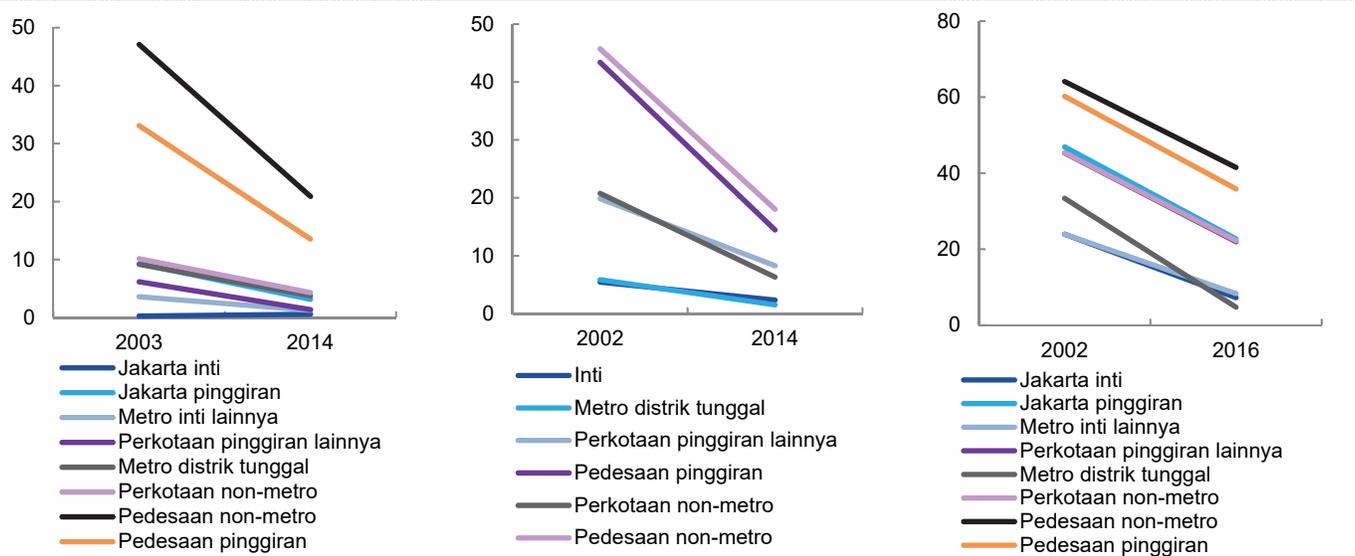
Dengan akses layanan yang lebih baik, masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan rata-rata lebih sehat dan lebih berpendidikan dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Rumah tangga di daerah metro inti dan distrik tunggal lebih mungkin memiliki bayi atau anak yang dilahirkan dengan bantuan tenaga medis profesional, melek huruf, dan menyelesaikan sekolah dasar dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Anak-anak di daerah perkotaan juga memiliki asupan gizi yang lebih baik. Bahkan setelah memperhitungkan perbedaan karakteristik rumah tangga dan akses layanan, anak-anak di daerah metro inti umumnya lebih tinggi dan lebih berat untuk usia mereka dibandingkan dengan anak-anak di daerah pedesaan non-metro masing-masing sebesar 0,21 dan 0,15 dari standar deviasi (SD). Demikian pula, anak-anak di perkotaan pinggiran umumnya lebih tinggi dan lebih berat untuk usia mereka, masing-masing sebesar 0,33 dan 0,13 SD dan memiliki kemungkinan sebesar 6,8 poin persentase lebih rendah untuk menderita *stunting* (masalah kurang gizi kronis yang mengakibatkan tinggi badan anak menjadi lebih pendek dari standar usianya – pent.) dibandingkan dengan anak-anak di daerah pedesaan non-metro.

Gambar B.15: Meskipun terjadi konvergensi, tetap terlihat kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam akses terhadap layanan dasar

(proporsi rumah tangga yang tinggal di desa / kelurahan yang kesulitan mengakses pendidikan pra-sekolah atau PAUD, persen)

(proporsi rumah tangga dengan anak usia balita yang proses kelahirannya tidak dibantu oleh tenaga kesehatan profesional, persen)

(proporsi rumah tangga yang kesulitan mengakses air minum yang aman, persen)



Sumber: perhitungan staf Bank Dunia menggunakan data Susenas (2002, 2014, 2016) dan PODES (2003, 2014), berdasarkan Lain (2018)

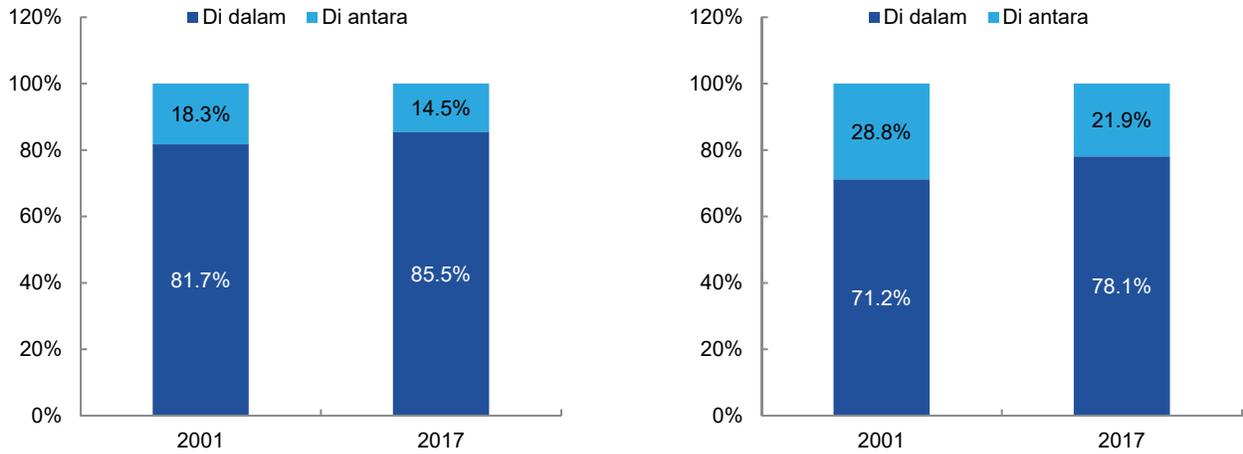
Ketimpangan di dalam suatu wilayah lebih berperan,

Meskipun terdapat perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan, ketimpangan konsumsi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh ketimpangan di dalam wilayah tersebut. Hal ini terjadi di berbagai pulau, berbagai jenis tempat, dan berbagai Kab/Kota. Hampir 86 persen dari

**dibandingkan
ketimpangan antar
wilayah**

ketimpangan total disebabkan oleh ketimpangan di dalam wilayah, dan hanya 14 persen oleh ketimpangan antar wilayah (misalnya, antara daerah metro inti dan daerah perkotaan non-metro). Demikian pula, 78 persen dari total ketimpangan berada di dalam Kab/Kota dan 22 persen adalah antar Kab/Kora. Ketimpangan bukan hanya selalu lebih tinggi di dalam wilayah, tetapi persentasenya pun meningkat dari waktu ke waktu (Gambar B.16).

Gambar B.16: Pangsa ketimpangan lebih tinggi di dalam wilayah dan di dalam distrik dibandingkan dengan di antara berbagai tempat dan distrik – dan pangsa tersebut meningkat dari waktu ke waktu, 2001 dan 2017
(ketimpangan total, dibagi menjadi: di dalam, dan antar wilayah, persen) (ketimpangan total, dibagi menjadi: di dalam, dan antar Kab/Kota, persen)



Sumber: Tiwari dan Shidiq (2018)

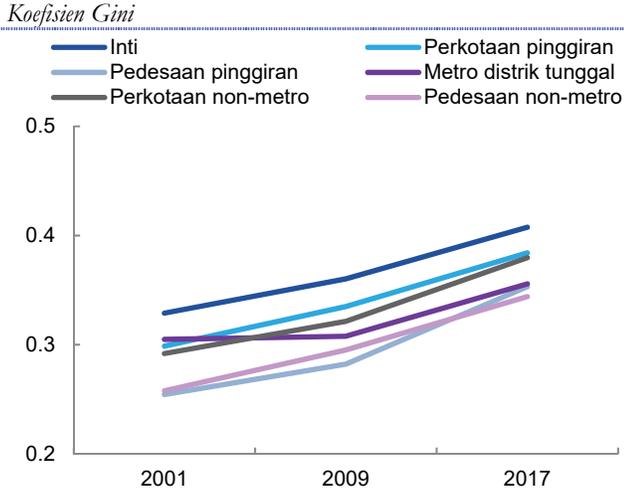
Catatan: Tempat mengacu pada portofolio tempat yang dikembangkan untuk Laporan Utama Urbanisasi Indonesia (inti, pinggiran, dll). Pangsa ketimpangan diperoleh dari dekomposisi GE (0), yang juga dikenal sebagai deviasi log rata-rata atau koefisien Theil L.

**Metro multi-distrik
adalah yang paling
sejahtera, tetapi juga
merupakan tempat
yang
ketimpangannya
paling tinggi**

Konsisten dengan tren keseluruhan meningkatnya ketimpangan di Indonesia selama tahun 2001-2014, semua jenis wilayah mengalami peningkatan koefisien Gini selama periode ini. Namun demikian, peningkatan tertinggi koefisien Gini (10 poin persentase) berada di pedesaan pinggiran dari daerah metro multi-distrik (Gambar B.17). Ini barangkali disebabkan karena kesempatan kerja di pedesaan pinggiran lebih memiliki campuran karakteristik perkotaan dan pedesaan, di antaranya: kedekatan jarak dengan daerah metro inti memberikan banyak peluang di sektor non-primer, namun demikian jumlah tenaga kerja di sektor pertanian masih tetap besar.

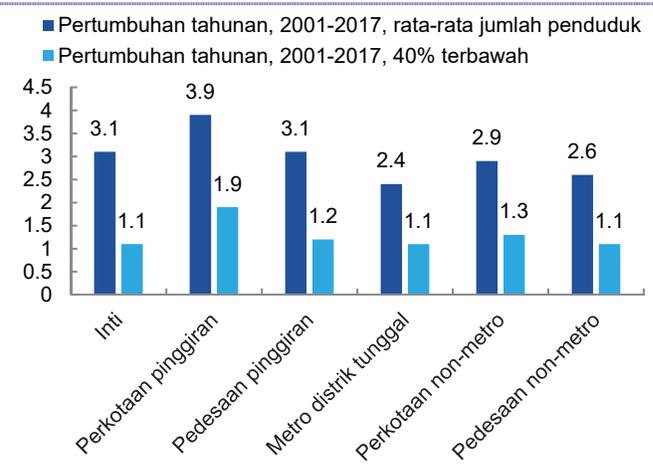
Selain itu, meskipun standar hidup keseluruhan – diukur dengan konsumsi per kapita – meningkat dengan laju tercepat di daerah metro multi-distrik, namun kenaikan kesenjangan standar hidup antara 40 persen rumah tangga termiskin dengan rata-rata penduduk juga merupakan yang tercepat di daerah ini. Sementara konsumsi per kapita dari seluruh penduduk di daerah metro inti dan daerah pinggiran meningkat rata-rata sebesar 3,4 persen per tahun selama 2001-2017, akan tetapi kenaikan konsumsi per kapita untuk 40 persen rumah tangga termiskin hanya sebesar 1,4 persen (Gambar B.18). Kesenjangan ini lebih besar dari yang terjadi di antara 40 persen rumah tangga termiskin dengan keseluruhan penduduk di non-metro pedesaan, yaitu 1,5 persen poin.

Gambar B.17: Ketimpangan meningkat di mana-mana, tetapi koefisien Gini naik paling tinggi di kota-kota pinggiran



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia dari Susenas, berbagai tahun

Gambar B.18: Metro multi-distrik adalah daerah dengan ketimpangan paling tinggi
(pertumbuhan tahunan, persen)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia dari Susenas, berbagai tahun

Perbedaan dalam modal manusia secara agregat mendorong munculnya ketimpangan di berbagai daerah

Salah satu penyebab ketimpangan di berbagai daerah ini adalah perbedaan SDM dan peluang kerja yang tercipta untuk penduduk dengan tingkat keterampilan yang berbeda, di dalam suatu wilayah. Secara global, ketika kota-kota bertumbuh dan menjadi lebih padat, mereka bisa mendapatkan stok SDM yang lebih tinggi⁸⁵. Hal ini terjadi baik melalui peningkatan capaian pendidikan dari kelompok penduduk yang lebih muda, atau melalui migrasi yang didorong oleh penguasaan keterampilan tertentu.

Meskipun lebih baiknya SDM merupakan sumber utama produktivitas di kota-kota⁸⁶, para pekerja tidak selalu mendapatkan manfaat yang sama dari tingginya kualitas SDM tersebut. Jika tingkat komplementernya tinggi – yaitu, pekerja berketerampilan tinggi dan berketerampilan rendah tidaklah tepat untuk saling menggantikan – maka pekerja berketerampilan rendah akan mendapatkan manfaat lebih dari pekerja yang berketerampilan tinggi⁸⁷. Jika terdapat eksternalitas positif (*positive externalities*, aktivitas ekonomi yang berdampak positif – pent.) yang tinggi, maka semua jenis pekerja akan mendapat manfaat: bagi mereka yang memiliki keterampilan tinggi melalui pemupukan gagasan dan pembelajaran yang lebih luas di antara perusahaan dan pekerja, yang memacu inovasi, dan bagi mereka yang keterampilan rendah melalui dampak limpahan (*spillovers*) dari eksternalitas ini.

⁸⁵ Lihat Bank World (2018c) untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini.

⁸⁶ Hal ini terjadi tidak hanya melalui dampak langsung dari keterampilan terhadap produktivitas, tetapi melalui dampak limpahan (*spillover*) tidak langsung di antara para pekerja ketika mereka belajar dari satu sama lain melalui, misalnya, pengamatan dan meniru.

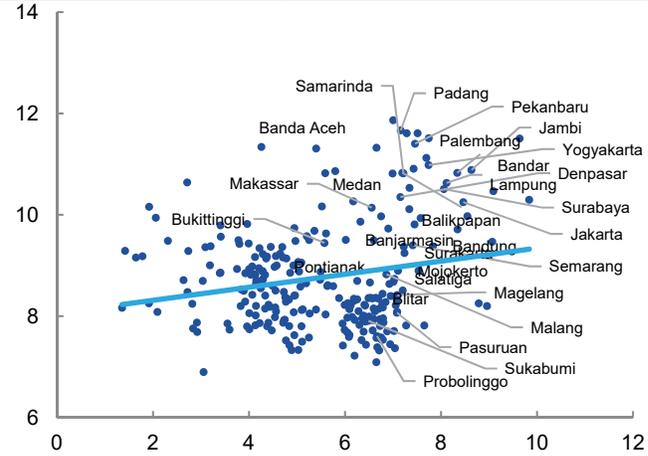
⁸⁷ Ini mengikuti model standar Neoklasik. Pertumbuhan dalam pasokan relatif pekerja terampil menurunkan upah pekerja berketerampilan tinggi dan meningkatkan upah pekerja berketerampilan rendah.

Di Indonesia, pekerja berketerampilan rendah memiliki keuntungan lebih sedikit dibandingkan dengan pekerja berketerampilan tinggi dari eksternalitas SDM

Di Indonesia, daerah-daerah dengan kepadatan yang lebih tinggi rata-rata memang memiliki stok SDM yang lebih tinggi (Gambar B.19), yang pada gilirannya berkorelasi dengan produktivitas yang lebih tinggi⁸⁸. Terdapat juga bukti eksternalitas SDM, dan bahwa semua jenis pekerja mendapatkan manfaat dari tinggal dan bekerja di daerah-daerah yang memiliki stok SDM yang lebih tinggi.

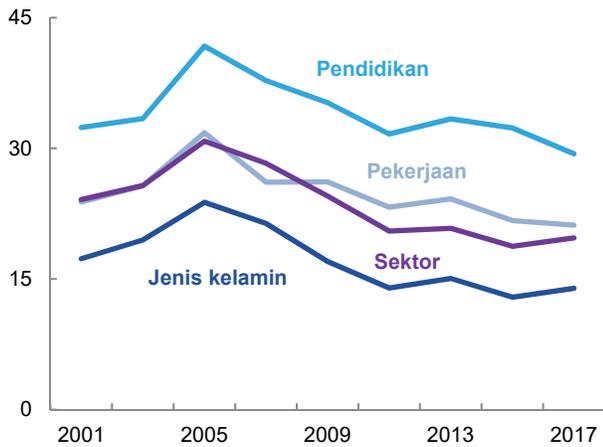
Namun demikian, volume limpahan (*spillover*) tersebut relatif kecil, karena pekerja yang memiliki keterampilan rendah mendapatkan manfaat yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekerja yang memiliki keterampilan tinggi.⁸⁹ Perbedaan capaian pendidikan ini berperan lebih besar dalam menjelaskan ketimpangan di dalam suatu wilayah, dibandingkan factor-factor lainnya seperti jenis kelamin, jenis pekerjaan atau sektor pekerjaan (Gambar B.20).

Gambar B.19: Rata-rata tahun bersekolah dan jumlah penduduk juga berkorelasi positif di seluruh Indonesia (sumbu-y, rata-rata jumlah tahun bersekolah dari penduduk usia 15 tahun ke atas; sumbu-x, log kepadatan penduduk, 2016)



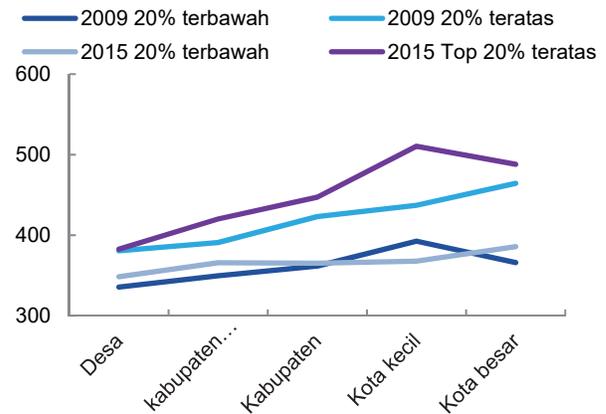
Sumber: Tiwari dan Shidiq (2018)
Catatan: Satuan dari analisis di sini adalah kabupaten di Indonesia, kecuali untuk wilayah metro multi-distrik yang rata-rata jumlah tahun bersekolahnya dihitung di semua distrik di wilayah metro tersebut.

Gambar B.20: Perbedaan capaian pendidikan adalah faktor yang paling berperan dalam ketimpangan di berbagai wilayah (persentase ketimpangan di dalam kelompok, persen)



Sumber: Tiwari dan Shidiq (2018)
Catatan: Pangsa diperoleh dari dekomposisi GE (0), yang juga dikenal sebagai deviasi log rata-rata atau koefisien Theil L - secara terpisah untuk setiap karakteristik demografis dalam enam kategori spasial: metro inti, perkotaan pinggiran, pedesaan pinggiran, metro distrik tunggal, perkotaan non-metro, dan pedesaan non-metro. Jumlah pangsa untuk setiap tahun tidak harus 100.

Gambar B.21: Kesenjangan dalam nilai tes Matematika antara 20 persen rumah tangga terkaya dan termiskin semakin melebar di kota-kota (nilai tes PISA)



Sumber: Perhitungan berdasarkan data dari PISA, OECD (2015)
Catatan: Desa memiliki jumlah penduduk kurang dari 3.000 jiwa; kota kabupaten kecil memiliki jumlah penduduk antara 3000-15.000 jiwa; kota kabupaten memiliki jumlah penduduk antara 15.000 hingga 100.000 jiwa; kota memiliki jumlah penduduk antara 100.000 hingga 1.000.000 jiwa, dan kota besar memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa. Definisi-definisi ini tidak dapat dipetakan ke dalam portofolio daerah yang digunakan di dalam sisa laporan ini.

⁸⁸ Bosker, Park dan Roberts (2018).
⁸⁹ Setiawan dkk (2018).

Melebarnya kesenjangan hasil pembelajaran antara anak-anak dari kelas ekonomi yang berbeda semakin memperburuk ketimpangan ini

Sementara tingkat capaian pendidikan rata-rata lebih tinggi di kota-kota di Indonesia daripada di daerah-daerah lain, dan kualitas pembelajaran (yang diukur dengan nilai ujian) mungkin telah meningkat dari waktu ke waktu, kesenjangan pembelajaran antara anak-anak dari berbagai kelas sosial ekonomi tampaknya telah melebar. Meskipun nilai tes Matematika pada Program Penilaian Siswa Internasional (*Program for International Student Assessment, PISA*) meningkat antara tahun 2009 dan 2015 untuk anak-anak dari semua tingkat sosial ekonomi terlepas dari di mana mereka tinggal (Gambar B.21), kesenjangan antara anak-anak dari 20 persen rumah tangga termiskin dengan terkaya telah melebar selama ini, dan pelebarannya paling besar terjadi di perkotaan. Jika limpahan (*spillover*) produktivitas di seluruh kategori keterampilan tetap lemah, ketimpangan di dalam daerah bisa menjadi semakin parah karena generasi anak-anak tersebut telah memasuki dunia kerja saat ini.

5. Keterbatasan dalam hal transportasi dan perumahan memperparah ketimpangan

Kurangnya konektivitas dan integrasi di antara dan di dalam daerah metropolitan di Indonesia memperparah ketimpangan

Integrasi yang buruk di daerah-daerah metro Indonesia juga dapat menjelaskan mengapa orang dengan keterampilan rendah kurang mendapatkan manfaat dari eksternalitas SDM di perkotaan dibandingkan dengan orang yang memiliki keterampilan tinggi. Karena kelangkaan perumahan yang terjangkau, terutama di lokasi yang baik, dan keterbatasan sistem transportasi yang menghubungkan orang satu sama lain serta kurangnya akses terhadap peluang kerja, masyarakat miskin terpaksa tinggal di permukiman informal dan menyebabkan semakin terbatasnya peluang kerja bagi mereka. Hal ini menyebabkan semakin banyak munculnya kantong-kantong daerah yang terisolasi, yang bisa menghambat distribusi manfaat urbanisasi. Selain itu, konektivitas antara daerah-daerah metro dengan daerah-daerah lain tetap buruk.

Permintaan untuk perumahan yang tidak terpenuhi telah mendorong naiknya harga rumah di daerah-daerah metro inti...

Dengan akses yang lebih baik terhadap layanan dan peluang ekonomi di daerah perkotaan, permintaan untuk perumahan telah meningkat, yang berkontribusi terhadap tingginya permintaan di pasar properti, perumahan, dan penyewaan rumah di daerah-daerah metro. Rasio harga rumah terhadap pendapatan lebih tinggi di kota-kota di Indonesia dibandingkan dengan di daerah pedesaan dan lebih tinggi dibandingkan dengan di kota-kota di beberapa negara maju, seperti New York, Singapura, dan Tokyo (Gambar B.22). Akibatnya, semua rumah tangga, termasuk masyarakat miskin, membelanjakan uang lebih banyak untuk perumahan di daerah-daerah metro dibandingkan dengan di daerah lain. Rata-rata, masyarakat yang tinggal di daerah-daerah metro metro inti mengalokasikan 33 persen dari total pengeluaran mereka untuk perumahan, dibandingkan dengan sekitar 23 persen di daerah pedesaan⁹⁰. Masalah ini sangat mengkhawatirkan mengingat akses terhadap kredit pemilikan rumah (KPR) – yang menyebabkan rumah dengan harga tertentu lebih terjangkau pada tingkat pendapatan tertentu – masih kurang, seperti yang terjadi di kebanyakan rumah tangga di Indonesia.⁹¹

...yang mengakibatkan sejumlah besar segmen penduduk perkotaan untuk tinggal di tempat-tempat yang di

Defisit perumahan yang besar telah menyebabkan harga rumah tidak terjangkau di Indonesia, dengan *backlog* (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat – pent.) perumahan diperkirakan sebesar 7,6 juta unit⁹². Meskipun program nasional telah menambah stok rumah sejumlah 550.000 hingga 700.000 unit per tahun, diperkirakan masih diperlukan sekitar 820.000 hingga 920.000 juta unit baru setiap tahunnya untuk memenuhi permintaan rumah. Selain itu, 3,4 juta unit dianggap kurang memenuhi standar berdasarkan satu atau lebih indikator (bahan perumahan, kurangnya akses terhadap air bersih

⁹⁰ Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan Susenas.

⁹¹ Pinjaman KPR hanya berjumlah 2,8 persen dari PDB di Indonesia pada tahun 2015, dibandingkan dengan hampir 20 persen di Thailand dan lebih dari 30 persen di Malaysia (Bank Dunia 2018b, menggunakan data dari HOFINET atau *Housing Finance Information Network* pada tahun 2015).

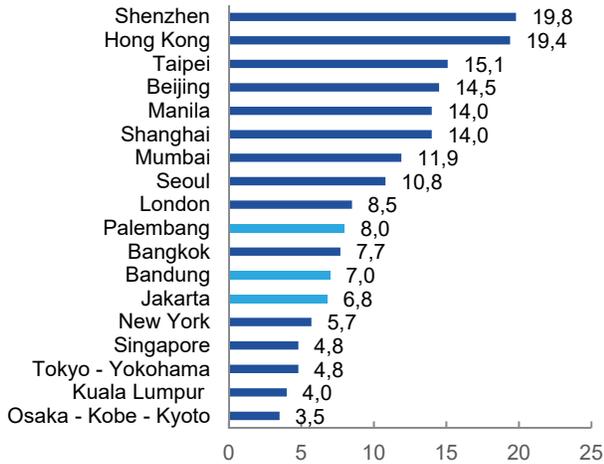
⁹² Perkiraan angka *backlog* ini adalah untuk tahun 2014 berdasarkan data BPS.

bawah standar atau sempit

atau sanitasi)⁹³. Sebagai contoh, lebih dari setengah rumah tangga miskin dan rentan di daerah metro inti tinggal di rumah-rumah dengan kondisi yang penuh sesak⁹⁴. Di pusat metro Jakarta, hampir 40 persen rumah tangga tinggal di rumah-rumah dengan kondisi yang penuh sesak pada tahun 2016, jumlah ini merupakan dua kali lipat dari keadaan tahun 2002 (Gambar B.23).

Gambar B.22: Rasio harga (rumah) terhadap pendapatan di Jakarta adalah tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang lebih maju...

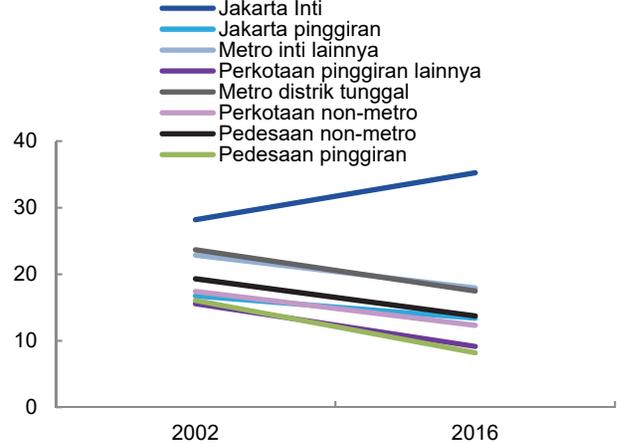
(rasio harga rumah terhadap pendapatan, persen)



Sumber: Demographia dan Nomura untuk kota-kota internasional, perkiraan staf Bank Dunia menggunakan data BPS untuk kota-kota di Indonesia. Harga rumah dan pendapatan rata-rata mengacu pada data dari tahun terbaru yang tersedia antara tahun 2015-2017.

Gambar B.23: ... berkontribusi pada kepadatan yang berlebihan di daerah metro inti dan metro distrik tunggal

(pangsa rumah tangga yang terlalu sesak, persen)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan Susenas, 2002 dan 2016

Pasokan rumah-rumah baru yang terjangkau seringkali berlokasi di daerah yang buruk, mendorong masyarakat miskin perkotaan berpindah ke pinggiran daerah metro, menciptakan persebaran pemukiman yang tidak terkendali (*sprawl*)...

Selain itu, pasokan perumahan baru yang terjangkau seringkali berlokasi di daerah yang buruk, mendorong masyarakat miskin perkotaan berpindah ke pinggiran kota. Di Jakarta, dari tahun 2016 dan 2017 hanya 2 persen rumah bersubsidi yang dibangun berada dalam jarak 10 km dari pusat kota, sementara 86 persennya berada di kawasan penyangga⁹⁵, antara 25 km hingga 40 km dari pusat kota. Demikian pula di Surabaya dan Bandung, masing-masing sekitar 1 dan 2 persen rumah bersubsidi yang baru berada di dalam kawasan berjarak 10 km dari pusat kota sementara 64 dan 58 persen berada di kawasan penyangga berjarak 25 km hingga 40 km. Akibatnya, rumah tangga didorong ke pinggiran dan akhirnya terpaksa membayar lebih untuk biaya transportasi, menciptakan dampak negatif yang lebih luas melalui kemacetan dan pola pembangunan spasial yang tidak efisien secara ekonomi dan tidak berkelanjutan. Memang benar bahwa pertumbuhan wilayah perkotaan yang tidak terkendali (*sprawl*) ini mungkin sebagian menjelaskan mengapa kota-kota di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia dalam hal luas lahan. Metro Jakarta, misalnya, mencakup area yang diperkirakan seluas hampir 4.300 kilometer persegi, hampir 400 kilometer persegi lebih besar dari area *Greater Tokyo*.

...dan mendorong munculnya daerah kumuh perkotaan, terutama di daerah perkotaan non-metro

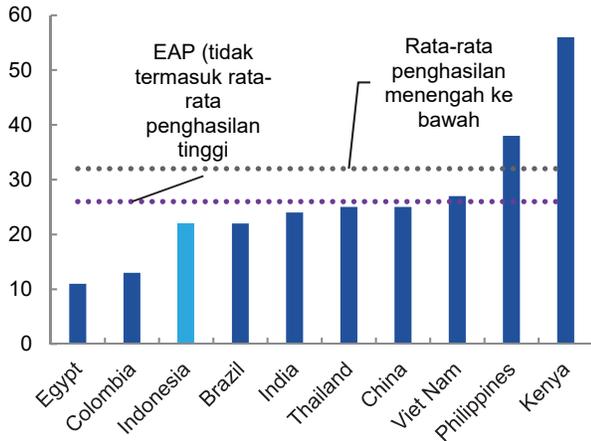
Biaya perumahan yang tinggi di daerah metro inti dan rendahnya kualitas perumahan bersubsidi juga telah mendorong munculnya daerah kumuh – yang didefinisikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai lingkungan padat dengan bangunan yang tidak teratur yang tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dasar. Menurut survei tahun 2015, sekitar 22 persen penduduk perkotaan di Indonesia tinggal di daerah kumuh, termasuk separuh penduduk miskin perkotaan.⁹⁶ Sementara

⁹³ Berdasarkan data dari Kemenpuera.
⁹⁴ Mengikuti Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 829/1999, rumah tangga dianggap terlalu sesak jika luas lantai per orang kurang dari 8 meter persegi.
⁹⁵ Analisis staf Bank Dunia berdasarkan data spasial pada unit bersubsidi FLPP oleh Kemenpuera.
⁹⁶ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Survei Pemetaan Daerah Kumuh Perkotaan (2015).

dan pinggiran kota di daerah metropolitan besar

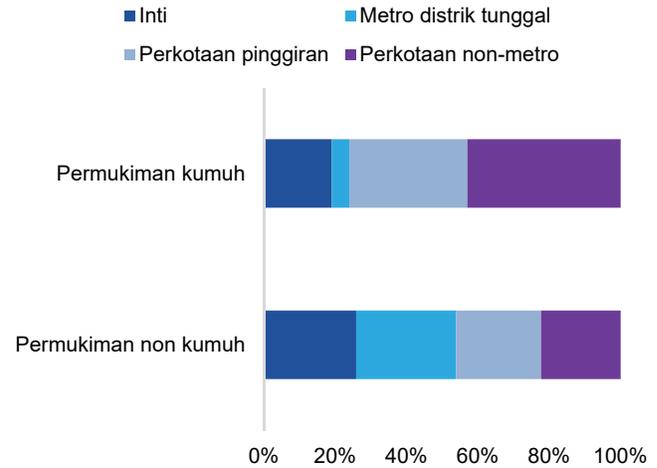
lebih rendah dari rata-rata negara regional (Gambar B.24), data ini masih menyatakan bahwa sekitar 29 juta masyarakat Indonesia tinggal di permukiman kumuh. Penghuni kawasan kumuh kebanyakan tinggal di pinggiran kota dan daerah perkotaan non-metro (Gambar B.25).

Gambar B.24: Seperlima penduduk kota tinggal di permukiman kumuh...
(pangsa rumah tangga perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, persen)



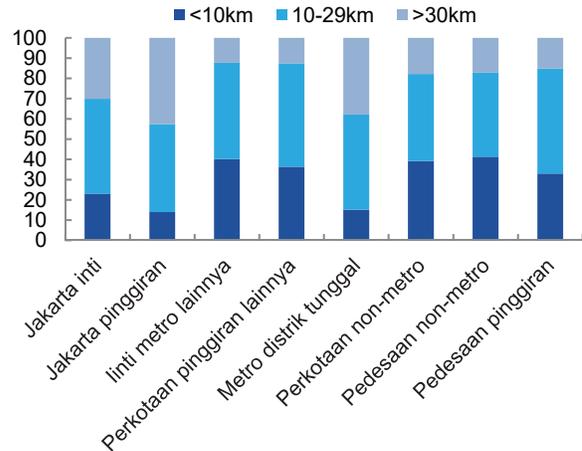
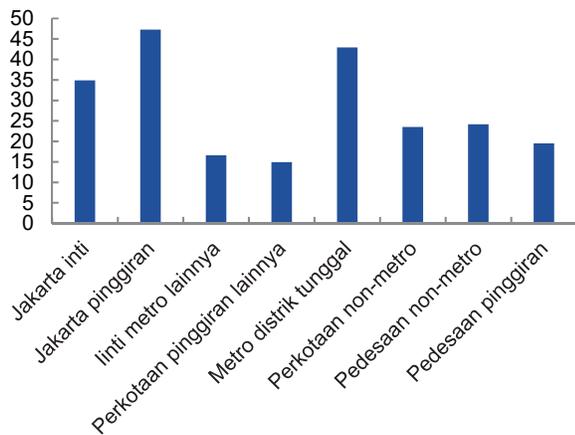
Sumber: Perhitungan berdasarkan data dari Indikator Pembangunan Dunia Bank Dunia. Data mengacu pada data tahun 2015
Catatan: Permukiman kumuh didefinisikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai lingkungan padat dengan bangunan yang tidak teratur yang tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dasar

Gambar B.25: ... sebagian besar di pinggiran kota dan daerah perkotaan non-metropolitan
(pangsa jumlah penduduk, persen)



Sumber: Perhitungan berdasarkan data dari Susenas (2014)
Catatan: Permukiman kumuh didefinisikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai lingkungan padat dengan bangunan yang tidak teratur yang tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dasar

Gambar B.26: Biaya perumahan yang tinggi di daerah metro multi-distrik dan daerah pemekaran kota berkontribusi pada perjalanan yang lama dan panjang di wilayah metro Jakarta dan daerah-daerah metro distrik tunggal
(pangsa penglaju yang melakukan perjalanan lebih dari 60 menit untuk bekerja dalam sehari) (jarak tempuh, persen setiap pita/ band jarak)



Sumber: Perhitungan berdasarkan data dari Sakernas, 2015
Catatan: Sampel hanya mencakup para pekerja yang tinggal di satu distrik dan pulang-pergi ke distrik lainnya untuk bekerja.

Banyak rumah tangga yang berjuang dengan perjalanan pulang pergi yang panjang

Karena tingginya biaya perumahan di daerah-daerah metro inti dan *urban sprawl*, bersama dengan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, banyak rumah tangga perkotaan berjuang dengan perjalanan panjang untuk mengakses peluang ekonomi yang lebih baik di daerah metro inti. Sekitar 30–40 persen penglaju (*commuter*) di wilayah metro Jakarta dan daerah metro distrik tunggal menghabiskan lebih dari satu jam di jalan untuk mulai bekerja, dibandingkan dengan

dan kemacetan lalu lintas

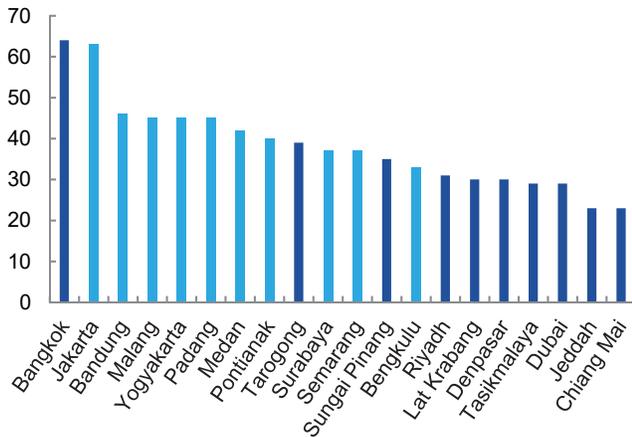
sekitar seperlima dari penglaju di daerah pedesaan (Gambar B.26). Namun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan di antara daerah-daerah metro dan antara Jakarta dengan daerah metro inti lainnya. Di daerah-daerah metro inti lainnya, hanya 15 persen penglaju yang menghabiskan lebih dari satu jam di jalan. Ini sebagian karena jarak perjalanan yang lebih pendek di daerah-daerah metro lainnya: 40 persen penglaju di wilayah metro Jakarta melakukan perjalanan lebih dari 30 kilometer untuk bekerja, tetapi hanya setengah dari penglaju yang melakukan perjalanan yang sama jauhnya di daerah metro lainnya.

Jakarta secara konsisten dinilai sebagai salah satu kota dengan kemacetan lalu lintas tertinggi di dunia

Kurangnya infrastruktur transportasi umum yang memadai berarti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan transportasi pribadi (mobil atau sepeda motor) untuk berangkat bekerja. Dengan demikian, Jakarta secara konsisten dinilai sebagai salah satu dari 10 kota di dunia dengan lalu lintas yang terburuk. Pada Indeks Kemacetan Lalu Lintas TomTom (*TomTom Traffic Congestion Index*), Jakarta adalah kota paling macet ketiga dari 18 kota besar di seluruh dunia, dengan perkiraan waktu tempuh tambahan 58 persen untuk setiap perjalanan, di mana saja dan kapan saja di kota ini dibandingkan dengan kondisi *free flow*.⁹⁷ Demikian pula, pada *Inrix Global Scorecard*, Jakarta dinilai sebagai kota yang paling macet kedua di kawasan setelah Bangkok (Gambar B.27). Sebagian besar kota-kota dengan kemacetan yang tinggi lainnya di kawasan juga cenderung berada di Indonesia. Rata-rata dibutuhkan waktu dua kali lipat lebih lama untuk menempuh jarak yang sama dengan jenis transportasi yang sama di Indonesia dibandingkan dengan di Malaysia (Gambar B.28).

Gambar B.27: Kota-kota di Indonesia adalah yang paling macet di kawasan

(waktu yang dihabiskan dalam berlalu-lintas setiap tahun, jam)

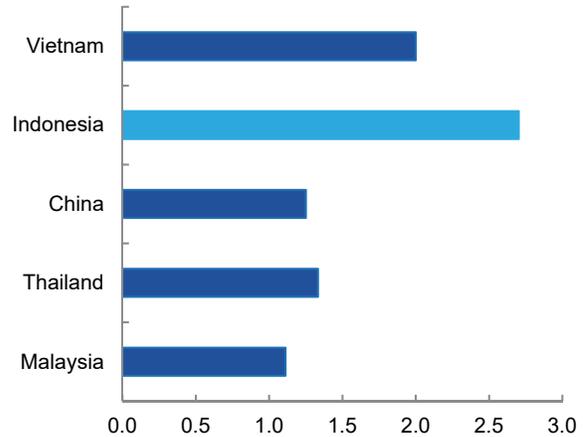


Sumber: Inrix Global Scorecard 2017

Catatan: Kota-kota di Indonesia ditunjukkan dengan warna biru muda.

Gambar B.28: Dibutuhkan lebih banyak waktu untuk menempuh jarak yang sama di Indonesia daripada di negara-negara Asia Timur lainnya

(waktu tempuh yang dinormalisasi, jam per 100 km langsung)



Sumber: *Modernizing the National Road Network: A Planning Framework to Improve Connectivity and Development*, IndII, 2012

⁹⁷ Kota dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa dianggap sebagai kota mega.

6. Indonesia bisa membuat urbanisasi bermanfaat bagi semua masyarakat Indonesia melalui tiga 'M'

Tiga prinsip kebijakan terkait urbanisasi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kelayakan hidup bagi semua masyarakat

Indonesia:

Menyatukan & memperluas, Menghubungkan & mengintegrasikan, Menyesuaikan & menargetkan

Prinsip pertama bertujuan untuk **menyatukan dan memperluas** penyediaan layanan dasar, memastikan bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar berkualitas baik di mana pun mereka tinggal. Ini memastikan kota-kota dapat ditinggali dengan nyaman, dan warga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi lebih sehat, lebih terdidik, dan dengan demikian lebih produktif. Hal ini seringkali membutuhkan peningkatan layanan di daerah perkotaan dan terutama di daerah-daerah yang dengan cepat berubah menjadi daerah perkotaan.

Yang kedua, kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan **konektivitas** dan **integrasi** di antara dan di berbagai daerah harus dilaksanakan. Memfasilitasi mobilitas barang, orang, bisnis, dan ide akan membantu menyebarkan manfaat dari urbanisasi dan mengurangi kesenjangan spasial dalam kesejahteraan ekonomi. Peningkatan konektivitas dan integrasi di antara berbagai daerah mengharuskan dihilangkannya hambatan bagi mobilitas barang dan faktor, sementara konektivitas dan integrasi layanan di berbagai tempat berarti memastikan bahwa semua rumah tangga dapat mengakses peluang ekonomi dan layanan publik. Pilihan untuk perumahan harus dikaitkan dengan peluang dan layanan melalui infrastruktur transportasi berkualitas tinggi untuk mengembangkan kota-kota yang terintegrasi, agar kota-kota tersebut menjadi inklusif secara ekonomi dan lebih layak huni.

Bahkan dengan kebijakan yang berhasil menyatukan dan menghubungkan, sejumlah orang dan daerah mungkin masih tertinggal. Oleh karena itu, intervensi yang **disesuaikan dan ditargetkan** mungkin diperlukan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu (misalnya para penyandang cacat, kaum wanita, anak-anak dan lansia), dan daerah-daerah tertentu (misalnya wilayah dan pulau-pulau terpencil).

Untuk menerapkan 3 M, Indonesia harus mengatasi tantangan lintas sektoral dalam pembiayaan dan perencanaan pembangunan perkotaan

Menyediakan sumber daya yang memadai bagi pemerintah daerah adalah persyaratan pertama untuk memperluas infrastruktur lokal dan layanan dasar dan membangun infrastruktur perhubungan yang diperlukan untuk integrasi di antara dan di berbagai daerah. Hal ini membutuhkan pembenahan dalam pemberian dana bantuan (*transfer*) antar pemerintah, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan menciptakan kerangka kerja yang bijaksana tetapi fleksibel untuk pinjaman pemerintah daerah. Persyaratan kedua adalah peningkatan proses perencanaan untuk pertumbuhan perkotaan. Pemerintah daerah membutuhkan kapasitas yang lebih (dan yang berkembang) untuk merencanakan pembangunan kota. Selain itu, kebijakan dan kelembagaan harus dirancang untuk mengatasi tantangan koordinasi antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar yurisdiksi.

Meninjau ulang rancangan bantuan dana ke pemerintah daerah dan akan diperlukan untuk membuatnya lebih berbasis kinerja dalam memperluas layanan dan membangun infrastruktur perhubungan

Meskipun kesenjangan di berbagai daerah dalam akses terhadap layanan dasar telah menurun, kelemahan di dalam sistem pemberian dana bantuan (*fiscal transfer*) menghambat pencapaian akses universal terhadap layanan dasar berkualitas serta penyediaan infrastruktur perhubungan yang memadai. Pertama, rumus pengalihan Dana Alokasi Umum (DAU) menggunakan norma per daerah yang disesuaikan sebagai dasar untuk bantuan penyetaraan daripada penggunaan norma per kapita. Ini merugikan daerah-daerah yang lebih padat penduduknya, yang cenderung bersifat perkotaan. Di lain pihak, daerah yang menerima dana bantuan per kapita yang lebih rendah juga merupakan daerah di mana lebih banyak masyarakat miskin tinggal, dan di mana kebutuhan investasi lebih tinggi. Saat ini, wilayah perkotaan yang besar berjuang untuk memperluas layanan dasar dan infrastruktur sejalan dengan pertumbuhan penduduk, yang berkontribusi pada meningkatnya kemacetan yang menghambat produktivitas dan inklusi. Merevisi rumus untuk memasukkan norma per kapita daripada norma per daerah dapat membantu mendorong konvergensi yang lebih besar dalam pemberian layanan.

Selain itu, jumlah yang dibelanjakan di daerah tertinggal dan kurang padat telah gagal diterjemahkan ke dalam lebih banyak modal infrastruktur, layanan serta konektivitas antar daerah yang lebih baik. Kabupaten yang tidak terlalu banyak penduduknya, yang mengalami peningkatan tajam dalam belanja per kapita setelah desentralisasi, hanya menambah panjang jalan beberapa kilometer lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten yang lebih padat penduduknya. Kabupaten-kabupaten tersebut juga gagal menunjukkan peningkatan dalam cakupan layanan air bersih dan sanitasi dibandingkan dengan kabupaten yang berpenduduk lebih banyak.⁹⁸ Juga tidak ada korelasi antara tingkat pengeluaran dan hasil pemberian layanan. Hal ini sebagian disebabkan karena kabupaten menghabiskan sebagian besar DAU untuk belanja pegawai: dari Rp 100 dalam bantuan DAU, rata-rata kabupaten menghabiskan Rp 86 untuk gaji. Membuat dana bantuan lebih berbasis kinerja, melalui pemantauan dari atas ke bawah (*top-down*) dan akuntabilitas dari bawah ke atas (*bottom-up*) yang lebih baik, dapat memastikan bahwa investasi tersebut lebih efisien dan efektif.

Meningkatkan pendapatan asli daerah, memobilisasi sumber pendapatan lain, dan meningkatkan kemampuan kota besar untuk meminjam juga akan memperbesar pagu indikatif (*fiscal envelope*) untuk investasi dalam pemberian layanan

Sementara pembenahan dana bantuan akan membantu meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk daerah perkotaan yang lebih padat penduduknya, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kondisi fiskal pemerintah daerah secara keseluruhan seiring dengan pertumbuhan kebutuhan daerah perkotaan dan daerah-daerah yang berubah menjadi daerah perkotaan. Hal ini membutuhkan pelengkap dana bantuan dengan upaya untuk meningkatkan pemungutan pendapatan asli daerah yang saat ini sangat rendah. Langkah-langkah seperti ini dapat melibatkan pengelolaan atas daftar pajak dan informasi kadaster yang lebih baik mengenai pajak bumi dan bangunan, yang lebih rendah di Indonesia dibandingkan dengan di kebanyakan negara lain. Selain itu, pemanfaatan yang lebih besar dari perangkat pengukur nilai lahan dapat membantu membiayai infrastruktur perkotaan, sementara meningkatkan harga lahan dan properti. Sumber-sumber pendanaan tambahan untuk pembiayaan transportasi umum yang menghubungkan dan terintegrasi dapat mencakup pajak dan pungutan khusus untuk transportasi pribadi, biaya parkir, pungutan atas bahan bakar, dan biaya kemacetan. Namun demikian, sebagian besar instrumen tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan, dan akan membutuhkan waktu sampai Indonesia dapat mengandalkan sumber daya tambahan ini.

Pendanaan investasi dalam infrastruktur perkotaan, khususnya transportasi umum, mensyaratkan pencarian sumber daya di luar sumber daya yang tersedia di APBN. Hal ini terutama berlaku untuk wilayah metro multi distrik yang lebih besar, di mana persyaratan investasinya lebih tinggi. Misalnya, di daerah metropolitan besar seperti Jakarta, mungkin diperlukan sistem kereta api massal, tetapi biayanya lebih dari 10 kali lipat per kilometernya⁹⁹ dibandingkan dengan sistem bus cepat yang mungkin cukup memadai untuk kota-kota yang lebih kecil. Mengembangkan kerangka kerja yang secara bertahap akan memberdayakan kota-kota yang secara keuangan sehat untuk mengakses pasar modal dan pembiayaan resmi serta memungkinkan kota-kota tersebut untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur mereka dengan lebih baik.

Meningkatkan proses perencanaan pemerintah daerah juga penting untuk mencapai 3 M

Meskipun reformasi pembiayaan akan membantu menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh daerah perkotaan yang tumbuh untuk mengatasi tekanan kemacetan yang meningkat, perencanaan kota yang efektif, termasuk perencanaan untuk pertumbuhan di masa depan, dapat menjadi perbedaan antara kota-kota yang memfasilitasi interaksi dan kota-kota yang memisahkan dan mengisolasi masyarakat. Diperlukan adanya kapasitas untuk merencanakan proyek infrastruktur dan pembangunan kota serta koordinasi yang lebih baik di berbagai tingkat Pemerintahan, lintas sektor dan lintas yurisdiksi untuk memastikan bahwa sumber daya dibelanjakan secara efisien dan efektif.

⁹⁸ Jasciens, V. dan S. Straub (2018).

⁹⁹ Berdasarkan studi kasus di AS, biaya MRT adalah USD 104,5/km vs. USD 8,4/km untuk BRT. Lihat Cervero (2013).

Kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola investasi publik harus diperkuat

Kurangnya kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola investasi lokal dalam infrastruktur menghambat konektivitas dan pemberian layanan di dalam kota. Misalnya, dukungan keuangan dari pemerintah pusat untuk sistem angkutan massal harus diberikan hanya setelah kota-kota telah mengembangkan rencana mobilitas terpadu yang membahas pengembangan tata ruang kota dan mengartikulasikan manajemen permintaan, infrastruktur transportasi, dan sistem yang diperlukan untuk mendukung struktur perkotaan yang dikehendaki. Rencana mobilitas tersebut harus dikembangkan dengan jangkauan yang komprehensif untuk kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Partisipasi publik harus dilanjutkan melalui langkah-langkah perencanaan selanjutnya dari analisis alternatif, pemilihan moda transportasi, dan desain infrastruktur serta elemen sistem dari rencana mobilitas tersebut. Kecuali mungkin untuk Jakarta, daerah-daerah metro kekurangan kapasitas teknis untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem ini. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan kota yang progresif dan terpadu adalah penting untuk mewujudkan urbanisasi yang inklusif.

Memenuhi kebutuhan yang berkembang dari daerah perkotaan memerlukan koordinasi perencanaan di tingkat sektoral dan antar-pemerintah, dan hubungan antara rencana undang-undang dengan rencana investasi yang konkret

Perencanaan kota modern menuntut adanya pendekatan multi-sektoral dan fleksibel yang mengintegrasikan tujuan sektoral, dipandu oleh dimensi spasial suatu kota. Beberapa kota di Indonesia telah mengambil langkah tersebut. Namun demikian, sebagian besar kota memiliki fleksibilitas yang terbatas dalam proses perencanaannya, yang memisahkan sektor-sektor dalam silo (kurangnya komunikasi dan tujuan bersama antar bagian dalam suatu organisasi – pent.). Saat ini, rencana undang-undang disusun tanpa adanya infrastruktur data spasial bersama (*common*) dan tidak terhubung satu sama lain maupun dari rencana investasi. Misalnya, untuk mendorong mobilitas dan pada saat yang sama mengelola kemacetan dan polusi, suatu kota harus mengkoordinasikan rencana transportasi perkotaan dengan rencana pemanfaatan lahan dan rencana infrastruktur yang terkait. Rencana sektoral yang terintegrasi dapat mengurangi kebutuhan untuk perjalanan panjang dengan mencari rumah, toko, layanan, dan pekerjaan dalam radius jarak yang pendek. Selain itu, seringkali koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terbatas, meskipun ada beberapa tanggung jawab bersama. Indonesia membutuhkan kerangka kerja yang efektif untuk koordinasi antar-sektor dan antar-jurisdiksi. Untuk itu, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan platform kolaboratif untuk mengatur pembangunan perkotaan. Platform tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketersediaan pembiayaan (Kotak B.2).

Daerah-daerah metro multi distrik menghadapi tantangan koordinasi yang berbeda yang mengharuskan provinsi untuk meningkatkan peran mereka

Koordinasi lintas kabupaten di daerah metropolitan multi-distrik terbatas, dan jika hal tersebut terjadi, biasanya terjadi secara *ad-hoc* (demi suatu tujuan khusus – pent.) dan spontan. Masalah koordinasi sangat menonjol untuk layanan air bersih regional, transportasi metropolitan, pengelolaan limbah padat dan manajemen risiko bencana, di mana permasalahan tersebut menjangkau banyak kabupaten. Untuk memungkinkan pemberian layanan yang lebih konsisten yang bersifat lintas batas atau multi-distrik, koordinasi metropolitan seharusnya tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah provinsi (yang berarti dapat ditafsirkan sebagai urusan opsional), tetapi juga tanggung jawabnya (yang berarti bahwa pemerintah provinsi bertanggung jawab secara sebagian saja tetapi secara resmi untuk memastikan pemberian layanan dalam kondisi metropolitan multi-distrik). Untuk mendorong berlangsungnya koordinasi semacam itu, disarankan ada evaluasi kinerja dan penghargaan yang diberikan kepada provinsi dan kabupaten yang terlibat dalam tata kelola metropolitan yang baik. Insentif untuk koordinasi juga harus diberikan kepada kabupaten, sementara insentif untuk memfasilitasi koordinasi antar kabupaten akan diberikan bagi pemerintah provinsi yang bersangkutan.

Pembangunan berorientasi transportasi (*transit-oriented*)

Pembangunan berorientasi transportasi (*transit-oriented development*) memfasilitasi peningkatan kepadatan penduduk (densifikasi) dan integrasi, dengan menempatkan lokasi perumahan, opsi ritel dan transportasi dalam jarak yang dekat. Ini mungkin melibatkan pembangunan kembali struktur perumahan atau mendorong pembangunan bangunan baru dengan pembangunan yang

development) akan mendukung peningkatan konektivitas dan kualitas hidup...

lebih vertikal dengan mengizinkan rasio keluasan lantai yang lebih tinggi, sehingga melonggarkan batasan ketinggian bangunan, atau memungkinkan kepadatan yang lebih besar di zona target. Zona target dapat dipilih untuk mendorong tujuan daerah setempat, seperti mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi atau pengembangan bangunan multi fungsi (*mixed-used*) yang dapat secara leluasa digunakan oleh para pejalan kaki. Kota-kota metropolitan Indonesia dapat mengikuti contoh kota-kota seperti Hong Kong dan Seoul, yang telah mengintensifkan penggunaan lahan di sekitar halte pemberhentian transportasi umum. Seoul mengizinkan rasio luas lantai hingga 20 kali lebih tinggi di lingkungan yang lebih terhubung dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih jauh keterhubungannya. Selain itu, meningkatkan kepadatan pembangunan perumahan dalam radius setengah mil di sekitar simpul transportasi umum dapat meningkatkan penyediaan perumahan di San Diego hingga hampir 30 persen (MGI 2016).

...seperti halnya peningkatan kualitas permukiman kumuh yang ada dan peningkatan pasokan perumahan yang terjangkau yang dekat dengan jaringan transportasi

Harga tanah yang tinggi dan kekurangan lahan secara keseluruhan di pusat-pusat wilayah metro multi distrik dan metro distrik tunggal mengharuskan untuk menetapkan prinsip-prinsip penyediaan lahan untuk perumahan yang terjangkau di Indonesia. Tanpa adanya hal tersebut, lahan yang tersedia untuk perumahan yang terjangkau tidaklah mungkin secara berkelanjutan memenuhi kebutuhan rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah, dan dengan demikian berakhir pada meningkatnya jumlah permukiman informal dan rumah-rumah bersubsidi berlokasi jauh dari pusat kota. Kebijakan perumahan untuk pembangunan perkotaan harus berfokus pada peningkatan kualitas daerah kumuh, di mana kondisi tempat tinggalnya kurang layak, tetapi cenderung lebih dekat dengan infrastruktur transportasi, layanan publik lainnya dan peluang ekonomi. Kebijakan harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan pasokan perumahan yang terjangkau, terutama ketika kota bertumbuh. Hal ini akan membutuhkan koordinasi pemanfaatan lahan dan perencanaan tata ruang, memprioritaskan lahan perkotaan untuk perumahan yang terjangkau, dan mempercepat sertifikasi tanah. Indonesia juga harus mengembangkan agenda perumahan yang lebih komprehensif yang mencakup pasar penyewaan dan perbaikan rumah.

Kebijakan untuk meningkatkan transportasi dan perumahan harus disesuaikan dengan jenis kawasan perkotaannya

Tantangan dalam membuat kota lebih inklusif berbeda dalam skala dan cakupannya di seluruh portofolio daerah-daerah, yang membutuhkan strategi yang disesuaikan. Dalam hal perumahan, daerah-daerah metro multi-distrik perlu berfokus untuk memastikan bahwa perumahan tersedia baik di daerah inti maupun pinggiran, dan untuk menghindari penciptaan kantong-kantong kemiskinan. Untuk daerah-daerah metro distrik tunggal, di mana kendala pasokan perumahan mungkin lebih menonjol dibandingkan dengan tekanan sisi permintaan, fokus pada penyediaan lahan yang tersedia untuk pembangunan akan menjadi penting. Daerah perkotaan non-metro, di mana tekanan permintaan perumahan mungkin meningkat, harus memastikan agar pembangunan baru tetap terhubung dengan kota dan pembangunan bangunan tambahan (*infill development*) untuk perumahan baru adalah memungkinkan dan menarik bagi sektor swasta. Sebagaimana dicatat sebelumnya, sehubungan dengan transportasi, daerah-daerah metro multi-distrik cenderung membutuhkan investasi jangka panjang yang lebih mahal dalam hal infrastruktur dibandingkan dengan kota-kota yang lebih kecil, sehingga integrasi yang lebih baik – baik antara inti dan pinggiran, dan dengan daerah-daerah lain – dapat dicapai.

Untuk memastikan bahwa semua bagian dalam manfaat dari urbanisasi, penyesuaian dan penargetan adalah hal-hal yang diperlukan untuk daerah-daerah yang tertinggal...

Kebijakan yang ditargetkan secara spasial mungkin juga diperlukan untuk memastikan terwujudnya inklusi secara penuh untuk daerah-daerah yang terus tertinggal. Daripada memberi insentif yang ditargetkan untuk menarik berbagai perusahaan ke daerah-daerah terpencil, yang telah terbukti memiliki dampak yang kecil di luar Jawa-Bali, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk lebih berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Strategi semacam ini dapat dilengkapi dengan insentif (misalnya, melalui pengembangan infrastruktur khusus atau pengurangan birokrasi yang berlebihan (*red tape*)) bagi perusahaan, tetapi secara khusus didasarkan pada kontribusi mereka terhadap agenda modal manusia dengan berinvestasi dalam keterampilan, terutama keterampilan yang sejalan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif suatu daerah, dan menciptakan lapangan kerja dengan konten pembelajaran yang

signifikan. Kriteria yang ketat tetapi transparan untuk memilih industri yang ditargetkan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah penting, karena dapat berbiaya tinggi.

...dan kelompok-kelompok yang mungkin tertinggal

Akhirnya, kebijakan yang disesuaikan dan ditargetkan juga diperlukan agar kota-kota di Indonesia dapat menjadi lebih ramah bagi perempuan dan anak perempuan, lansia, dan para penyandang cacat yang menghadapi tantangan mobilitas yang unik. Berbagai peran perempuan dalam masyarakat membuat pola transportasi mereka lebih rumit dibandingkan dengan pria, yang seringkali menggabungkan perjalanan antara ke tempat kerja, sekolah, dan rumah. Ketakutan akan pelecehan dan kekerasan, khususnya yang terjadi di transportasi umum, dapat membatasi akses perempuan terhadap layanan dan pekerjaan. Tantangan aksesibilitas dalam transportasi umum, trotoar, dan bangunan di daerah-daerah perkotaan membatasi mobilitas dan peluang para lansia dan penyandang cacat. Agar kota-kota di Indonesia benar-benar inklusif, perencanaan kota harus menerapkan prinsip desain dan standar konstruksi untuk ruang publik dan bangunan yang mengenali kebutuhan semua segmen penduduk.

Kotak B.2: Pendekatan programatik yang luas untuk urbanisasi di Indonesia

Untuk mengatasi tantangan urbanisasi di Indonesia, Bank Dunia secara aktif mendukung Pemerintah Indonesia dalam perancangan dan pelaksanaan tanggapan program yang luas.

Pilar (*building block*) utama dari pendekatan ini terdiri dari rangkaian program nasional di sektor-sektor yang merupakan inti dari pembangunan kota yang berkelanjutan. Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Nasional Perumahan yang Terjangkau (*National Affordable Housing Program*, NAHP), dan Program Nasional Penyediaan Air Minum Perkotaan (*National Urban Water Supply Program*, NUWAS), saat ini sedang dilaksanakan. Program sektor nasional lainnya tentang pengelolaan limbah padat, transportasi perkotaan, sanitasi perkotaan, dan manajemen banjir perkotaan, sedang disusun. Meskipun rancangan dari masing-masing program nasional tersebut berbeda-beda berdasarkan sektor, semua program berfokus pada membantu pemerintah daerah untuk mengimplementasikan investasi dan memberikan layanan yang lebih baik, dengan kerangka kerja dan kriteria yang jelas bagi pemerintah daerah untuk mengakses bantuan teknis dan keuangan melalui program tersebut.

Melengkapi program-program nasional tersebut adalah penekanan yang kuat untuk membangun kapasitas teknis dan keuangan untuk implementasi. Dana Pembangunan Infrastruktur Regional (*Regional Infrastructure Development Fund*, RIDF), yang dilaksanakan oleh PT SMI, menawarkan pinjaman kepada pemerintah daerah untuk investasi infrastruktur. Selain itu, pinjaman bantuan teknis sedang dipersiapkan untuk Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional (*National Urban Development Project*, NUDP), yang akan memperkuat kapasitas manajemen perkotaan bagi pemerintah daerah, terutama pada perencanaan terpadu dan keuangan kota. Pada gilirannya, pemerintah daerah lebih mampu untuk mengambil peran utama dalam perencanaan dan pelaksanaan investasi untuk kota mereka masing-masing, sementara peran pemerintah pusat berfokus pada penyediaan kerangka kebijakan, peraturan dan pendanaan.

Pendekatan yang terkonsolidasi untuk melaksanakan semua hal tersebut akan memerlukan koordinasi yang efektif: secara vertikal antara tingkat pusat, provinsi dan daerah, serta secara horizontal lintas sektoral, antar instansi pemerintah, dan batas administratif di wilayah metropolitan multi-distrik. Mengangkat agenda urbanisasi sebagai prioritas pembangunan nasional, dengan mekanisme koordinasi tingkat tinggi di berbagai tingkat pemerintahan, akan menjadi hal yang penting.

Lampiran B: Daftar lengkap wilayah metro kabupaten/kota multi dan kabupaten/Kota tunggal

Pulau	Metro	Tipe	Inti	Peripheries	Wilayah (km2)	Populasi			
	Name					Total	Urban	%	Kepadatan
Jawa-Bali	Jakarta	Multi	DKI Jakarta	Kota & Kab Bogor; Kota Depok; Kota & Kab Tangerang; Kota Tangerang Selatan; Kota & Kab, Bekasi	6,800,4	30,962,372	28,627,190	(92,5)	4,553
Jawa-Bali	Bandung	Multi	Kota Bandung	Kota Cimahi; Kab, Bandung; Kab, Bandung Barat	3,296,1	8,121,474	6,962,478	(85,9)	2,464
Jawa-Bali	Surabaya	Multi	Kota Surabaya	Kab, Sidoarjo; Kab, Gresik	1,978,4	6,167,832	5,476,349	(88,9)	3,118
Jawa-Bali	Surakarta	Multi	Kota Surakarta	Kab, Boyolali; Kab, Sukoharjo Kab, Karanganyar; Kab, Klaten	3,131,7	4,325,759	2,690,286	(62,2)	1,381
Jawa-Bali	Semarang	Multi	Kota Semarang	Kab, Demak; Kab, Kendal	2,285,4	3,713,708	2,496,601	(67,2)	1,625
Jawa-Bali	Malang	Multi	Kota Malang	Kota Batu; Kab, Malang	3,782,1	3,569,742	2,227,844	(62,5)	944
Jawa-Bali	Sukabumi	Multi	Kota Sukabumi	Kab, Sukabumi	4,196,6	2,735,825	1,328,911	(48,9)	652
Jawa-Bali	Denpasar	Multi	Kota Denpasar	Kab, Badung; Kab, Gianyar; Kab, Klungkung; Kab, Tabanan	2,056,4	2,581,421	1,945,334	(75,6)	1,255
Jawa-Bali	Yogyakarta	Multi	Kota Yogyakarta	Kab, Bantul; Kab, Sleman	1,116,5	2,552,038	2,261,131	(88,9)	2,286
Jawa-Bali	Pasuruan	Multi	Kota Pasuruan	Kab, Pasuruan	1,499,0	1,761,658	879,423	(50,0)	1,175
Jawa-Bali	Magelang	Multi	Kota Magelang	Kab, Magelang	1,147,3	1,353,586	466,733	(34,5)	1,180
Jawa-Bali	Probolinggo	Multi	Kota Probolinggo	Kab, Probolinggo	1,751,0	1,337,679	587,991	(43,8)	764
Jawa-Bali	Blitar	Multi	Kota Blitar	Kab, Blitar	1,797,1	1,277,350	568,448	(44,6)	711
Jawa-Bali	Mojokerto	Multi	Kota Mojokerto	Kab, Mojokerto	995,2	1,194,071	641,327	(53,8)	1,200
Jawa-Bali	Salatiga	Multi	Kota Salatiga	Kab, Semarang	1,056,2	1,167,503	574,426	(49,2)	1,105
Kalimantan	Pontianak	Multi	Kota Pontianak	Kab, Kubu Raya; Kab, Landak; Kab, Mempawah	19,137,9	1,741,065	849,784	(48,8)	91
Kalimantan	Banjarmasin	Multi	Kota Banjarmasin	Kab, Barito Kuala	2,397,2	959,287	714,406	(74,3)	400
Kalimantan	Samarinda	Single	Kota Samarinda		604,8	805,284	757,523	(94,1)	1,331
Kalimantan	Balikpapan	Single	Kota Balikpapan		467,6	610,741	576,559	(94,4)	1,306
Sulawesi	Makassar	Multi	Kota Makassar	Kab, Gowa; Kab, Maros; Kab, Takalar	4,007,9	2,757,084	1,837,228	(66,7)	688
Sumatera	Medan	Multi	Kota Medan	Kota Binjai; Kab, Serdang Bedagai; Kota Tebing Tinggi; Kab, Deli Serdang	4,894,0	5,192,973	4,316,753	(83,2)	1,061
Sumatera	Palembang	Single	Kota Palembang		381,2	1,556,692	1,540,981	(99,0)	4,084
Sumatera	Pekanbaru	Single	Kota Pekanbaru		609,5	1,010,371	991,496	(98,1)	1,658
Sumatera	Bandar Lampung	Single	Kota Bandar Lampung		295,9	959,224	949,563	(99,0)	3,242
Sumatera	Padang	Single	Kota Padang		704,9	890,937	853,321	(95,8)	1,264
Sumatera	Banda Aceh	Multi	Kota Banda Aceh	Kab, Aceh Besar	2,941,4	633,357	358,009	(56,4)	215
Sumatera	Bukittinggi	Multi	Kota Bukittinggi	Kab, Agam	2,294,8	592,953	276,956	(46,8)	258
Sumatera	Kota Jambi	Single	Kota Jambi		103,4	567,450	550,425	(97,0)	5,489

Catatan: Tabel diurutkan berdasarkan urutan menurun dari jumlah total populasi di masing-masing pulau, data populasi dari SUSENAS (2016), wilayah Metro diperoleh pada batas administrasi tingkat 2 tahun 1996, sementara distrik inti dan pinggiran dalam tabel ini berdasarkan pada batas administrasi tingkat 2-2016.

Referensi

BAGIAN A

- APBN Kita, July 2018, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/informasi-apbn-kita-2018/>
- Asia Nikkei, August 24, 2018, <https://asia.nikkei.com/Economy/Indonesia-aims-to-raise-import-tariffs-on-900-consumer-items>
- Bank Indonesia, July 19, 2018, Bank Indonesia Board of Governor Meeting press release, https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_205518.aspx
- Berita Satu, August 15, 2018, <http://id.beritasatu.com/home/kebijakan-dmo-batu-bara-dan-keuangan-pln/179211>,
- Bloomberg, July 16, 2018, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-16/china-economy-remains-robust-as-country-readies-for-trade-war>
- BPS, August 6, 2018, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2018, Berita Resmi Statistik, Jakarta, Accessed through: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/06/1521/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2018-tumbuh-5-27-persen.html>
- CNN, August 6, 2018, Gaji dan honor pegawai topang pertumbuhan ekonomi kuartal II, Accessed through: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180806122455-532-319857/gaji-dan-honor-pegawai-topang-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii>
- CNBC, June 22, 2018, <https://www.cnbc.com/2018/06/22/opec-ministers-strike-deal-on-oil-production-levels.html>,
- Detikfinance, April 24, 2018, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3987617/masalah-tanah-masih-jadi-momok-pembangunan-infrastruktur-ri>,
- DJPPR, June 2017, <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/loadViewer?idViewer=7201&action=download>
DJPPR, 2018, <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/24>
- Gan B, June 26, 2018, “OCBC Commodities 2H18 Outlook: Price rallies dissipated... What now?” OCBC Bank, <https://www.ocbc.com/assets/pdf/commodities%20research/outlook/2018/commodity%20outlook%202h18.pdf>
- Halim, D., H, Johnson and E, Perova, 2017, “Could Childcare Services Improve Women’s Labor Market Outcomes in Indonesia?” World Bank-Umbrella Facility for Gender Equality-DFAT, Policy Brief Issue 1, March 2017,
- Indonesia Investments, July 28, 2018, Consumer Price Indeks Indonesia: Inflation at 0,28% in July 2018, <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/consumer-price-indeks-indonesia-inflation-at-0,28-in-july-2018/item8924?>
- Indonesia Investments, August 31, 2018, <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/indonesia-implements-expanded-b20-program-on-1-september-2018/item8962?>
- IHS Markit, September 10, 2018, Global pertumbuhan close to two-year low in broadening slowdown, <https://ihsmarkit.com/research-analysis/global-pertumbuhan-close-to-two-year-low-in-broadening-slowdown.html>
- Kemenkeu, 2018, Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama, tahun anggaran 2018, <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/content/Publikasi/2018%20lapsem%201.pdf>

- Kontan, May 02, 2018, <http://keuangan.kontan.co.id/news/perkuat-data-pbi-bpjs-kesehatan-bekerjasama-dengan-kemsos>
- Kumparan, December 12, 2017, Distribusi tertutup elpiji 3 Kg bersubsidi diundur hingga 2019, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/distribusi-tertutup-elpiji-3-kg-bersubsidi-diundur-hingga-2019>
- Kumparan, June 24, 2018, 5 Hal yang perlu diketahui soal LPG 3 Kg Nonsubsidi, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/5-hal-yang-perlu-diketahui-soal-lpg-3-kg-nonsubsidi>
- Merdeka, April, 2018, <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-revisi-waktu-pencairan-dana-bpnt-jadi-april-2018.html>,
- Oil Change International, June 11, 2018, Debunked: The G20 Clean Gas Myth, <http://priceofoil.org/2018/06/11/debunked-g20-clean-gas-myth/>
- OPEC, June 22, 2018, Press Release: OPEC 174th Meeting concludes, https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5072.htm
- PU-net, July 5, 2018, Semester I 2018, Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Rp 30, 38 Triliun, <https://www.pu.go.id/berita/view/15869/semester-i-2018-belanja-infrastruktur-kementerian-pupr-rp-30-38-triliun>,
- Reuters, June 16, 2018, Coal, Paris deal isolates U,S, from other G20 nations at energy meeting, <https://www.reuters.com/article/us-argentina-g20-energy/coal-paris-deal-isolates-u-s-from-other-g20-nations-at-energy-meeting-idUSKBN1JB331>
- Reuters, July 3, 2018, China to cut coal use, curb steel in 2018-2020 pollution plan, <https://www.reuters.com/article/us-china-pollution/china-to-cut-coal-use-curb-steel-in-2018-2020-pollution-plan-idUSKBN1JT12J>
- Reuters, July 9, 2018, Indonesia central bank confident on yields as it assesses rate path, Accessed through: <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-cenbank/indonesia-central-bank-confident-on-yields-as-it-assesses-rate-path-idUSKBN1JZ1RK>
- Shell, 2018, Shell LNG Outlook 2018, accessed online at: <https://www.shell.com/energy-and-innovation/natural-gas/liquefied-natural-gas-lng/lng-outlook.html>
- S&P Global, June 4, 2018, “Analysis: Strong JKM prices to drive US LNG to East Asia this summer,” by J, Robinson, <https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/060418-analysis-strong-jkm-prices-to-drive-us-lng-to-east-asia-this-summer>
- The Diplomat, June 1, 2018, “Indonesia’s Looming Energy Challenges,” by Septia Supendi, <https://thediplomat.com/2018/06/indonesias-looming-energy-challenges/>
- The Star, June 23, 2018, Planters get apprehensive as CPO prices fall, <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2018/06/23/planters-get-apprehensive-as-cpo-prices-fall/>
- The Star, July 14, 2018, Malaysian palm oil price falls nearly 2% to 3-year low, <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2018/07/14/palm-falls-nearly-2-pct-to-3-year-low/>
- The Jakarta Post, March 6, 2018, Fuel, electricity prices to remain unchanged until 2019, <http://www.thejakartapost.com/news/2018/03/06/fuel-electricity-prices-to-remain-unchanged-until-2019.html>
- Tirto.id, August 15, 2018, <https://tirto.id/realisasi-penyyaluran-bantuan-sosial-tumbuh-758-hingga-juli-2018-cSzq>
- Tribunnews, April 9, 2018, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/04/09/mulai-25-april-penerima-bantuan-pangan-non-tunai-dinaikkan-dua-kali-lipat-jadi-35-juta-orang>,

USTR (United States Trade Representative), June 20, 2018,

<https://assets.documentcloud.org/documents/4430282/Office-of-the-United-States-Trade-Representative.pdf>

USTR, 2018, <https://ustr.gov/sites/default/files/2018-13248.pdf>,

<https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Final%20Second%20Tranche.pdf>

World Bank, 2017, *Indonesia Economic quarterly: Upgraded*, June, Jakarta: World Bank,

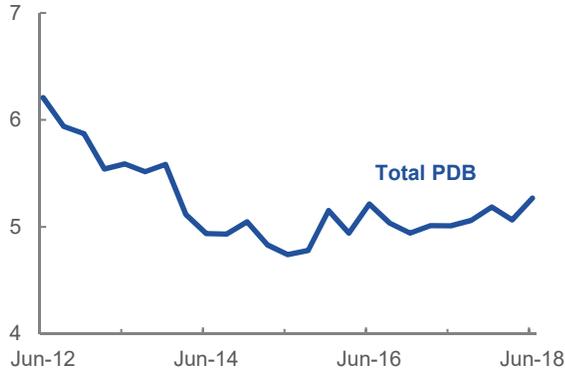
World's Top Exports, May 11, 2018, Palm oil exports by country, <http://www.worldstopexports.com/palm-oil-exports-by-country/>

BAGIAN B

- Bosker, M., J, Park and M, Roberts, M , 2018, “Does definition matter? Metropolitan areas and agglomeration economies in a large-developing country”, Background paper for the forthcoming World Bank Flagship Report on Urbanization,
- Cervero, R, 2013, “Bus Rapid Transport (BRT): An Efficient and Competitive Mode of Public Transport”, *University of California Berkeley Institute of Urban Regional Development*,
- Dijkstra, L., and H, Poelman, 2014, “A harmonised definition of cities and rural areas: The new degree of urbanization,” *Regional Working Paper*, Directorate-General for Regional and Urban Policy, European Commission, Brussels,
- Fadliya and Ross H, McLeod, 2010, "Fiscal Transfers to Regional Governments in Indonesia", *Departmental Working Papers 2010-14*, The Australian National University, Arndt-Corden Department of Economics,
- Ferreira, M, M, 2018, *Human Capital in Cities* in Ferreira M, M, and M, Roberts eds, 2018, *Raising the Bar for Productive Cities in Latin America and the Caribbean*, Washington, D.C.: The World Bank,
- Jascisens, V, and S, Straub, 2018, “Decentralization That Delivers? Estimating the Infrastructure Impact of Indonesia Big-Bang Decentralization,” Background paper for the forthcoming World Bank Flagship Report on Urbanization
- Lain, J, 2018, “Multi-Dimensional Urban Poverty in Indonesia”, Background paper for the forthcoming World Bank Flagship Report on Urbanization,
- Lewis, B, 2014, “Twelve years of fiscal decentralization: a balance sheet”, in Hal Hill (ed), “Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia,” *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)*, Singapore, pp, 135-155,
- McKinsey Global Institute, October 2016, “A tool kit to close California’s housing gap: 3,5 million homes by 2025,”
- Park, J, and M, Roberts, 2018, “A New Typology of Districts for Indonesia,” Background Catatan to the forthcoming World Bank Flagship Report on Urbanization,
- Pradhan, K,C, 2013, “Unacknowledged Urbanisation: New Census Towns of India,” *Economic & Political Weekly*, Vol – XLVIII No, 36,
- Setiawan, I, S, Tiwari, H, Rizal, 2018, “Economic and Social Mobility in Urbanizing Indonesia,” Background paper for the forthcoming World Bank Flagship Report on Indonesia
- Tiwari, S, and A, R, Shidiq, 2018, “Sumbers of Welfare Disparities in Indonesia,” Background paper for the forthcoming World Bank Flagship Report on Indonesia
- Wai-Poi, M., H, Alatas, K, Chandrashekar, and J, Lain, 2018, “The Different Faces of Urban Indonesia: Recent Urban Trends in Indonesia,” Mimeo
- World Bank and Development Research Center (DRC) of the State Council, The People’s Republic of China, 2014, *Urban China: Toward Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization*, Washington, D.C.: World Bank,
- World Bank, 2008, *Reshaping Economic Geography*, World Development Report 2009, Washington, D.C.: World Bank,
- _____, 2017, *Indonesia Economic Quarterly: Decentralization that Delivers*, December, Jakarta: World Bank,
- _____, 2018a, *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class*, Forthcoming
- _____, 2018b, *Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP)*, Jakarta: World Bank,
- _____, 2018c, *Raising the Bar for Productive Cities in Latin America and the Caribbean*, Washington, D.C.: World Bank,

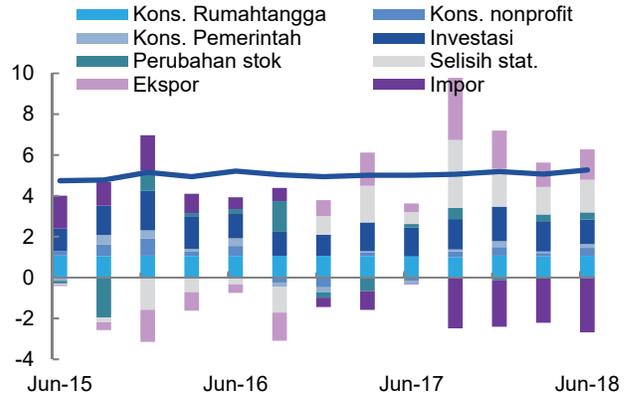
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil
(*pertumbuhan triwulanan yoy, persen*)



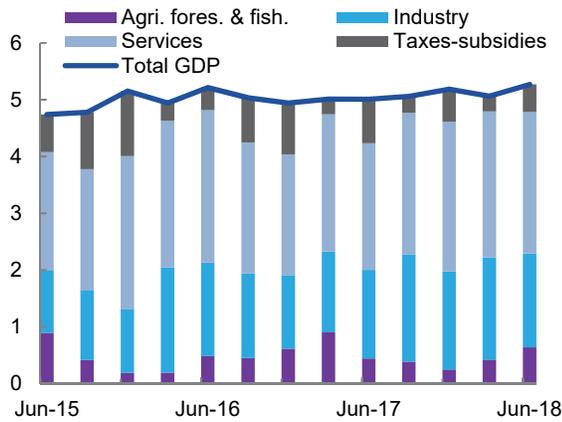
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB konsumsi
(*kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase*)



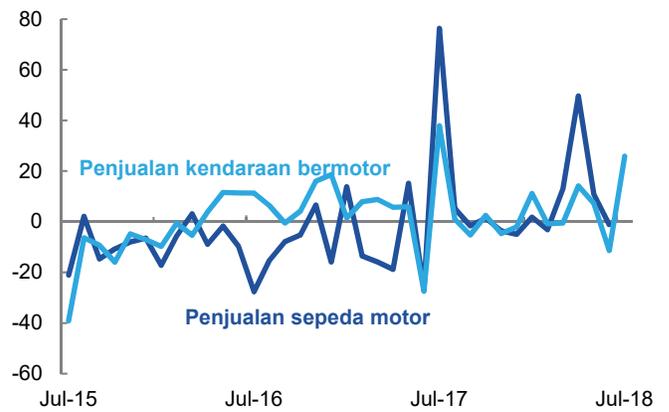
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi
(*kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase*)



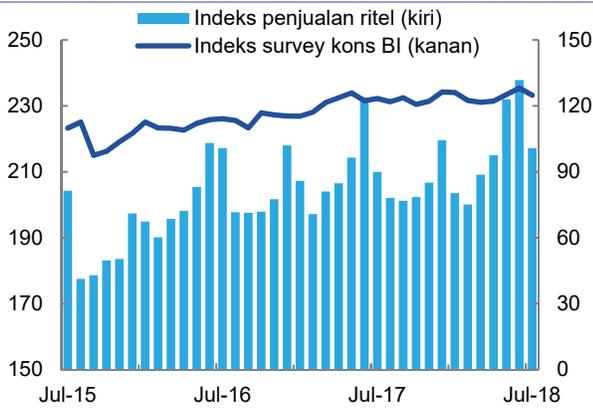
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor
(*pertumbuhan yoy, persen*)



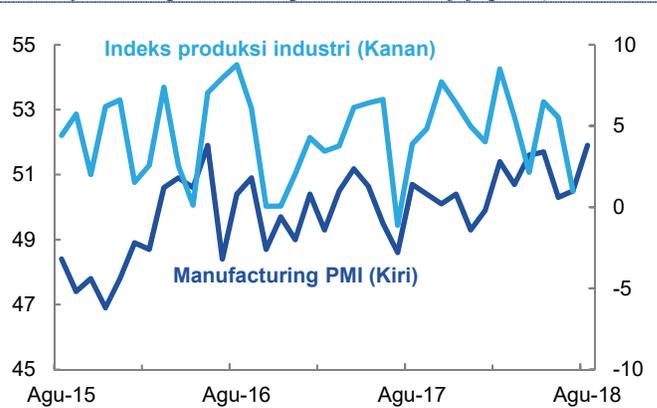
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen
(*tabun dasar penjualan eceran 2010=100*)



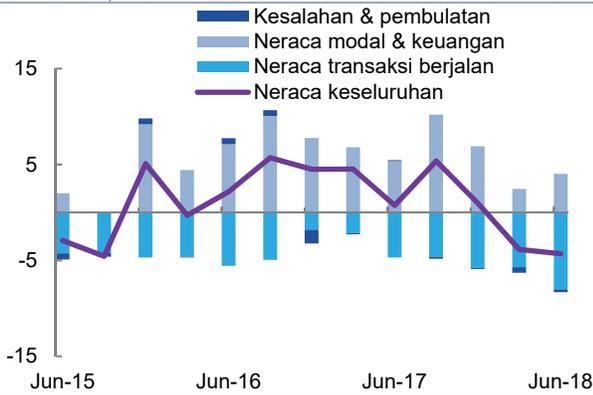
Sumber: BI

Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI
(*indeks difusi PMI; pertumbuhan produksi industri yoy, persen*)



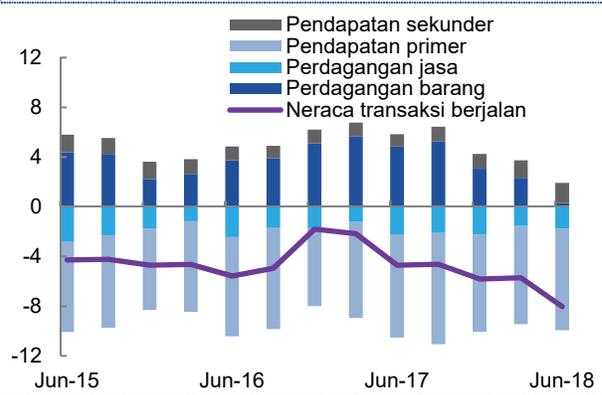
Sumber: BPS; Nikkei/Markit; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran
(USD miliar)



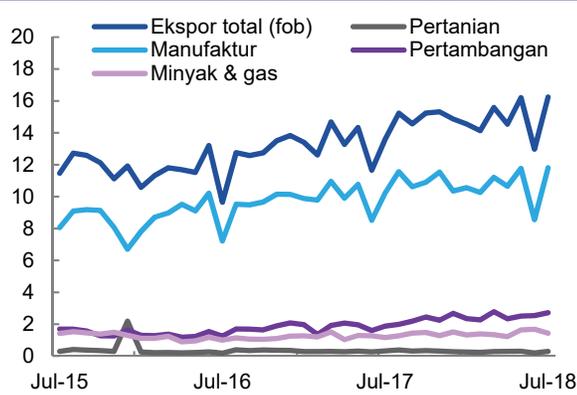
Sumber: BI

Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan
(USD miliar)



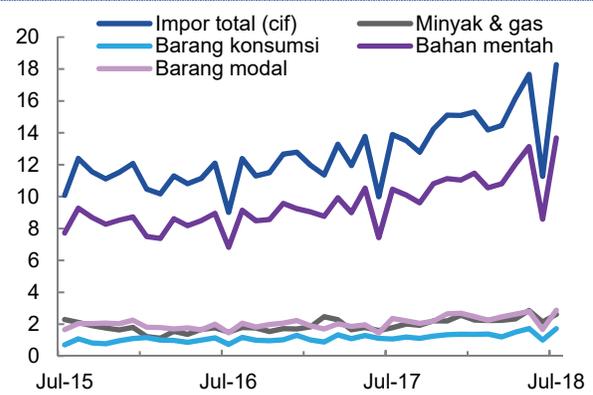
Sumber: BI

Lampiran Gambar 9: Ekspor barang
(USD miliar)



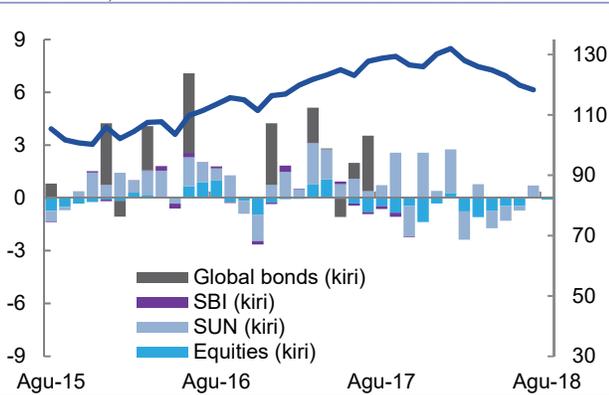
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 10: Impor barang
(USD miliar)



Sumber: BPS

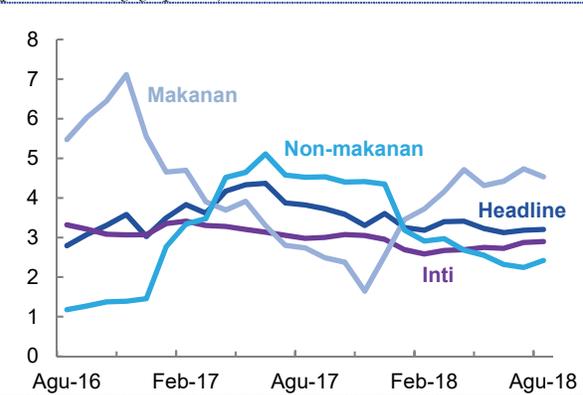
Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus modal
(USD miliar)



Sumber: BI; Kementerian Keuangan

Catatan: SUN = Surat Utang Negara; SBI = Surat Berharga BI

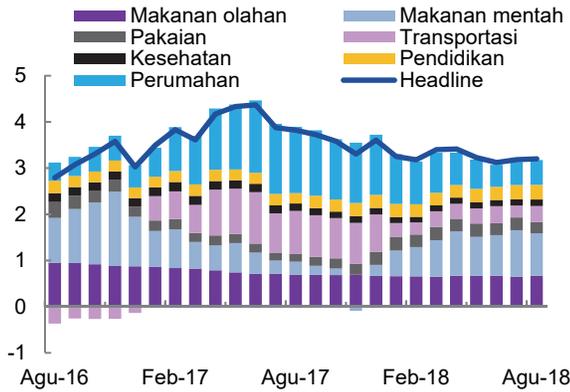
Lampiran Gambar 12: Inflasi
(pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: BPS; BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 13: Rincian IHK bulanan

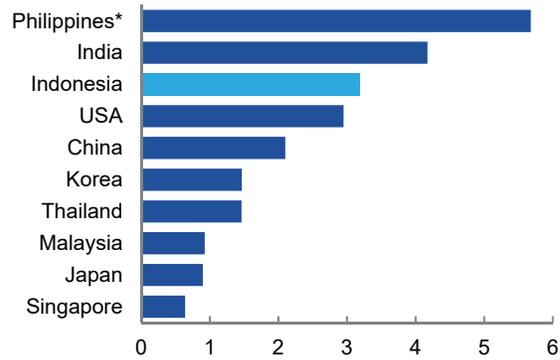
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara

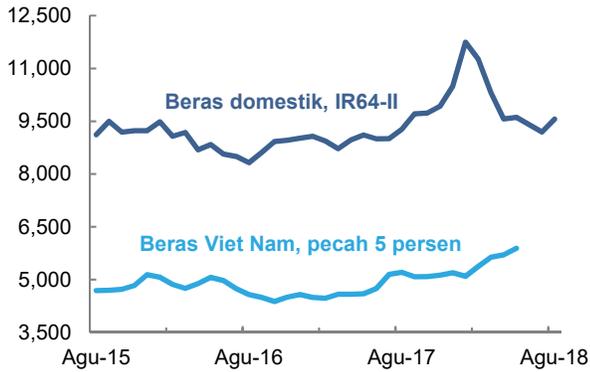
(pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: BPS; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: data Juli 2018; *data Juni 2018.

Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional

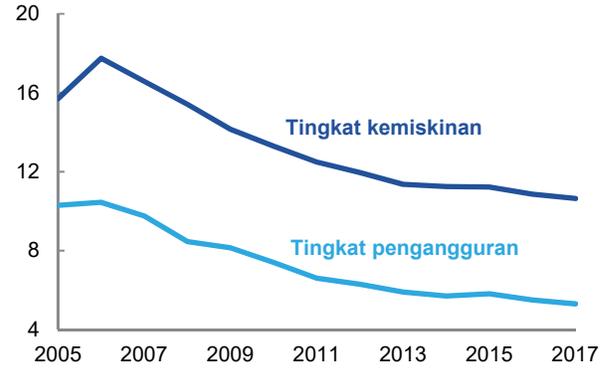
(barga grosir, IDR per kg)



Sumber: Pusat perkulakan beras Cipinang; FAO
Catatan: "pecah 5 persen" mengacu pada kualitas penggilingan beras. 5 persen merupakan proporsi biji pecah selama proses penggilingan.

Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran

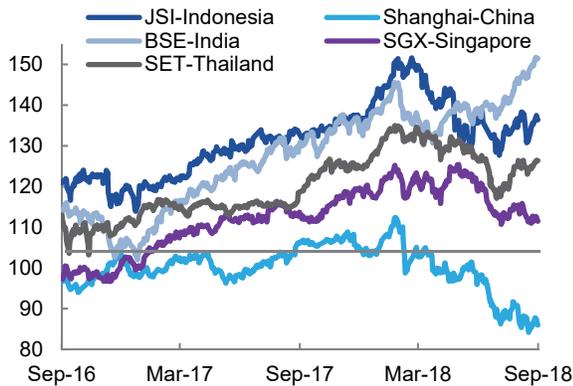
(persen)



Sumber: BPS
Catatan: Garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional

Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional

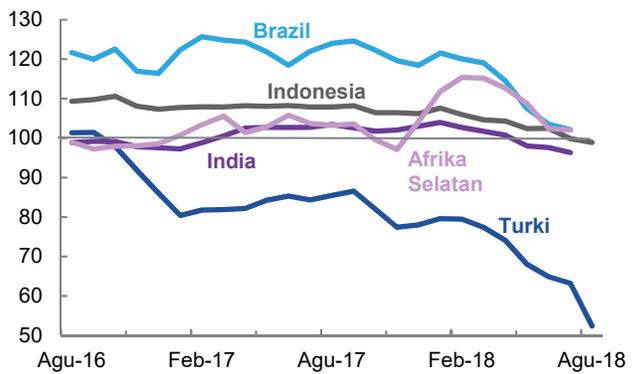
(indeks harian, September 1, 2015=100)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

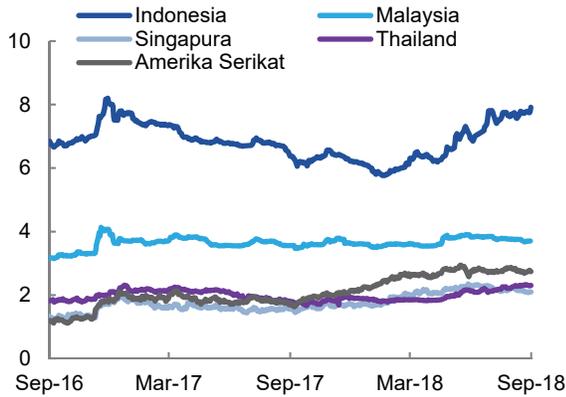
Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS

(indeks bulanan, Agustus 2015=100)



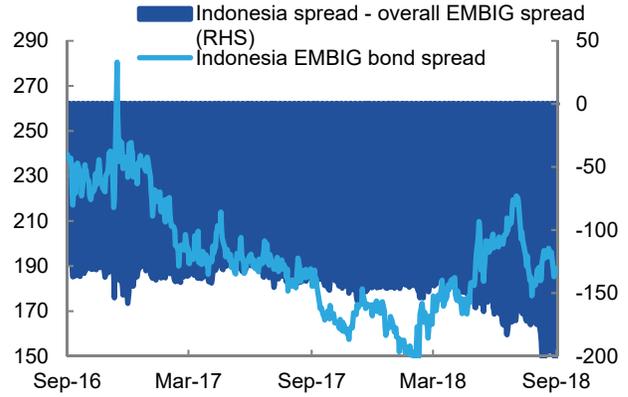
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal (persen)



Sumber: CEIC

Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS terhadap kelompok negara-negara EMBIG Global (basis poin)



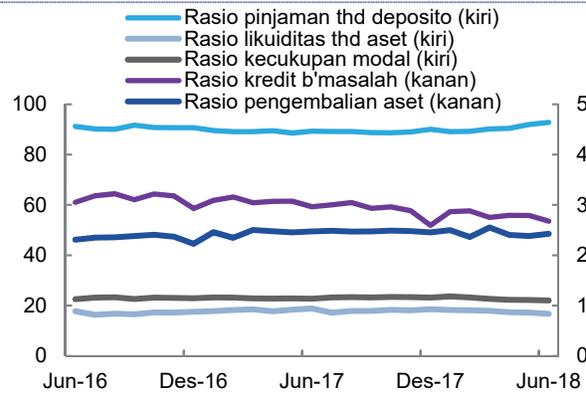
Sumber: JP Morgan

Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito (pertumbuhan yoy, persen)



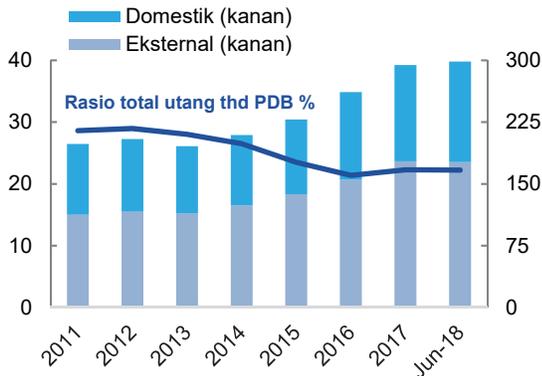
Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan (bulanan, persen)



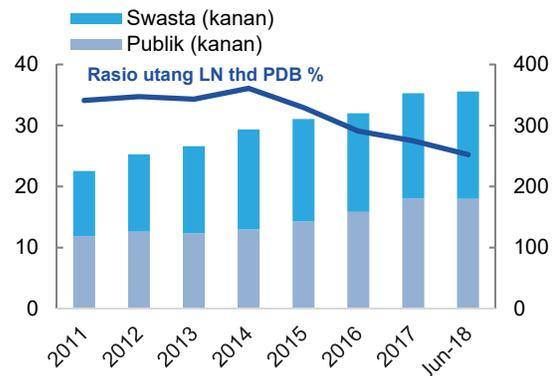
Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah (rasio terhadap PDB, kiri; USD miliar, kanan)



Sumber: BI; Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri (rasio terhadap PDB, kiri; USD miliar, kanan)



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah
(IDR trillion)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Realisasi						
A. Penerimaan dan hibah	1.211	1.338	1.439	1.550	1.508	1.556	1.660
1. Penerimaan pajak	874	981	1.077	1.147	1.240	1.285	1.343
2. Penerimaan non-pajak	331	352	355	399	256	262	311
B. Pengeluaran	1.295	1.491	1.651	1.777	1.807	1.864	2.007
1. Pemerintah pusat	884	1.011	1.137	1.204	1.183	1.154	1.265
2. Transfer ke pemerinta daerah	411	481	513	574	623	710	742
C. Neraca utama	9	-53	-99	-93	-142	-126	-124
D. SURPLUS / DEFISIT	-84	-153	-212	-227	-298	-308	-341
(persen dari PDB)	-1,1	-1,9	-2,3	-2,2	-2,6	-2,5	-2,5

Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Neraca keseluruhan sebagai terhadap PDB menggunakan PDB yang telah direvisi dengan tahun dasar yang disesuaikan

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran
(USD miliar)

	2014	2015	2016	2016	2017				2018	
				Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Neraca pembayaran	15,2	-1,1	12,1	4,5	4,5	0,7	5,4	1,0	-3,9	-4,3
<i>Persen dari PDB</i>	1,7	-0,1	1,3	1,9	1,9	0,3	2,0	0,4	-1,5	-1,6
Neraca berjalan	-27,5	-17,5	-17,0	-1,8	-2,2	-4,7	-4,6	-5,8	-5,7	-8,0
<i>Persen dari PDB</i>	-3,1	-2,0	-1,8	-0,7	-0,9	-1,9	-1,8	-2,3	-2,2	-3,0
Neraca perdagangan	-3,0	5,4	8,2	3,4	4,4	2,6	3,1	0,8	0,8	-1,5
Pendapatan bersih & transfer berjalan	-24,5	-22,9	-25,2	-5,2	-6,6	-7,3	-7,8	-6,6	-6,5	-6,5
Neraca modal dan keuangan	44,9	16,9	29,3	7,8	6,8	5,3	10,2	6,9	2,4	4,0
<i>Persen dari PDB</i>	5,0	2,0	3,1	3,2	2,8	2,1	3,9	2,7	0,9	1,5
Investasi langsung	14,7	10,7	16,1	3,5	2,8	4,4	7,4	4,9	2,9	2,5
Investasi portfolio	26,1	16,2	19,0	-0,3	6,5	8,1	4,0	2,0	-1,2	0,1
Investasi lain	4,3	-10,1	-5,8	4,4	-2,5	-7,2	-1,2	0,1	0,6	1,5
Kesalahan & pembulatan	-2,2	-0,4	-0,3	-1,5	-0,1	0,1	-0,2	-0,1	-0,6	-0,3
Cadangan devisa*	111,9	105,9	116,4	116,4	121,8	123,1	129,4	130,2	126,0	119,8

Sumber: BI; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: * Cadangan pada akhir periode.

Lampiran Tabel 3: Indikator ekonomi makro Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Neraca nasional (% perubahan)¹									
PDB riil	4,9	6,2	6,2	6,0	5,6	5,0	4,9	5,0	5,1
Investasi riil	11,4	8,5	8,9	9,1	5,0	4,4	5,0	4,5	6,2
Konsumsi riil	4,6	4,1	5,1	5,4	5,7	4,7	4,9	4,3	4,6
Swasta	3,7	4,8	5,1	5,5	5,5	5,3	4,8	5,0	5,0
Pemerintah	14,2	0,3	5,5	4,5	6,7	1,2	5,3	-0,1	2,1
Ekspor riil, barang dan jasa	30,6	15,3	14,8	1,6	4,2	1,1	-2,1	-1,6	9,1
Impor riil, barang dan jasa	26,6	17,3	15,0	8,0	1,9	2,1	-6,2	-2,4	8,1
Investasi (% PDB)	20	31	32	33	32,5	32,4	32,4	32,2	32,6
PDB nominal (USD miliar)	165	755	893	918	915	891	861	933	1.015
PDB per kapita (USD miliar)	857	3.167	3.688	3.741	3.668	3.532	3.370	3.603	3.878
Anggaran Pemerintah Pusat (% PDB)²									
Pendapatan dan hibah	20,8	14,5	15,5	15,5	15,1	14,7	13,1	12,5	12,3
Pendapatan non-pajak	9,0	3,9	4,2	4,1	3,7	3,8	2,2	2,1	2,3
Pendapatan pajak	11,7	10,5	11,2	11,4	11,3	10,9	10,8	10,4	9,9
Pengeluaran	22,4	15,2	16,5	17,3	17,3	16,8	15,7	15,0	14,8
Konsumsi	4,0	3,6	3,8	3,9	4,1	4,0	4,5	4,6	4,4
Modal	2,6	1,2	1,5	1,7	1,9	1,4	1,9	1,4	1,5
Bunga pinjaman	5,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Subsidi	6,3	2,8	3,8	4,0	3,7	3,7	1,6	1,4	1,2
Surplus/defisit	-1,6	-0,7	-1,1	-1,8	-2,2	-2,1	-2,6	-2,5	-2,5
Utang Pemerintah	97,9	24,5	23,1	23,0	24,9	24,7	27,4	28,3	30,8
Utang luar negeri pemerintah	51,4	11,1	10,2	9,9	11,2	10,2	12,7	12,3	12,8
Total utang luar negeri (termasuk utang swasta)	87,1	26,8	25,2	27,5	29,1	32,9	36,1	34,3	34,8
Neraca pembayaran (% PDB)³									
Neraca pembayaran keseluruhan	..	4,0	1,3	0,0	-0,8	1,7	-0,1	1,3	1,1
Neraca transaksi berjalan	4,8	0,7	0,2	-2,7	-3,2	-3,1	-2,0	-1,8	-1,7
Ekspor, barang dan jasa	42,8	22,0	23,9	23,0	22,4	22,3	19,9	18,0	19,1
Impor, barang dan jasa	33,9	19,2	21,2	23,2	23,1	22,7	19,3	17,1	18,0
Transaksi berjalan	8,9	2,8	2,7	-0,2	-0,7	-0,3	0,6	0,9	1,1
Neraca transaksi keuangan	..	3,5	1,5	2,7	2,4	5,0	2,0	3,1	2,9
Penanaman modal langsung, neto	-2,8	1,5	1,3	1,5	1,3	1,7	1,2	1,7	2,0
Cadangan devisa bruto (USD miliar)	29,4	96	110	113	99	112	106	116	130
Moneter (% perubahan)³									
Deflator PDB ¹	20,4	8,3	7,5	3,8	5,0	5,4	4,0	2,5	4,3
Suku bunga Bank Indonesia (%)	6,3	4,8	4,3
Kredit domestik (akhir periode)	..	23,3	24,7	23,1	21,4	11,6	10,1	7,8	8,2
Nilai tukar nominal (rerata, IDR/USD)	8.392	9.087	8.776	9.384	10.460	11.879	13.392	13.307	13.384
Harga (% perubahan)¹									
Indeks Harga Konsumen (akhir periode)	9,4	7,0	3,8	3,7	8,1	8,4	3,4	3,0	3,6
Indeks Harga Konsumen (rerata)	3,7	5,1	5,3	4,0	6,4	6,4	6,4	3,5	3,8
Harga minyak mentah Indonesia (USD per barel, akhir periode) ⁴	28	79	112	113	107	60	36	51	61

Sumber: ¹ BPS dan Perhitungan staf Bank Dunia, menggunakan angka yang direvisi dengan tahun dasar 2010. ² Kementerian Keuangan dan Perhitungan staf Bank Dunia, ³ BI, ⁴ CEIC

Lampiran Tabel 4: Indikator pembangunan Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kependudukan¹									
Penduduk (juta orang)	213	243	246	249	252	255	258	261	264
Pertumbuhan penduduk (%)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1
Penduduk perkotaan (% dari total)	42	50	51	51	52	53	53,7	54	55
Rasio ketergantungan (% dari penduduk usia kerja)	55	51	51	50	50	50	49,2	49	49
Ketenagakerjaan²									
Angkatan kerja, total (juta orang)	98	117	117	120	120	122	122	125	128
Laki-laki	60	72	73	75	75	76	77	77	79
Perempuan	38	45	44	46	45	46	46	48	49
Proporsi pekerja di sektor agrikultur (%)	45	38	36	35	35	34	33	32	30
Proporsi pekerja di sektor industri (%)	17	19	21	22	20	21	22	21	22
Proporsi pekerja di sektor jasa (%)	37	42	43	43	45	45	45	47	48
Pengangguran, total (% dari jumlah angkatan kerja)	8,1	7,1	7,4	6,1	6,2	5,9	6,2	5,6	5,5
Kemiskinan dan distribusi pendapatan³									
Median konsumsi rumah tangga (000 IDR per bulan)	104	374	421	446	487	548	623	697	765
Garis kemiskinan nasional (000 IDR per bulan)	73	212	234	249	272	303	331	354	375
Populasi di bawah garis kemiskinan nasional (million)	38	31	30	29	28	28	29	28	28
Tingkat kemiskinan (% populasi di bawah garis kemiskinan nasional)	19,1	13,3	12,5	12,0	11,4	11,3	11,2	10,9	10,6
Urban (% dari populasi di bawah garis kemiskinan urban)	14,6	9,9	9,2	8,8	8,4	8,3	8,3	7,8	7,7
Rural (% dari populasi di bawah garis kemiskinan rural)	22,4	16,6	15,7	15,1	14,3	14,2	14,2	14,1	13,9
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	15,5	11,0	10,2	9,5	9,2	9,0	9,3	9,0	8,7
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	12,6	9,5	9,7	8,8	8,6	8,6	11,1	9,8	9,3
Indeks Gini	0,30	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,39
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	9,6	7,9	7,4	7,5	7,4	7,5	7,2	7,1	7,0
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	38,6	40,6	46,5	46,7	47,3	46,8	47,3	46,2	45,7
Belanja pemerintah untuk jaminan dan kesejahteraan sosial (% PDB) ⁴	..	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5
Kesehatan dan Gizi¹									
Tenaga kesehatan (per 1.000 orang)	0,16	0,14	..	0,20
Angka kematian balita (per 1.000 anak usia dibawah 5 tahun)	52	33	32	31	29	28	27	26	..
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	22	16	16	15	15	15	14	14	..
Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	41	28	27	26	25	24	23	22	..
Angka kematian ibu (estimasi model, per 100.000 kelahiran hidup)	265	165	156	148	140	133	126
Imunisasi campak (% dari anak usia dibawah 2 tahun)	76	78	80	82	81	75	75	76	..
Total pengeluaran untuk kesehatan (% dari PDB)	2,0	2,7	2,7	2,9	2,9	2,8
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% dari PDB)	0,7	1,0	1,0	1,1	1,2	1,1
Pendidikan³									
Angka Partisipasi Murni (APM) SD (%),	..	92	92	93	92	93	97	97	97
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	48	49	49	50	48	49	49	49
Angka Partisipasi Murni pendidikan tingkat menengah (%),	..	61	60	60	61	65	66	66	79
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	50	50	49	50	50	51	51	49
Angka Partisipasi Murni universitas/pendidikan tinggi (%),	..	16	14	15	16	18	20	21	19
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	53	50	54	54	55	56	55	53
Angka melek huruf Dewasa (%)	..	91	91	92	93	93	95	95	96
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% dari PDB) ⁵	..	3,5	3,6	3,8	3,8	3,6	3,5	3,3	2,98
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% dari APBN) ⁵	..	20,0	20,2	20,1	20,0	19,9	20,6	20,0	20,0
Air bersih dan kesehatan lingkungan¹									
Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% dari total penduduk)	78	85	85	86	86	87	87
Urban (% dari penduduk urban)	91	93	93	94	94	94	94
Rural (% dari penduduk rural)	68	76	77	77	78	79	80
Penduduk dengan akses fasilitas sanitasi (% dari total penduduk)	44	57	58	59	60	61	61
Urban (% dari penduduk urban)	64	70	71	71	72	72	72
Rural (% dari penduduk rural)	30	44	45	46	47	48	48
Lainnya¹									
Skor perbaikan pengurangan risiko bencana (skala 1-5; 5=paling baik)	3,3
Proporsi perempuan di kursi parlemen (%) ⁶	8	18	18	19	19	17	17	17	20

Sumber: ¹ World Development Indicators; ² BPS (Sakernas); ³ BPS (Susenas) dan World Bank; ⁴ Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Perhitungan staf Bank Dunia, hanya termasuk pendistribusian Raskin, asuransi kesehatan dan beasiswa pendidikan untuk warga miskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta realisasi; ⁵ Kementerian Keuangan; ⁶ Inter-Parliamentary Union



Australian Government

Department of Foreign Affairs and Trade

Supported by funding from the Australian Government
(Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the
Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis
(SEMEFPA) program.